



PEMERINTAH
KABUPATEN BONE

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2018



NOMOR : 01/LKj/ITDA-BONE/2018



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018.

LKj sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu unsur penting untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik & bersih (*good governance & clean government*) serta mendorong peningkatan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.

LKj disusun berdasarkan pada *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah* dan *Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* serta berpedoman pada *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*.

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kelima dalam masa Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018. LKj Tahun 2018 ini disusun berdasarkan dokumen perencanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2013-2018.

Penyusunan LKj Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone. Komitmen dalam penyusunan LKj Inspektorat Daerah Kab. Bone, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.



Cakupan LKj Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar belakang, maksud dan tujuan, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Inspektorat Daerah Kab. Bone Adapun Aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan Aspek Akuntabilitas Kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun 2018, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018 telah mencapai hasil yang positif, meskipun belum optimal mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone. Dari 5 (lima) indikator kinerja utama, terdapat 4 (empat) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat indikator kinerja yang belum optimal pencapaiannya. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya clean government & good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Dengan demikian, Kami berharap Laporan Kinerja Tahun 2018 ini menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan/kebijakan organisasi dan mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone di masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik & Bersih (Clean Government & Good Governance) pada Pemerintahan Kabupaten Bone.

Watampone, 15 Februari 2019

INSPEKTUR DAERAH,



Drs. H. A. AMAR MA'RUF P., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19590608 198603 1 015



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Maksud dan Tujuan	2
Gambaran Umum Organisasi	2
Isu-Isu Strategis Organisasi	4
Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
Rencana Strategis	8
Visi dan Misi	8
Tujuan dan Indikator Kinerja	9
Sasaran dan Indikator Kinerja	10
Program Strategis Untuk Pencapaian Sasaran	11
Indikator Kinerja Utama	12
Perjanjian Kinerja	13
Rencana Anggaran	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
Capaian Kinerja Organisasi	20
Capaian Indikator Kinerja Utama	20
Perbandingan Capaian Kinerja	23
Realisasi Anggaran	46
Gambaran Umum Anggaran Organisasi	46
Realisasi Keuangan	47
Pemanfaatan Anggaran	47
Hal-Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan	51
BAB IV PENUTUP	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	57



DAFTAR GAMBAR & TABEL

	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kab. Bone	3
Tabel 1 SDM Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018	4
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone	9
Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone.....	10
Tabel 2.3 Program Strategis Untuk Pencapaian Sasaran Inspektorat Daerah Kab. Bone	11
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kab. Bone	12
Tabel 2.5 Ikhtisar Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018	14
Tabel 2.6 Anggaran Belanja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018	15
Tabel 2.7 Alokasi Anggaran Per Sasaran Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018	15
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal Kinerja	19
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018..	21
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018	22
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tahun 2018 terhadap Target Indikator Kinerja Dari Sasaran Strategis RPJMD Tahun 2013-2018	22
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran 1 s.d. Sasaran 5 Tahun 2018 ..	23, 29, 33, 37, 41
Tabel 3.6 Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran 1 s.d. Sasaran 5 Tahun 2014-2018.....	23, 29, 33, 37, 42
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran 1 s.d. Sasaran 5 Tahun 2018 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2013-2018	24, 29, 34, 37, 42
Tabel 3.8 Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 1 s.d. Sasaran 5	27, 32, 35, 40, 44
Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja Sasaran 1 s.d. Sasaran 5	28, 33, 36, 41, 45
Tabel 3.10 Perbandingan Jumlah Temuan dan Rekomendasi BPK-RI atas Pemeriksaan/Audit terhadap LKPD Kab. Bone Tahun 2017 dan Tahun 2018	25
Tabel 3.11 Jumlah LHP Berdasarkan Jenis Pemeriksaan Tahun 2014 s.d. 2018	27
Tabel 3.12 Realisasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Instansi Pengawasan Hingga Tahun 2018	30



Tabel 3.13 Jumlah Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD (APIP) Inspektorat Daerah Kab. Bone Hingga Tahun 2018	39
Tabel 3.14 Kebutuhan SDM Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone	39
Tabel 3.15 Pagu Anggaran Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2017 & 2018 ...	46
Tabel 3.16 Alokasi Anggaran Belanja Inspektorat Daerah terhadap APBD Kab. Bone Tahun Anggaran 2014-2018	46
Tabel 3.17 Realisasi Keuangan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018	47
Tabel 3.18 Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran dan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun Anggaran 2018	48



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah Kab. Bone. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat OPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.



1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi perangkat daerah.

LKj Inspektorat Daerah Kab. Bone merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah merupakan bagian penting dari proses manajemen pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Dan hal ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab utama Inspektorat Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan pembinaan & pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, termasuk penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa sesuai dengan *Permendagri No. 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota*.

Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kab. Bone sebagai salah satu perangkat daerah penyelenggara *urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian*, dibentuk berdasarkan :

- *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;*
- *Peraturan Daerah Kab. Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.*



Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone diatur dalam *Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone*, yaitu sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Inspektorat Daerah

Membantu Bupati dalam pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

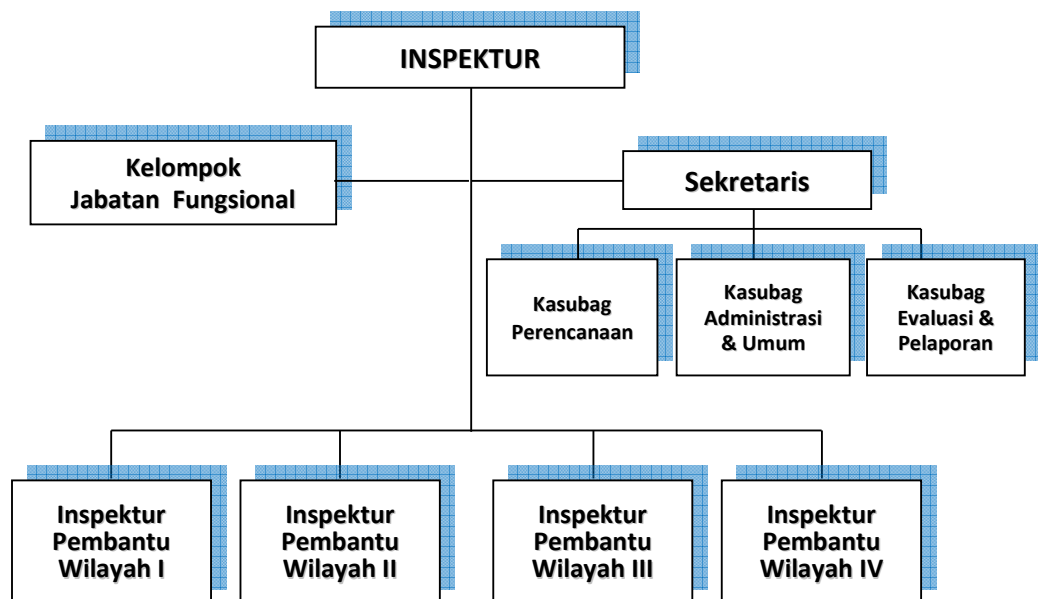
b. Fungsi Inspektorat Daerah

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Kab. Bone memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

Gambar 1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kab. Bone





Kelompok jabatan fungsional yang memegang peran penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama Inspektorat Daerah Kab. Bone, terdiri dari :

- Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (JF-P2UPD)
- Jabatan Fungsional Auditor (JF-A)
- Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian (JF-AK)

Susunan kepegawaian dan jumlah personil di Inspektorat Daerah Kab. Bone, sebagai berikut :

Tabel 1
SDM Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018

No.	Pendidikan	Jumlah	No.	Gol.	Jumlah	No.	Jabatan	Jumlah
1.	SD	-	1.	I	-	1.	Struktural	5 dari 9
2.	SMP	-	2.	II	4		- Eselon II = 1 orang / 1 Jab.	
3.	SMA	2	3.	III	33		- Eselon III = 2 orang / 5 Jab.	
4.	Diploma 1	-	4.	IV	16		- Eselon IV = 2 orang / 3 Jab.	
5.	Diploma 2	-				2.	Fungsional	38
6.	Sarmuda/D3	-					- Auditor = 29 orang	
7.	Strata 1	18					- P2UPD = 7 orang	
8.	Strata 2	33					- A. Kepegawaian = 2 orang	
						3.	Staf	10
Jumlah		53	Jumlah		53	Jumlah		53

1.4 ISU-ISU STRATEGIS (STRATEGIC ISSUED) ORGANISASI

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kab. Bone merupakan sasaran utama pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan tupoksi organisasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk mendukung penuh komitmen pemerintah agar terwujud penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN serta berwibawa sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan UU No. 28 Tahun 1999, serta Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;



- b. Tuntutan masyarakat yang semakin kritis akan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan;
- c. Tuntutan profesionalisme akan kompetensi dan etika aparat pengawasan dalam pelaksanaan tupoksi Inspektorat Daerah Kab. Bone sebagai Perangkat Daerah yang menjadi panutan bagi OPD lainnya;
- d. Tuntutan akan peningkatan kapabilitas Inspektorat Daerah Kab. Bone sebagai APIP (saat ini masih berada pada Level 2 – *Infrastructure*) untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi (minimal Level 3 – *Integrated*) sesuai dengan Visi Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 yang menghendaki terwujudnya pemerintahan berkelas dunia melalui reformasi birokrasi pada area pengawasan;
- e. Komitmen dan konsistensi jajaran pimpinan pada OPD lingkup Kabupaten Bone yang masih rendah untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan akuntabilitas kinerja organisasi dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga penilaian atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Bone belum mencapai hasil optimal yang membanggakan;
- f. Kompleksitas aspek pengawasan yang terus berkembang dengan beban kerja yang tinggi berdasarkan jumlah objek pemeriksaan dan luasnya wilayah yang menjadi lingkup pengawasan, bila dibandingkan dengan kuantitas & kualitas aparat pengawasan, ketersediaan anggaran yang nilainya masih berkisar 0,3% dari total anggaran belanja (APBD) Pemerintah Kab. Bone, beserta sarana dan prasarana yang dimiliki.

Sebagai informasi terkait dengan hal ini, Inspektorat Daerah Kab. Bone melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada seluruh OPD dan Unit Kerja di Lingkup Pemerintahan Kab. Bone yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Satpol PP, 18 Lembaga Teknis Daerah (7 Badan, 1 BLUD-RSUD), 28 Dinas + UPTD Kecamatan, 27 Kecamatan, 328 Desa & 44 Kelurahan, serta ratusan Sekolah (SLTP & SD), dengan nilai total anggaran belanja APBD sekitar 2 triliun rupiah dalam 2 tahun terakhir (Rp. 2.335.930.580.063,- untuk Tahun 2017 dan Rp. 2.353.404.828.655,- untuk Tahun 2018).



Dengan melihat tantangan dan permasalahan yang dihadapi, dan juga hasil analisis pencapaian kinerja setiap tahunnya, maka dapat diketahui isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, yaitu sebagai berikut :

1. Profesionalisme dalam hal kompetensi dan etika Sumber Daya Aparatur Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone harus di dikembangkan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan juga dinamika pemerintahan daerah Kab. Bone, dalam merespon perubahan peraturan-perundang-undangan dan juga tuntutan masyarakat yang semakin kritis akan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan;
2. Peran Inspektorat Kabupaten sebagai Penjamin Mutu/Kualitas dan Fungsi Konsultatif (*quality assurance and partner consulting*) bagi OPD dan Pemerintah Desa, harus ditingkatkan dalam Pembinaan dan Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Desa, guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan daerah.
3. Tata Kelola APIP terkait Manajemen Sistem Pengawasan Internal dalam pengembangan kapabilitas Inspektorat Daerah Kab. Bone, khususnya pengelolaan kegiatan pengawasan, termasuk inventarisasi data temuan hasil pengawasan beserta tindak lanjutnya, harus ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi informasi disertai dengan Standar dan Prosedur yang memadai, untuk peningkatan kualitas dan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone.
4. Proses Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK dan APIP harus ditingkatkan secara intensif guna mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kab. Bone, melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi yang bersinergi dengan Tim Tindak Lanjut Kabupaten dan juga Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kab. Bone.
5. Penanganan terhadap pengaduan masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui pengembangan prosedur dan fasilitas yang memadai dalam kegiatan pelaksanaannya.



6. Peningkatan dukungan anggaran dan sarana prasarana aparatur pengawasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, masih sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Kab. Bone, mengingat anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kab. Bone nilainya masih berkisar 0,3%, yang belum memadai jika dibandingkan perkembangan kompleksitas beban kerja dan wilayah pengawasan. Hal ini dilakukan melalui perencanaan pengawasan berbasis resiko dan penganggaran dengan prinsip *money follow program*, untuk efektivitas, efisiensi dan ekonomisnya pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone.

1.5 INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP

Inovasi menjadi kunci dalam implementasi reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, dan Inspektorat Daerah Kab. Bone terus berupaya untuk mengembangkan inovasi terkait dengan pengelolaan kinerja pengawasan. Salah satu upaya pengembangan inovasi yang telah dilakukan adalah pemanfaatan teknologi aplikasi Sistem Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP) Pemda yang diciptakan oleh BPKP-RI selaku mitra kerja pengawasan internal dalam pengelolaan data hasil pengawasan dan tindak lanjutnya. Namun kedepannya, inovasi dalam bentuk adaptasi dan modifikasi terkait aplikasi ini masih diperlukan penyesuaian dan pengembangan sesuai dinamika pelaksanaan tugas pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone yang semakin kompleks dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2013-2018. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program perangkat daerah selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sinkronisasi dokumen perencanaan ini diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi Pembangunan oleh Bupati Bone terpilih sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Kab. Bone Periode Tahun 2013-2018, yaitu:

MASYARAKAT BONE YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA

Sejalan dengan Visi Bupati Bone tersebut di atas dan mengacu pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone, maka di dalam Renstra Tahun 2013-2018 ditetapkan Visi dan Misi serta Tujuan Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Visi Dan Misi

Visi Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2013-2018, yaitu :

**Menjadi Lembaga Pengawasan Yang Handal Dan Responsif
Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Dalam Melayani Masyarakat**

Dengan Misi, yaitu sebagai berikut :

- 1. Mendorong Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah**
- 2. Mendorong Peran Serta Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**
- 3. Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan dan Kapabilitas Tata Kelola Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**



Tujuan Dan Indikator Kinerja

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam periode tahun 2013-2018, yaitu sebagai berikut :

- Misi 1 : *Mendorong Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah*

Tujuan: *Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah*

- Misi 2 : *Mendorong Peran Serta Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

Tujuan: *Meningkatkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

- Misi 3 : *Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan dan Kapabilitas Tata Kelola Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

Tujuan: *Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan Dan Kapabilitas Tata Kelola Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK-RI dan APIP	%	65	90
Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan masyarakat	%	80	100
Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pengawasan dan kapabilitas tata kelola pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase aparat pengawas inspektorat daerah yang bersertifikat	%	50	100
	Jumlah paket standar operasional prosedur (SOP) / pedoman pelaksanaan kebijakan pengawasan	Paket	1	5



Sasaran Dan Indikator Kinerja

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam periode tahun 2013-2018, yaitu sebagai berikut :

- Tujuan 1 : *Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah*

Sasaran : *Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berdasarkan Hasil Audit BPK-RI*

- Tujuan 2 : *Meningkatkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

Sasaran : *Meningkatnya Kinerja Tindak Lanjut Atas Hasil Temuan Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Dan Eksternal*

- Tujuan 3 : *Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan Dan Kapabilitas Tata Kelola Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

Sasaran : 1. *Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawas Inspektorat Daerah Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

2. *Terciptanya Sistem Dan Prosedur Standar Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing sasaran strategis diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berdasarkan Hasil Audit BPK-RI	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
Meningkatnya Kinerja Tindak Lanjut Atas Hasil Temuan Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Dan Eksternal	Persentase penyelesaian rata-rata tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK-RI dan APIP	%	65	90
Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan masyarakat	%	80	100

Tabel bersambung ke hal. berikutnya...



Lanjutan dari tabel pada hal. sebelumnya...

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawas Inspektorat Daerah Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang bersertifikat	%	50	100
Terciptanya Sistem Dan Prosedur Standar Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket standar operasional prosedur (SOP) / pedoman pelaksanaan kebijakan pengawasan	Paket	1	5

Program Strategis Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Adapun program-program strategis untuk mendukung masing-masing pencapaian target sasaran kinerja pada tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Program Strategis Untuk Pencapaian Sasaran Inspektorat Daerah Kab. Bone

SASARAN	PROGRAM STRATEGIS
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berdasarkan Hasil Audit BPK-RI	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
Meningkatnya Kinerja Tindak Lanjut Atas Hasil Temuan Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Dan Eksternal	
Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawas Inspektorat Daerah Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
Terciptanya Sistem Dan Prosedur Standar Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Penataan & Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan



2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan/sasaran dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Inspektorat Daerah Kab. Bone telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kab. Bone

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berdasarkan Hasil Audit BPK-RI	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini	<p><u>Penjelasan Target :</u> Ada Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dengan Penurunan Jumlah Temuan secara berkelanjutan hingga tercapai opini WTP dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI</p> <p><u>Sumber Data :</u> Laporan Hasil Audit (LHA) BPK-RI terhadap LKPD Kab. Bone Tahun 2013-2018</p>
Meningkatnya Kinerja Tindak Lanjut Atas Hasil Temuan Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Dan Eksternal	Persentase rata-rata penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK-RI dan APIP	%	<p><u>Formulasi Penghitungan :</u> Perbandingan antara Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan dengan Jumlah Hasil Temuan Pemeriksaan dikali 100 % (selanjutnya dihitung secara rata-rata hasil % tindak lanjut temuan dari setiap instansi pemeriksa)</p> <p><u>Sumber Data :</u> Data Kompilasi Temuan Pemeriksaan BPK-RI & APIP beserta Tindak Lanjut Penyelesaiannya pada Tahun 2013-2018</p>
Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan masyarakat	%	<p><u>Formulasi Penghitungan :</u> Perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Penanganan/Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dengan Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang diterima dikali 100 %</p> <p><u>Sumber Data :</u> Data Laporan Realisasi Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat yang diterima pada Tahun 2013-2018</p>

Tabel bersambung ke hal. berikutnya...



Lanjutan dari tabel pada hal. sebelumnya...

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN / SUMBER DATA
Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawas Inspektorat Daerah Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang bersertifikat	%	<p><u>Formulasi Penghitungan :</u> Perbandingan antara Jumlah Aparat Pengawasan yang Bersertifikat dengan Jumlah Total Aparat Pengawasan Inspektorat Kab. Bone dikali 100 %</p> <p><u>Sumber Data :</u> Data Laporan Realisasi Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat pada Tahun 2013-2018</p>
Terciptanya Sistem Dan Prosedur Standar Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket standar operasional prosedur (SOP) / pedoman pelaksanaan kebijakan pengawasan	Paket	<p><u>Sumber Data :</u> Data Dokumen SOP/Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone yang tersusun Tahun 2013-2018</p>

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi.. Perjanjian Kinerja ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan dan bahan evaluasi akuntabilitas pencapaian kinerja tahunan oleh Bupati Bone terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam rangka pencapaian Visi Dan Misi Pemerintah Kab. Bone.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran dalam satu tahun anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD Kab. Bone dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018, dan APBD Tahun Anggaran 2018.

Sebagai wujud komitmen Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pencapaian target kinerja tahunan yang telah tercantum dalam Renja/RKT Tahun 2018, maka telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani bersama oleh Inspektur Daerah dengan Bapak Bupati Bone (tersaji pada *Lampiran 1*).



Ringkasan atau Ikhtisar Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018, tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Ikhtisar Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2018
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berdasarkan Hasil Audit BPK-RI	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD T.A. 2017)	Opini	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
Meningkatnya Kinerja Tindak Lanjut Atas Hasil Temuan Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Dan Eksternal	Persentase rata-rata penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK-RI dan APIP (Hingga Tahun 2018)	%	90
Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan masyarakat	%	100
Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawas Inspektorat Daerah Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang bersertifikat (Hingga Tahun 2018)	%	80
Terciptanya Sistem Dan Prosedur Standar Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket standar operasional prosedur (SOP) / pedoman pelaksanaan kebijakan pengawasan (Hingga Tahun 2018)	Paket	5



2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Inspektorat Daerah Kab. Bone pada T.A. 2018, maka jumlah pendanaan yang dianggarkan untuk mendukung pencapaian target capaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 7.668.991.531,-. Nilai anggaran ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kab. Bone T.A. 2018 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.6
Anggaran Belanja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018

BELANJA	PAGU ANGGARAN SEBELUM & SETELAH PERUBAHAN	
	DPA No. 32 Tahun 2017 Tgl. 28 Desember 2017	DPPA No. 05 Tahun 2018 Tgl. 11 Oktober 2018
BELANJA TIDAK LANGSUNG (Gaji & Tunjangan Pegawai)	Rp. 5.096.913.900,-	Rp. 4.418.991.531,-
BELANJA LANGSUNG	Rp. 2.500.000.000,-	Rp. 3.250.000.000,-
- Belanja Pegawai	Rp. 0,-	Rp. 0,-
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.287.700.000,-	Rp. 2.786.271.500,-
- Belanja Modal	Rp. 212.300.000,-	Rp. 463.728.500,-
TOTAL ANGGARAN	Rp. 7.596.913.900,-	Rp. 7.668.991.531,-

Anggaran belanja langsung senilai Rp. 3.250.000.000,- (setelah perubahan) untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018, terdiri dari 8 Program dan 22 Kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dengan pengalokasian terhadap pencapaian sasaran, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Alokasi Anggaran Per Sasaran Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	%
1. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berdasarkan Hasil Audit BPK-RI	Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Rp. 1.828.830.500,-	56,3 %
2. Meningkatkan Kinerja Tindak Lanjut Atas Hasil Temuan Pengawasan Aparat Pengawasan Internal & Eksternal	Persentase rata-rata penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK-RI dan APIP	90	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 1.645.935.500,- Rp. 6.800.000,- Rp. 176.095.000,- 	

Tabel bersambung ke hal. berikutnya...



Lanjutan dari tabel pada hal. sebelumnya...

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	%
3. Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan masyarakat	100	2. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat. • Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp. 118.500.000,- • Rp. 118.500.000,-	3,65 %
4. Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawas Inspektorat Daerah Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang bersertifikat	80	3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan. • Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp. 238.000.000,- • Rp. 238.000.000,-	7,3 %
5. Terciptanya Sistem Dan Prosedur Standar Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket standar operasional prosedur (SOP) / pedoman pelaksanaan kebijakan pengawasan	5 Paket	4. Program Penataan & Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan. • Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp. 27.650.000,- • Rp. 27.650.000,-	0,85 %
Program Rutin Pendukung Program Strategis dalam Pencapaian Seluruh Sasaran ----->>>			5. Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. • Kegiatan Penilaian Mandiri Berbasis Kinerja	Rp. 14.500.000,- • Rp. 14.500.000,-	0,45 %
			6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. • Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD • Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Rp. 6.075.000,- • Rp. 3.075.000,- • Rp. 3.000.000,-	0,2 %

Tabel bersambung ke hal. berikutnya...



Lanjutan dari tabel pada hal. sebelumnya...

Lanjutan dari tabel pada hal. sebelumnya...

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	%
Program Rutin Pendukung Program Strategis dalam Pencapaian Seluruh Sasaran ----->>>			7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dnas/ Operasional • Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor • Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor • Kegiatan Pengadaan Mebeleur • Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor • Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional • Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 	<u>Rp. 554.655.000,-</u> <ul style="list-style-type: none"> • Rp. 313.178.500,- • Rp. 37.000.000,- • Rp. 95.800.000,- • Rp. 17.750.000,- • Rp. 15.926.500,- • Rp. 60.000.000,- • Rp. 15.000.000,- 	17,1 %
			8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik • Kegiatan Penyediaan Jasa administrasi Keuangan • Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan • Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah • Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 	<u>Rp. 461.789.500,-</u> <ul style="list-style-type: none"> • Rp. 19.500.000,- • Rp. 55.896.000,- • Rp. 3.562.500,- • Rp. 46.225.000,- • Rp. 230.000.000,- • Rp. 106.606.000,- 	14,2 %
TOTAL				Rp. 3.250.000.000,-	100 %



Tabel tersebut diatas menjelaskan program dan kegiatan beserta anggarannya yang menjadi prioritas Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam mencapai target indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja (Renja/RKT) Tahun 2018 dan Rencana Strategis Tahun 2013-2018.

Dari tabel tersebut, jumlah anggaran untuk seluruh program dan kegiatan sebesar Rp. 3.250.000.000,-. Dari total 8 Program, 4 diantaranya adalah program prioritas yang secara strategis sangat menentukan pencapaian target indikator kinerja Kelima Sasaran Inspektorat Daerah Kab. Bone, dan 4 Program lainnya merupakan program rutin yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ada. Persentase terbesar anggaran untuk mendukung Sasaran ke-1 dan ke-2 dengan besaran 56,3% dari total anggaran belanja langsung. Pencapaian target indikator kinerja dari kedua sasaran ini dilaksanakan dengan satu Program Utama yaitu *Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH*. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah Sasaran ke-5 sebesar 0,85% dari total anggaran belanja langsung yang dilaksanakan dengan *Program Penataan & Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan*. Namun secara keseluruhan, kedelapan program beserta kegiatan tersebut diatas, merupakan satu kesatuan yang saling mendukung satu sama lainnya dalam proses pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 diukur berdasarkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah pada tahun 2018. Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan hasil pengukuran kinerja terhadap target capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	>100 %	Baik Sekali
2	76 % ≤ 100%	Baik
3	66 % ≤ 75 %	Cukup
4	51 % ≤ 65 %	Kurang
5	≤ 50%	Sangat Kurang

Berdasarkan tabel tersebut di atas, setiap indikator kinerja dari sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dapat dinilai kriteria realisasi kinerjanya berdasarkan persentase capaian kinerja yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan.



3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Tahun Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018 pada intinya mencakup data realisasi dan evaluasi hasil capaian kinerja organisasi pada tahun 2018. Hal ini diperoleh melalui analisis dan perbandingan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tahun 2018. Tahapan evaluasi capaian kinerja dari tiap sasaran strategis, meliputi :

1. Perbandingan antara target dengan realisasi capaian kinerja tahun 2018;
2. Perbandingan antara realisasi capaian kinerja tahun 2018 dengan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya;
3. Perbandingan antara realisasi capaian kinerja hingga tahun 2018 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) tahun 2013-2018;
4. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2018 dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian target kinerja;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Hasil evaluasi capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja dari setiap sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone tahun 2018, selanjutnya akan diuraikan berdasarkan ketujuh tahapan evaluasi capaian kinerja tersebut.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018

Secara umum, *realisasi capaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone telah memenuhi target kinerja dengan kategori Baik ($76 \% \leq 100\%$), berdasarkan indikator sasaran yang terdiri dari 5 (lima) sasaran dengan 1 (satu) indikatornya masing-masing sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018.* Realisasi capaian indikator kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone dibandingkan dengan target dari setiap sasaran strategis, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN (%)	KRITERIA KINERJA
1.	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berdasarkan Hasil Audit BPK-RI	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD T.A. 2017)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	100%	Baik
2.	Meningkatnya Kinerja Tindak Lanjut Atas Hasil Temuan Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Dan Eksternal	Persentase rata-rata penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK-RI dan APIP (Hingga Tahun 2018)	90%	83,30%	92,6%	Baik
3.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan masyarakat	100%	100%	100%	Baik
4.	Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawas Inspektorat Daerah Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang bersertifikat (Hingga Tahun 2018)	80%	81,13%	101%	Baik
5.	Terciptanya Sistem Dan Prosedur Standar Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket standar operasional prosedur (SOP) / pedoman pelaksanaan kebijakan pengawasan (Hingga Tahun 2018)	5 Paket	5 Paket	100%	Baik
Rata-Rata Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Sasaran					98,7%	Baik

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kab. Bone di Tahun 2018 terhadap target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Sasaran Strategis RPJMD Tahun 2013-2018, dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini:



Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN (%)
1.	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD T.A. 2017)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	100% (Baik)
2.	Persentase rata-rata penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK-RI dan APIP (Hingga Tahun 2018)	90%	83,30% - BPK-RI = 80,11% - BPKP = 68,03% - ItProv = 92,16% - ItKab = 92,91%	92,5% (Baik)
3.	Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan masyarakat	100%	100% (6 Tertangani dari 6 Pengaduan yang diterima sesuai kewenangan)	100% (Baik)
4.	Persentase Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang bersertifikat (Hingga Tahun 2018)	80%	81,13% (43 dari Total 53 Aparat Pengawasan)	101% (Baik)
5.	Jumlah paket standar operasional prosedur (SOP) / pedoman pelaksanaan kebijakan pengawasan (Hingga Tahun 2018)	5 Paket	5 Paket	100%

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tahun 2018 terhadap Target Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis RPJMD Tahun 2013-2018

SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD 2013-2018	REALISASI 2018	Capaian 2018 terhadap Target RPJMD
1. Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan	Opini BPK-RI Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (LKPD T.A. 2017)	100 % (Baik)
	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tahun	125 LHP	527 LHP	422 % (Baik Sekali)
	Rasio (Persentase) Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK-RI sesuai Rekomendasi	90 %	80,11 % (576 dari 719 Rekomendasi Temuan BPK Tahun 2006-2018)	89 % (Baik)
	Jumlah Paket Prosedur dan Kebijakan Pengawasan	5 Paket SOP	5 Paket SOP	100 % (Baik)
2. Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD Dalam Menjalankan Fungsinya	Jumlah Tenaga aparatur fungsional pemeriksa yang bersertifikat	40 Orang	43 Orang	107 % (Baik Sekali)
3. Terjalinnnya Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan terjalinnnya kerjasama antar pemerintah daerah	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani secara maksimal	100 %	100 %	100 % (Baik)



PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Dari hasil pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun 2018 sesuai dengan pernyataan kinerja yang telah diperjanjikan, maka untuk mengevaluasi capaian kinerjanya, dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator kinerja yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Realisasi kinerja dari setiap indikator sasaran selanjutnya menjadi bahan evaluasi capaian kinerja organisasi. Evaluasi capaian kinerja dilakukan berdasarkan tujuh tahapan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yang secara umum meliputi perbandingan dan analisis terkait realisasi kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran strategis pada Tahun 2018.

Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama (IKU), RENSTRA dan RPJMD Tahun 2013-2018, maka Tingkat Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018 dapat dijelaskan melalui uraian perbandingan dan analisis realisasi kinerja dari tiap sasaran strategis berikut ini:

- SASARAN STRATEGIS PERTAMA :

Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berdasarkan Hasil Audit BPK-RI

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja dari Sasaran 1

*Tabel 3.5.1
Capaian Kinerja Sasaran 1- Tahun 2018*

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA
1.	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD T.A. 2017)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	100 % (Baik)

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya dari Sasaran 1

*Tabel 3.6.1
Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran 1 - Tahun 2014-2018*

INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA				
	2014	2015	2016	2017	2018
Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WDP (Hasil Audit LKPD 2013)	WDP (Hasil Audit LKPD 2014)	WTP (Hasil Audit LKPD 2015)	WTP (Hasil Audit LKPD 2016)	WTP (Hasil Audit LKPD 2017)



3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2013-2018 dari Sasaran 1

Tabel 3.7.1

Capaian Kinerja Sasaran 1-Tahun 2018 Terhadap Target Akhir Renstra 2013-2018

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA
1.	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (LKPD T.A. 2017)	100 % (Baik)

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Standar Nasional dari Sasaran 1

Capaian kinerja terkait dengan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini sudah sejalan dengan target Pemerintah Pusat yang menargetkan peningkatan kualitas LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan standar nasional harus memperoleh Opini WTP berdasarkan hasil audit BPK-RI.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan dari Sasaran 1

Sebagai catatan atas target capaian kinerja sasaran ini yaitu, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh harus disertai dengan pengurangan nilai temuan dan rekomendasi hasil audit BPK-RI dibandingkan hasil audit LKPD tahun sebelumnya.

Dari tabel 3.5.1 di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk sasaran pertama ini telah mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dimana Opini BPK-RI sebagai hasil audit yang dilakukan pada tahun 2018 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Bone T.A. 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *tingkat capaian kinerjanya sebesar 100% dengan kategori Baik (76 ~ 100 %)*.

Bila dibandingkan dengan hasil audit BPK-RI terhadap LKPD Pemerintah Kab. Bone pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana yang tersaji pada tabel 3.6.1, menunjukkan bahwa Opini WTP yang telah diperoleh sejak tahun 2016, telah dapat dipertahankan hingga tahun 2018.

Perkembangan capaian kinerja untuk sasaran strategis ini selama tahun 2014-2018, juga telah memenuhi pencapaian target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD Kab. Bone tahun 2013-2018, yaitu



Opini WTP seperti tersaji pada tabel 3.4 dan tabel 3.7.1, dimana capaian ini merupakan capaian tertinggi yang diraih sejak tahun 2016 dan dapat dipertahankan tiga tahun berturut-turut dalam lima tahun terakhir terkait pencapaian kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kab. Bone.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari :

1. Komitmen dan kerja sama dari seluruh unsur pengelola keuangan dan aset daerah dalam lingkup Pemerintah Kab. Bone untuk mempertahankan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
2. Pengendalian dan pengawasan yang intensif oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat Daerah Kab. Bone khususnya dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK-RI pada tahun sebelumnya.

Namun demikian, terkait dengan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Bone terdapat penurunan berdasarkan perbandingan jumlah temuan dan rekomendasi beserta nilai rupiah dari hasil audit BPK-RI atas LKPD T.A. 2017 terhadap LKPD T.A. 2016, sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Perbandingan Jumlah Temuan dan Rekomendasi BPK-RI atas
Pemeriksaan/Audit terhadap LKPD Kab. Bone Tahun 2017 dan Tahun 2016

TAHUN DAN OBJEK PEMERIKSAAN BPK-RI	JUMLAH TEMUAN	REKOMENDASI	
		JUMLAH	NILAI (RP)
Tahun Pemeriksaan 2018 LKPD T. A. 2017	11	36	298.123.814,30
Tahun Pemeriksaan 2017 LKPD T. A. 2016	10	23	31.174.700,00
JUMLAH TEMUAN/REKOMENDASI BPK-RI DARI LKPD TAHUN 2016 KE TAHUN 2017	+1	+13	+ 266.949.114,30

Sumber Data : Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP-BPK Per Desember 2018

Beberapa catatan temuan dan rekomendasi BPK-RI yang perlu diperhatikan kedepannya agar tidak berulang sebagai temuan, yang secara garis besar meliputi 2 aspek pemeriksaan, yaitu :

- a. Sistem Pengendalian Internal :
 1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 2. Bendahara Pengeluaran pada beberapa OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone menduduki jabatan rangkap;



3. Kesalahan Penganggaran Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat pada kelompok Belanja Modal pada beberapa OPD yang seharusnya dianggarkan pada kelompok Belanja Barang dan Jasa ;
 4. Pemerintah Kabupaten Bone Belum sepenuhnya melakukan inventarisasi dan validasi Piutang PBB-P2 Hasil Pengalihan KPP Pratama Bone secara memadai;
 5. Penatausahaan Utang Belanja yang tidak tertib;
 6. Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap yang belum dilaksanakan secara memadai;
- b. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan :
1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan kepada pegawai yang belum sepenuhnya dikelola secara cermat;
 2. Adanya Kelebihan Pembayaran atas Tunjangan Komunikasi Intensif, Dana Operasional dan Tunjangan Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone;
 3. Adanya Belanja Honorarium dan Jasa/Upah Kerja pada beberapa OPD yang tidak sesuai ketentuan;
 4. Realisasi Belanja Modal yang tidak sesuai dengan ketentuan;
 5. Adanya Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa oleh beberapa Kepala Desa yang belum disampaikan kepada Bupati Bone;

Secara umum, permasalahan tersebut terjadi karena masih cukup lemahnya pengendalian internal dan tindak lanjut terkait hal-hal tersebut di atas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah termasuk pengelolaan APBDesa, yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporannya.

Kondisi ini menjadi fokus perhatian bagi Inspektorat Daerah Kab. Bone kedepannya untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan berbasis resiko yang lebih intensif dan koordinasi yang berkelanjutan dengan seluruh OPD dan Pemerintah Desa dalam Lingkup Pemerintahan Kab. Bone, dalam bentuk penjaminan mutu (audit internal) dan jasa konsultatif (pendampingan/asistensi), dengan tujuan untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) maupun dalam hal peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap hal-hal yang mempengaruhi kualitas penyajian LKPD Kab. Bone.



6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Tabel 3.8.1
Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 1

N O	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala	Rp. 1.645.935.500,-	Rp. 1.516.768.800,-	92,15%

Program strategis yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja indikator sasaran ini adalah *Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH* melalui *Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala*. Tujuan dari program dan kegiatan ini adalah mendorong terciptanya sistem pengendalian internal yang memadai yang disertai peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone. Hal ini dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan internal dalam bentuk penjaminan kualitas/quality assurance (audit, reviu, evaluasi, pemantauan) dan jasa konsultasi (asistensi dan pendampingan), dengan berpedoman pada dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018, berupa Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan lainnya dengan output berupa Laporan Hasil Pengawasan (LHP), dengan rincian pada tahun 2014-2018, sebagai berikut :

Tabel 3.11
Jumlah LHP berdasarkan Jenis Pemeriksaan Tahun 2014 s.d. 2018

JENIS PEMERIKSAAN	JUMLAH LHP				
	T. A. 2014	T. A. 2015	T. A. 2016	T. A. 2017	T. A. 2018
Reviu & Evaluasi	1 LHP	2 LHP	4 LHP	10 LHP	90 LHP
Pemeriksaan Komprehensif (Audit Operasional)	81 LHP	83 LHP	78 LHP	75 LHP	400 LHP
Monitoring /Pemantauan	8 LHP	15 LHP	13 LHP	13 LHP	8 LHP
Kasus Kepegawaian/ Perceraian PNS	19 LHP	23 LHP	36 LHP	16 LHP	23 LHP
Kasus Pengaduan Masyarakat	4 LHP	18 LHP	3 LHP	9 LHP	6 LHP
Pemeriksaan Khusus	-	-	-	38 LHP	1 LHP
Pengawasan Lainnya (Asistensi)	-	-	-	-	1 LHP
JUMLAH TOTAL	113 LHP	141 LHP	134 LHP	161 LHP	529 LHP

Sumber Data : Dokumen Rekapitulasi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2014 s.d. Tahun 2018.



Dari tabel 3.11 tersebut di atas, terlihat bahwa ada peningkatan yang cukup tinggi terkait dengan jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun 2018, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang tersusun berdasarkan penugasan yang ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018 mencapai 529 LHP.

Peningkatan terbesar adalah jumlah LHP atas pemeriksaan komprehensif (audit operasional) sebanyak 400 LHP yang dilaksanakan pada 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 27 Kecamatan, dan 328 Pemerintah Desa sepanjang tahun 2018. Hal ini dipengaruhi oleh penyusunan LHP atas penugasan pemeriksaan komprehensif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, yang dilakukan berbeda dari tahun sebelumnya. Jika pada tahun sebelumnya, LHP atas pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa disusun berdasarkan jumlah penugasan yang beberapa desa tergabung hasil pemeriksaannya dalam satu LHP, maka pada tahun 2018, LHP disusun berdasarkan jumlah pemerintahan desa yang menjadi objek pengawasan.

Terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran ini, tidak terdapat permasalahan dari segi penyerapan anggaran, namun dari segi pencapaian output kinerja berupa Laporan Hasil Pengawasan adalah waktu penyelesaian dan kualitas laporan hasil pengawasan yang kedepannya perlu diperhatikan dan ditingkatkan melalui penerapan kendali mutu pengawasan sesuai dengan pedoman kendali mutu yang telah ditetapkan di dalam setiap penugasan tim pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone.

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran 1

Tabel 3.9.1
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja Sasaran 1

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI (3-4)
1	2	3	4	5
1.	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD T.A. 2017)	100 % (WTP)	92,15 %	7,85 %

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran ini cukup baik dengan nilai efisiensi sebesar 7,85%, dimana realisasi penggunaan anggarannya (sebesar 92,15%) lebih kecil nilainya dibandingkan dengan persentase realisasi capaian kerjanya (sebesar 100%).



- **SASARAN STRATEGIS KE-DUA :**

Meningkatnya Kinerja Tindak Lanjut Atas Hasil Temuan Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Dan Eksternal

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja dari Sasaran 2

Tabel 3.5.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA
2.	Persentase rata-rata penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK-RI dan APIP (Hingga Tahun 2018)	90 %	83,30 % - BPK-RI = 80,11% - BPKP = 68,03% - ItProv = 92,16% - ItKab = 92,91%	92,56 % (Baik)

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya dari Sasaran 2

Tabel 3.6.2
Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran 2 - Tahun 2014-2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA				
	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase rata-rata penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK-RI dan APIP (Hingga Tahun 2018)	40,13 % (Target 75 %)	40,84 % (Target 85 %)	66,46 % (Target 90 %)	74,27 % (Target 90 %)	83,30 % (Target 90 %)

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2013-2018 dari Sasaran 2

Tabel 3.7.2
Capaian Kinerja Sasaran 2-Tahun 2018 Terhadap Target Akhir Renstra 2013-2018

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA
2.	Persentase rata-rata penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK-RI dan APIP (Hingga Tahun 2018)	90 %	83,30 %	92,56 % (Baik)

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Standar Nasional dari Sasaran 2

Tidak ada standar nasional yang harus dipenuhi untuk pencapaian kinerja terkait dengan Sasaran 2.



5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan dari Sasaran 2

Sebagai catatan atas target capaian kinerja sasaran ini, yaitu target indikator kinerja setiap tahunnya ditetapkan meningkat secara bertahap hingga dapat mencapai target jangka menengah sesuai dengan yang diharapkan, khususnya persentase rasio penyelesaian tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI yang merupakan salah satu indikator kinerja utama sasaran RPJMD Tahun 2013-2018.

Dari tabel 3.5.2 di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk sasaran ini belum sepenuhnya optimal dalam pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dimana persentase rata-rata rasio penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan hanya mencapai 83,30% dari target 90% pada Tahun 2018, atau **tingkat capaian kinerjanya sebesar 92,55%, dengan kategori Baik (76 ~ 100 %)**.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya yang tersaji pada tabel 3.6.2, terlihat tren peningkatan capaian kinerja yang signifikan yang terus berlanjut hingga tahun 2018, dimana data terakhir peningkatan rasio rata-rata penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dari 74,27% pada tahun 2017 menjadi 92,55% pada tahun 2018.

Lebih terinci, realisasi penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan hingga tahun 2018 sesuai rekomendasi dari masing-masing instansi pengawasan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12

Realisasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Instansi Pengawasan hingga Tahun 2018

NO.	INSTANSI PENGAWASAN	REKOMENDASI ATAS TEMUAN		TELAH DITINDAK-LANJUTI		RASIO
		Jumlah	Nilai Temuan (Rp)	Jumlah	Nilai Temuan (Rp)	%
1.	BPK-RI (Masa Pemeriksaan Tahun 2006-2018)	719	226.969.115.394	576	225.152.643.003	80,11
2.	BPKP (Masa Pemeriksaan Tahun 2009-2018)	122	1.033.444.782	83	761.245.444	68,03
3.	Inspektorat Daerah Prov. Sul-Sel. (Masa Pemeriksaan Tahun 2006-2018)	753	7.110.716.139	694	7.110.716.139	92,16
4.	Inspektorat Daerah Kab. Bone (Masa Pemeriksaan Tahun 2013-2018)	2382	3.050.703.820	2213	694.763.355	92,91
Persentase Rata-rata Rasio Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan dari 4 Instansi Pengawasan Eksternal dan Internal hingga tahun 2018						83,30

Sumber Data : Diolah dari Data Rekapitulasi Pemuktakhiran Data TLHP dari setiap Instansi Pengawasan s.d. Tahun 2018



Dari tabel 3.7.2, dan tabel 3.12 di atas, terlihat bahwa pencapaian kinerja tahun 2018 untuk sasaran ini belum mencapai target jangka menengah senilai 90% sesuai dengan Renstra Tahun 2013-2018.

Demikian pula terhadap target kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 (tabel 3.4), rasio penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan BPK-RI hingga tahun 2018 baru mencapai angka 80,11% dari target 90%, meskipun terdapat tren peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya.

Permasalahan yang terjadi adalah masih belum optimalnya penyelesaian proses tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan BPKP yang persentase tindak lanjutnya masih dibawah 90%, sementara untuk tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan Inspektorat Kabupaten Bone telah melebihi target 90% yang telah ditetapkan.

Hal ini terutama disebabkan oleh masih lemahnya komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK-RI maupun APIP internal dan eksternal.

Target ini menjadi catatan khusus yang ke depannya harus terus di prioritaskan langkah-langkah peningkatan capaian target kinerjanya melalui optimalisasi kinerja Tim Tindak Lanjut Kabupaten Bone disertai koordinasi yang lebih intensif dengan BPK-RI dan APIP eksternal lainnya, khususnya dalam proses pemutakhiran data temuan hasil pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut temuan administrasi dan keuangan yang termasuk dalam Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) atas Kerugian Negara/Daerah.

Salah satu langkah penting yang perlu dioptimalkan terkait dengan hal ini adalah pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala, agar ada peningkatan capaian kinerja yang signifikan terhadap target indikator kinerja sasaran strategis ketiga ini.

Selain itu, tugas pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan dan aset daerah perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kab. Bone dari tahun sebelumnya sebagai langkah preventif untuk dapat meminimalisir jumlah temuan hasil pemeriksaan baik oleh BPK-RI maupun APIP eksternal lainnya.



8. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran 2

Tabel 3.8.2
Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 2

N O	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2.	Persentase rata-rata penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK-RI dan APIP (Hingga Tahun 2018)	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Rp. 6.800.000,-	Rp. 1.800.000,-	26,47%
			Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Rp. 176.095.000,-	Rp. 142.967.000,-	81,19%
Jumlah				Rp. 182.895.000,-	Rp. 144.767.000,-	79,15%

Program strategis yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja sasaran ini adalah *Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH* melalui *Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan dan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan*. Tujuan dari program pada sasaran ini adalah mendorong terciptanya sistem pengendalian internal yang memadai yang disertai peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone. Kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian output kinerja berupa inventarisasi data temuan hasil pengawasan beserta tindak lanjutnya, dilaksanakan dalam bentuk pengumpulan dan pengolahan data atas hasil temuan pengawasan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) beserta data tindak lanjutnya, dengan menggunakan aplikasi SIM-HP (Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan). Output kegiatan ini adalah Laporan Data Temuan Hasil Pengawasan dan Data Pemutakhiran Tindak Lanjutnya secara berkala (Per Triwulan).

Terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran ini, tidak terdapat permasalahan yang berarti dari segi penyerapan anggaran, namun dari segi pencapaian output kinerja, yang belum optimal adalah ketersediaan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kab. Bone sebagai sumber data utama yang terkadang tidak tepat waktu yang disebabkan oleh keterlambatan penyelesaian LHP oleh Tim pemeriksa, sehingga kedepannya, harus dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penyelesaian LHP disertai optimalisasi pengendalian mutu pengawasan melalui penguatan peran Inspektur Pembantu dan Pengendali Teknis serta Ketua Tim dalam pelaksanaan penugasan pengawasan.



6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran 2

Tabel 3.9.2

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja Sasaran 2

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI (3-4)
1	2	3	4	5
2.	Persentase rata-rata penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK-RI dan APIP	92,56 %	79,15 %	13,41%

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran ini cukup baik dengan nilai efisiensi sebesar 13,41%, dimana realisasi penggunaan anggarannya (sebesar 79,15%) lebih kecil nilainya dibandingkan dengan persentase realisasi capaian kinerjanya (sebesar 92,56%).

- SASARAN STRATEGIS KE-TIGA :

Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja dari Sasaran 3

Tabel 3.5.3

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA
3.	Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan masyarakat	100 %	100 % (6 Tertangani dari 6 Pengaduan yang diterima)	100 % (Baik)

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya dari Sasaran 3

Tabel 3.6.3

Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran 3 - Tahun 2014-2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA				
	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan masyarakat	57,14 % (4 dari 7 Pengaduan) (Target 85 %)	61,11 % (11 dari 18 Pengaduan) (Target 85 %)	60 % (3 dari 5 Pengaduan) (Target 90 %)	100 % (9 dari 9 Pengaduan) (Target 95 %)	100 % (6 dari 6 Pengaduan) (Target 100%)



3. *Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2013-2018 dari Sasaran 3*

Tabel 3.7.3

Capaian Kinerja Sasaran 3-Tahun 2018 Terhadap Target Akhir Renstra 2013-2018

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA
3.	Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan masyarakat	100 %	100 %	100 % (Baik)

4. *Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Standar Nasional dari Sasaran 3*

Tidak ada standar nasional yang harus dipenuhi untuk pencapaian kinerja terkait dengan Sasaran 3.

5. *Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan dari Sasaran 3*

Sebagai catatan atas target capaian kinerja sasaran ini, yaitu penetapan target kinerja setiap tahunnya disesuaikan dengan peningkatan anggaran kegiatan pengawasan dan ketersediaan aparat Inspektorat Daerah Kab. Bone yang kompeten dalam penanganan pengaduan masyarakat sifatnya insidentil dan relatif waktu penyelesaiannya. Selain itu, pengaduan masyarakat yang masuk harus memenuhi kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai pengaduan yang dapat ditangani sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah Kab. Bone, disamping mempertimbangkan petunjuk/arahan dari Bupati Bone.

Dari tabel 3.5.3 di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk sasaran ini belum optimal dalam pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dimana tingkat penanganan/penyelesaian terhadap laporan pengaduan masyarakat senilai 100% dari target 100% pada tahun 2018, atau **tingkat capaian kinerjanya sebesar 100%, dengan kategori Baik (76 ~ 100 %)**.

Dari 6 kasus pengaduan masyarakat yang telah diterima pada tahun 2018, semuanya telah ditangani penyelesaiannya sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah Kab. Bone. Keenam kasus tersebut secara umum terkait dengan dugaan penyalahgunaan dalam pengelolaan APBDesa oleh oknum kepala desa di wilayah Pemerintahan Kab. Bone



Bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya yang tersaji pada tabel 3.6.3, terlihat tren peningkatan capaian kinerja secara konsisten sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan hingga tahun 2018, dimana tingkat penanganan/penyelesaian terhadap laporan pengaduan masyarakat dua tahun terakhir (2017 dan 2018) telah sesuai dengan target yaitu senilai 100% (9 dari 9 Pengaduan) dari target 95% pada tahun 2017 dan target 100% (6 dari 6 Pengaduan) pada tahun 2018. Pencapaian kinerja tahun 2018 juga telah mencapai target jangka menengah sebesar 100% berdasarkan Renstra dan RPJMD Tahun 2013-2018 (tersaji pada tabel 3.4 dan tabel 3.7.3).

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini ditunjang oleh optimalnya penanganan pengaduan masyarakat yang disertai peningkatan jumlah dan kompetensi aparat pengawas Inspektorat Daerah Kab. Bone yang mampu menangani laporan pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kab. Bone, disamping pengalokasian khusus anggaran yang terkait dengan hal ini.

Namun demikian, selain adanya penanganan laporan pengaduan masyarakat, masih dilakukan beberapa pemeriksaan khusus atas permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) yang terkait dengan dugaan penyalahgunaan pengelolaan dana desa yang trennya mengalami kenaikan dalam dua tahun terakhir. Bahkan terdapat kepala desa yang telah diproses secara pidana hingga pengadilan dengan putusan bersalah. Hal ini menjadi catatan khusus yang menjadi perhatian Inspektorat Daerah Kab. Bone, sehingga kedepannya kegiatan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan APBDesa menjadi salah satu prioritas utama dalam PKPT Tahun 2019.

6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran 3

*Tabel 3.8.3
Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 3*

N O	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
3.	Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan masyarakat	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Pengaduan Masyarakat	Rp. 118.500.000,-	Rp. 110.675.210,-	93,40%



Program strategis yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja indikator sasaran ini adalah *Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat* melalui Kegiatan *Pembentukan Unit Khusus Pengaduan Masyarakat*. Tujuan dari program dan kegiatan ini adalah mengoptimalkan penanganan pengaduan masyarakat yang lebih intensif guna terciptanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone, termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa, melalui Pembentukan Tim untuk pengelolaan pengaduan masyarakat, mulai dari penerimaan, verifikasi, penanganan, hingga pelaporan hasil pelaksanaan penanganan laporan pengaduan dari masyarakat.

Terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran ini, tidak terdapat permasalahan dari segi penyerapan anggaran, namun dari segi pencapaian output kinerja, terkendala oleh keterbatasan waktu untuk penanganan setiap kasus pengaduan masyarakat dikarenakan padatnya jadwal kegiatan pengawasan internal yang jadi beban kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone, disamping intensifnya permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk pemeriksaan khusus yang terkait dengan dugaan penyalahgunaan pengelolaan APBDesa maupun APBD.

Dalam prosesnya penanganan kasus pengaduan masyarakat kedepannya perlu ditetapkan skala prioritas berbasis resiko yang diselaraskan dengan Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan yang mampu mendorong terselenggaranya pengelolaan APBDesa yang baik, transparan dan akuntabel, agar dapat meminimalisir kesalahan dan pengaduan masyarakat terkait hal ini.

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran 3

Tabel 3.9.3
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja Sasaran 3

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI (3-4)
1	2	3	4	5
3.	Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan masyarakat	100 %	93,40 %	6,6 %

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran ini cukup baik dengan nilai efisiensi sebesar 6,6%, dimana realisasi penggunaan anggarannya (sebesar 93,40%) lebih kecil nilainya dibandingkan dengan persentase realisasi capaian kinerjanya (sebesar 100%).



- **SASARAN STRATEGIS KE-EMPAT :**

Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawas Inspektorat Daerah Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja dari Sasaran 4

*Tabel 3.5.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4*

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA
4.	Persentase Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang bersertifikat (Hingga Tahun 2018)	80 % (40 Orang)	81,13 (43 dari Total 53 Aparat Pengawasan)	101 % (Baik)

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya dari Sasaran 4

*Tabel 3.6.4
Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran 4 - Tahun 2014-2018*

INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA				
	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang bersertifikat (Hingga Tahun Berkenaan)	60 % 29 Orang (dari Target 60% / 29 Orang)	65 % 33 Orang (dari Target 65% / 32 Orang)	70 % 35 Orang (dari Target 70% / 35 Orang)	76,5 % 38 Orang (dari Target 75% / 37 Orang)	81,13 % 43 Orang (dari Target 80% / 40 Orang)

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2013-2018 dari Sasaran 4

*Tabel 3.7.4
Capaian Kinerja Sasaran 4-Tahun 2018 Terhadap Target Akhir Renstra 2013-2018*

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA
4.	Persentase Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang bersertifikat	80 % (40 Orang)	81,13 % (43 Orang)	101 % (Baik)

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Standar Nasional dari Sasaran 4

Tidak ada standar nasional yang harus dipenuhi untuk pencapaian kinerja terkait dengan Sasaran 4.



5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan dari Sasaran 4

Sebagai catatan atas target capaian kinerja sasaran ini, yaitu target indikator kinerjanya hingga tahun berkenaan ditetapkan berdasarkan potensi penambahan jumlah Aparat Pengawasan yang bersertifikat (Auditor dan P2UPD) setiap tahunnya. Potensi penambahannya memperhitungkan jumlah tenaga pemeriksa Inspektorat Daerah Kab. Bone yang akan memenuhi sertifikasi diklat pembentukan jabfung melalui proses diklat pembentukan maupun melalui proses inpassing.

Jabatan Fungsional Auditor, yang terdiri dari Auditor Keuangan (disebut Auditor saja dalam pelaksanaan tugasnya) dan Auditor Kepegawaian, beserta Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) memegang peran strategis dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga kompetensinya perlu ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas serta profesionalismenya.

Dari tabel 3.5.4 di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk sasaran ini telah mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dimana jumlah Aparat Pengawasan yang bersertifikat (Auditor, Auditor Kepegawaian dan P2UPD) telah mencapai angka 43 orang atau sebesar 81,13% dari target 80% terhadap jumlah total aparat pengawasan pada Inspektorat Daerah Kab. Bone, atau **tingkat capaian kinerjanya sebesar 101%, dengan kategori Sangat Baik (>100 %).**

Pencapaian kinerja tahun 2018 untuk indikator kinerja sasaran keempat ini terus mengalami peningkatan sejak tahun 2014 (lihat tabel 3.6.4) berdasarkan peningkatan jumlah jabatan fungsional dari target yang ditetapkan. Namun, untuk jumlah Pejabat Fungsional P2UPD belum mencapai target sejak tahun 2016, dimana ada pengurangan akibat adanya P2UPD yang telah memasuki masa pensiun dan tidak ada penambahan, sehingga diperlukan rekrutmen pegawai yang dipersiapkan untuk regenerasi SDM P2UPD pada Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Terhadap target indikator kinerja utama dalam Renstra dan RPJMD Tahun 2013-2018 (tersaji pada tabel 3.4 dan tabel 3.7.4), tingkat capaian kinerja sasaran ini hingga tahun 2018 juga telah sesuai dengan target jangka menengah, yang nilainya sama dengan realisasi dan target tahun 2018 sebagai kondisi akhir yang ingin dicapai hingga tahun 2018.



Lebih terinci, data jumlah pejabat fungsional APIP (Auditor & P2PD) pada Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13

*Jumlah Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD (APIP)
Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga Tahun 2018*

JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN FUNGSIONAL				
	PENYELIA	PERTAMA	MUDA	MADYA	JUMLAH
JF-Auditor	-	3 Orang	18 Orang	8 Orang	29 Orang
JF-Auditor Kepegawaian	-	1 Orang	1 Orang	-	2 Orang
JF-P2UPD	-	-	2 Orang	5 Orang	7 Orang
Calon Auditor (bersertifikat)	-	5 Orang	-	-	5 Orang
JUMLAH TOTAL	-	9 Orang	21 Orang	13 Orang	43 Orang

Sumber Data : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) ASN Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018

Berpedoman pada Perka BPKP No. KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD di Lingkungan APIP, maka berdasarkan analisa beban kerja pengawasan yang mengacu pada Kegiatan Rutin Pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan & kegiatan Pengawasan lainnya) yang diatur dalam PKPT Inspektorat Daerah Kab. Bone dan Kebijakan Pengawasan Tahunan di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Mendagri setiap tahunnya, serta memperhitungkan wilayah kerja pengawasan yang besar jumlahnya dan lokasi yang luas, diperoleh data kebutuhan SDM Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone, sebagai berikut :

- Jumlah Total Beban Kerja Pengawasan Inspektorat Kab. Bone berdasarkan Total Hari Pemeriksaan (HP) berada pada Kategori C1 (HP >14.300-16.900)
- Jumlah Gugus Tugas (GT) yang diperlukan berdasarkan data jumlah total beban kerja pengawasan = 6 GT + 2 Pejabat Fungsional Tingkat Utama (1 GT = 1 PT + 3 KT + 9 AT)

Tabel 3.14

Kebutuhan SDM Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone

JENJANG JAB. FUNGSIONAL PENGAWASAN	PERAN DALAM TIM	KEBUTUHAN SDM	KONDISI SDM
Auditor/P2UPD Tingkat Utama	Pengendali Mutu (PM)	2 Orang	-
Auditor/P2UPD Tingkat Madya	Pengendali Teknis (PT)	6 Orang	13 Orang
Auditor/P2UPD Tingkat Muda	Ketua Tim (KT)	18 Orang	20 Orang
Auditor/P2UPD Tingkat Pertama	Anggota Tim (AT)	54 Orang	8 Orang
Auditor Kegawaian (Audiwan)	(PT/KT/AT)	5 Orang	2 orang
Jumlah SDM Pengawasan		85 Orang	43 Orang



Untuk penetapan formasi kebutuhan auditor kepegawaian sebagaimana tersaji pada tabel diatas, diatur tersendiri dengan mengacu pada Permen PAN-RB No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya, dimana dalam pasal 37 ayat 1 dan 2, disebutkan bahwa penetapan formasi Audiwan, didasarkan pada jumlah instansi dan luas wilayah yang menjadi beban tugas serta paling banyak 5 (lima) orang untuk lingkungan Kabupaten/Kota, tanpa melihat peran jabatan dalam tim.

Mengingat masih terbatasnya jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah (sekitar 51% dari total kebutuhan) dibandingkan dengan kebutuhan organisasi dalam menghadapi tantangan kompleksitas beban kerja sesuai jumlah objek pemeriksaan dan luasnya wilayah pengawasan, maka kedepannya diperlukan penambahan jumlah tenaga pemeriksa yang akan dipersiapkan untuk menjadi pejabat fungsional APIP dengan mempertimbangkan kapasitas dan kompetensi yang diperlukan oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone.

6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran 4

Tabel 3.8.4
Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 4

N O	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.	Persentase Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang bersertifikat (Hingga Tahun 2018)	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp. 238.000.000,-	Rp. 192.492.750,-	80,88%

Program strategis yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja indikator sasaran ini adalah *Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan* melalui *Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan*. Tujuan dari program dan kegiatan ini adalah meningkatkan Profesionalisme SDM Pengawasan Inspektorat Daerah melalui peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kompetensi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan sesuai dengan kebutuhan organisasi, yang dilaksanakan dalam bentuk Fasilitasi Kegiatan Diklat untuk Pembentukan/Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengawasan dan Bimtek Substantif untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi serta Pelatihan



Kantor Sendiri (PKS) bagi SDM Pengawasan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran ini, terutama adalah keterbatasan SDM Pengawasan baik dari kuantitas maupun kualitas beserta anggaran diklat/bimtek dibandingkan dengan kebutuhan organisasi berdasarkan beban kerja pengawasan yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone. Hal ini kemudian disiasati dengan membuat perencanaan diklat dan bimtek serta PKS yang selektif dengan memperhitungkan ketersediaan SDM dan Anggaran, meski pada akhirnya tetap diperlukan rekrutmen SDM pengawasan yang masih terbatas sesuai kebutuhan Inspektorat Daerah Kab. Bone.

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran 4

Tabel 3.9.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja Sasaran 4

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI (3-4)
1	2	3	4	5
4.	Persentase Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang bersertifikat (Hingga Tahun 2018)	101 %	80,88 %	20,12%

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran ini sangat baik dengan nilai efisiensi sebesar 20,12%, dimana realisasi penggunaan anggarannya (sebesar 80,80%) lebih kecil nilainya dibandingkan dengan persentase realisasi capaian kinerjanya (sebesar 101%).

- SASARAN STRATEGIS KE-LIMA:

Terciptanya Sistem Dan Prosedur Standar Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja dari Sasaran 5

Tabel 3.5.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA
5.	Jumlah paket standar operasional prosedur (SOP) / pedoman pelaksanaan kebijakan pengawasan (Hingga Tahun 2018)	5 Paket	5 Paket (Tidak ada penambahan jumlah SOP dari tahun sebelumnya, hanya revisi penyempurnaan SOP yang ada)	100% (Baik)



2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya dari Sasaran 5

Tabel 3.6.5

Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran 5 - Tahun 2014-2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah paket standar operasional prosedur (SOP) / pedoman pelaksanaan kebijakan pengawasan (Hingga Tahun 2018)	2 Paket SOP	3 Paket SOP	4 Paket SOP	5 Paket SOP	5 Paket SOP

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2013-2018 dari Sasaran 5

Tabel 3.7.5

Capaian Kinerja Sasaran 5-Tahun 2018 Terhadap Target Akhir Renstra 2013-2018

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA
5.	Jumlah paket standar operasional prosedur (SOP) / pedoman pelaksanaan kebijakan pengawasan (Hingga Tahun Berkenaan)	5 Paket SOP	5 Paket SOP	100 % (Baik)

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Standar Nasional dari Sasaran 5

Tidak ada standar nasional yang harus dipenuhi untuk pencapaian kinerja terkait dengan Sasaran 5.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan dari Sasaran 5

Sebagai catatan atas target capaian kinerja sasaran ini, yaitu Jumlah Penyusunan Paket Standar Operasional Prosedur (SOP)/Pedoman pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Daerah, merupakan salah satu indikator kinerja utama untuk mendorong terwujudnya peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Seperti tersaji pada tabel 3.4, tabel 3.5.5, tabel 3.6.5 dan tabel 3.7.5 di atas, realisasi capaian kinerja untuk indikator kinerja pada sasaran strategis kelima ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dimana SOP/Pedoman Inspektorat Daerah Kab. Bone yang



tersusun untuk pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan, yaitu sebanyak 5 Paket SOP/Pedoman (100%) sesuai dengan peningkatan yang ditargetkan dari tahun 2014 hingga tahun 2018 dalam periode Renstra dan RPJMD Tahun 2013-2018, dengan ***tingkat capaian kinerjanya sebesar 100 %, dengan kategori Baik (76~100 %).***

Pada tahun 2018, tidak ada penambahan Jumlah SOP/Pedoman untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone, hanya revisi dan penyempurnaan dari beberapa SOP/Pedoman yang ada dalam rangka pemenuhan assessment kapabilitas APIP menuju Level 3 berdasarkan standar IACM (Internal Audit Capability Model).

Dengan capaian kinerja ini, maka hingga tahun 2018, telah tersedia 5 (lima) Paket SOP/Pedoman Kebijakan Sistem dan Prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaan tupoksi Inspektorat Daerah Kab. Bone, yaitu :

1. 1 (satu) Paket SOP Administrasi Pemerintahan yang terdiri dari 4 Jenis SOP berupa 90 SOP Subag. Administrasi & Umum, 23 SOP Subag. Evaluasi & Pelaporan, 16 SOP Subag. Perencanaan, dan 6 SOP Bagi Jabatan Fungsional APIP)
2. 1 (satu) Paket SOP Pengelolaan/Pengembangan SDM (2 SOP)
3. 1 (satu) Paket SOP Fasilitasi Pengawasan (3 SOP)
4. 1 (satu) Paket SOP Teknis Pengawasan (3 SOP)
5. 1 (satu) Paket SOP Monitoring & Pelaporan Hasil Pengawasan (2 SOP)

Kedepannya, dalam perencanaan kinerja tahun berikutnya, ditargetkan untuk melakukan pengembangan dan penyempurnaan Paket SOP Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone yang bersifat lebih teknis terkait dengan upaya peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone menuju level 3 (*integrated*) penuh yang diassessment oleh BPKP setiap tahunnya berdasarkan standar IACM (Internal Audit Capability Model). Berdasarkan hasil assessment sementara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, untuk Tahun 2017, Kapabilitas Inspektorat Daerah Kab. Bone masih berada pada Level 3 dengan Catatan Perbaikan, sehingga menjadi catatan penting bagi perbaikan kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone, yang kedepannya akan dilakukan pembenahan dengan mengoptimalkan kinerja Tim Kerja Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah yang telah dibentuk sejak Tahun 2016.



Tim Kerja Peningkatan Kapabilitas APIP beranggotakan atas Seluruh Pejabat Struktural baik Pejabat Eselon II, III, dan IV, Perwakilan dari setiap unsur jabatan fungsional pengawasan yang ada serta beberapa staf yang punya kapasitas untuk terlibat dalam tim.

Permasalahan terkait dengan hal ini, terutama adalah koordinasi Tim Kerja yang telah dibentuk yang masih perlu dioptimalkan. Hal ini dikarenakan oleh padatnya jadwal penugasan pengawasan yang telah diprogramkan sesuai beban kerja pengawasan, termasuk permintaan pemeriksaan khusus oleh aparat penegak hukum sehingga menyita waktu yang ada untuk proses koordinasi tim ini, sehingga kedepannya diperlukan peningkatan kerjasama tim yang lebih terencana dan lebih fokus berdasarkan pembagian tugas setiap anggota tim. Selain itu, konsultasi dengan BPKP selaku Pembina APIP dan Inspektorat Daerah lainnya tetap diteruskan sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun 2018 untuk mengakselerasi peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone.

6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran 5

Tabel 3.8.5
Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 5

N O	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.	Jumlah paket standar operasional prosedur (SOP) / pedoman pelaksanaan kebijakan pengawasan (Hingga Tahun 2018)	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp. 27.650.000,-	Rp. 424.900,-	1,54%

Program strategis yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja indikator sasaran ini adalah *Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan* melalui *Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan*. Tujuan dari program dan kegiatan ini adalah menjamin ketersediaan dokumen kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan melalui penataan dan penyempurnaan dokumen yang diperlukan guna peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab Bone. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembentukan tim kerja peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat



Daerah Kab. Bone, yang bekerja sama dalam proses penyusunan kelengkapan dokumen infrastruktur pengawasan, termasuk dalam hal pengendalian dan monev implementasi pedoman kebijakan pengawasan yang telah dibuat agar dapat memberikan dampak bagi peningkatan kinerja pengawasan menuju Kapabilitas APIP Level 3 Penuh.

Tim Kerja Peningkatan Kapabilitas APIP beranggotakan atas Seluruh Pejabat Struktural baik Pejabat Eselon I, III, dan IV, Perwakilan dari setiap unsur jabatan fungsional pengawasan yang ada serta beberapa staf yang punya kapasitas untuk terlibat dalam tim.

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran ini, adalah rendahnya penyerapan anggaran yang hanya mencapai 1,54%, yang disebabkan oleh proses assessment kapabilitas APIP yang sedianya dibiayai sepenuhnya oleh Inspektorat Daerah sesuai anggaran tahun 2018, ternyata dalam realisasi pelaksanaannya dibiayai sebagian secara mandiri oleh BPKP sebagai bagian dari program kerja BPKP pada tahun 2018.

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran 5

Tabel 3.9.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja Sasaran 5

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI (3-4)
1	2	3	4	5
5.	Jumlah paket standar operasional prosedur (SOP) / pedoman pelaksanaan kebijakan pengawasan (Hingga Tahun 2018)	100 %	1,54 %	98,46%

Angka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran ini sebesar 98,14%, dimana realisasi penggunaan anggarannya (sebesar 1,54%) jauh lebih kecil nilainya dibandingkan dengan persentase realisasi capaian kinerjanya (sebesar 100%). Meski nilai efisiensinya sangat besar, hal ini tidaklah menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, dimana penganggaran yang ada tidaklah terencana secara efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja sasaran ini, sehingga menjadi catatan penting untuk proses penganggaran tahun berikutnya.



3.2 REALISASI ANGGARAN

Gambaran Umum Anggaran Inspektorat Daerah Kab. Bone

Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun 2018 hanya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kab. Bone T.A. 2018. Nilai pagu anggaran tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Pagu Anggaran Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2017 dan 2018

JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN (Berdasarkan Dokumen Perubahan Anggaran-DPPA)		
	Tahun 2017	Tahun 2018	% Kenaikan/(Penurunan)
BELANJA TIDAK LANGSUNG (Gaji & Tunjangan Pegawai)	Rp. 3.858.837.200,-	Rp. 4.418.991.531,-	14,52 %
BELANJA LANGSUNG (Program dan Kegiatan)	Rp. 3.200.000.000,-	Rp. 3.250.000.000,-	1,56 %
- Belanja Pegawai	Rp. 2.010.635.000,-	Rp. 0,-	(100 %)
- Belanja Barang/Jasa	Rp. 1.098.365.000,-	Rp. 2.786.271.500,-	153,67 %
- Belanja Modal	Rp. 91.000.000,-	Rp. 463.728.500,-	409,59 %
TOTAL ANGGARAN	Rp. 7.058.837.200,-	Rp. 7.668.991.531,-	8,64 %

Perbandingan alokasi anggaran belanja Inspektorat Daerah Kab. Bone terhadap total anggaran belanja pada APBD T.A. 2014-2018, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Alokasi Anggaran Belanja Inspektorat Daerah terhadap APBD Kab. Bone T.A. 2018

TAHUN ANGGARAN	PAGU ANGGARAN BELANJA		
	DPPA Itda	APBD-P Kab. Bone	% Terhadap APBD
2014	Rp. 5.272.285.400,-	Rp. 1.621.565.104.168,-	0,33 %
2015	Rp. 6.222.182.200,-	Rp. 2.020.021.255.842,-	0,31 %
2016	Rp. 6.697.577.600,-	Rp. 2.182.915.568.776,-	0,31 %
2017	Rp. 7.058.837.200,-	Rp. 2.335.930.580.063,-	0,30 %
2018	Rp. 7.668.991.531,-	Rp. 2.353.404.828.655,-	0,33 %

Secara proporsional, anggaran untuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal sesuai dengan prinsip “*Money Follow Program*”, dilihat dari beban kerja Inspektorat Daerah Selaku APIP, dimana hal ini dikarenakan oleh keterbatasan keuangan daerah. Namun, hal tersebut tidaklah menjadi alasan bagi Seluruh Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk selalu melaksanakan tugas dan fungsinya seoptimal mungkin demi mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati Bone terpilih periode tahun 2013-2018.



Realisasi Keuangan Tahun 2018

Adapun realisasi keuangan belanja Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun anggaran 2018 mencapai nilai penyerapan anggaran sebesar **Rp. 7.002.440.169,-**, atau **91,31 % dari total pagu anggaran**, yang rinciannya tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 3.17
Realisasi Keuangan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018

JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG (Gaji & Tunjangan Pegawai)	Rp. 4.418.991.531,-	Rp. 4.077.189.628,-	92,27 %
BELANJA LANGSUNG (Program dan Kegiatan)	Rp. 3.250.000.000,-	Rp. 2.925.250.541,-	90,01 %
- Belanja Pegawai	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0,00 %
- Belanja Barang/Jasa	Rp. 2.786.271.500,-	Rp. 2.479.183.541,-	88,98 %
- Belanja Modal	Rp. 463.728.500,-	Rp. 446.067.000,-	96,19 %
JUMLAH	Rp. 7.668.991.531,-	Rp. 7.002.440.169,-	91,31 %

Pemanfaatan Anggaran Tahun 2018

Pemanfaatan anggaran kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone yang sepenuhnya bersumber dari DAU APBD Kab. Bone T.A. 2018, tergambar secara umum pada tabel 3.15 diatas, dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1) *Belanja Tidak Langsung*

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Inspektorat Daerah Kab. Bone pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 4.077.189.628,- (92,27%), digunakan hanya untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS selama satu tahun anggaran, termasuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) & Tunjangan Beban Kerja, yang berlaku setelah perubahan anggaran untuk 3 bulan terakhir (Oktober s.d. Desember 2019).

2) *Belanja Langsung*

Realisasi anggaran belanja langsung Inspektorat Daerah Kab. Bone pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.925.250.541,- (90,01%), digunakan untuk pelaksanaan 8 program dan 22 kegiatan pada tahun 2018. Realisasi anggaran terbesar untuk belanja langsung dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas yaitu *Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala* dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 1.645.935.500,- (50,64%) dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.516.768.800,- atau 92,15% dari Pagu Anggaran Kegiatan tersebut.

Realisasi penggunaan anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan dan target sasaran yang ingin dicapai, secara terinci dapat dilihat pada tabel 3.18 berikut ini :



Tabel 3.18. Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran dan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun Anggaran 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK 2018	REALISASI CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (setelah perubahan)	REALISASI KEUANGAN	% KEUANGAN	EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4/3)x100%	(6)	(7)	(8)	(9)=(8/7)x100%	(10)=(5-9)
1. Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berdasarkan Hasil Audit BPK-RI	1. Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD T.A. 2016)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) <i>Catatan : Ada Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dengan Penurunan Jumlah Temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI</i>	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100 %	1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. • Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Rp. 1.828.830.500,- • Rp. 1.645.935.500,-	Rp. 1.661.536.000,- • Rp. 1.516.768.800,-	90,85 % • 92,15 %	7,85 %
2. Meningkatnya Kinerja Tindak Lanjut Atas Hasil Temuan Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Dan Eksternal	2. Persentase rata-rata penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK-RI dan APIP (Hingga Tahun 2018)	90 %	83,30 %	92,56 %	• Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan • Kegiatan Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan	• Rp. 6.800.000,- • Rp. 176.095.000,-	• Rp. 1.800.000,- • Rp. 142.967.200,-	• 26,47 % • 81,19 %	13,41 %
3. Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3. Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan masyarakat	100 %	100 %	100 %	2. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat. • Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp. 118.500.000,- • Rp. 118.500.000,-	Rp. 110.675.210,- • Rp. 110.675.210,-	93,40 % • 93,40 %	6,6 %

Tabel bersambung ke hal. berikutnya...



Lanjutan dari tabel pada hal. sebelumnya...

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK 2018	REALISASI CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (setelah perubahan)	REALISASI KEUANGAN	% KEUANGAN	EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4/3)x100%	(6)	(7)	(8)	(9)=(8/7)x100%	(10)
4. Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawas Inspektorat Daerah Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4. Persentase Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang bersertifikat (Hingga Tahun 2018)	80 %	81,13 %	101 %	3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan. • Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp. 238.000.000,- • Rp. 238.000.000,-	Rp. 192.492.750,- • Rp. 192.492.750,-	80,88 % • 80,88 %	20,12 %
5. Terciptanya Sistem Dan Prosedur Standar Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5. Jumlah paket standar operasional prosedur (SOP) / pedoman pelaksanaan kebijakan pengawasan (Hingga Tahun 2018)	5 Paket SOP	5 Paket SOP	100 %	4. Program Penataan & Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan. • Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp. 27.650.000,- • Rp. 27.650.000,-	Rp. 424.900,- • Rp. 424.900,-	1,54 % • 1,54 %	98,46 %
Program Rutin Pendukung Program Strategis dalam Pencapaian Seluruh Sasaran					5. Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. • Kegiatan Penilaian Mandiri Berbasis Kinerja	Rp. 14.500.000,- • Rp. 14.500.000,-	Rp. 2.020.000,- • Rp. 2.020.000,-	13,93 % • 13,93 %	-
					6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. • Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD • Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Rp. 6.075.000,- • Rp. 3.075.000,- • Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.704.000,- • Rp. 2.106.600,- • Rp. 597.400,-	44,51 % • 68,51 % • 19,91 %	

Tabel bersambung ke hal. berikutnya...



Lanjutan dari tabel pada hal. sebelumnya...

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK 2018	REALISASI CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (setelah perubahan)	REALISASI KEUANGAN	% KEUANGAN	EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4/3)x100%	(6)	(7)	(8)	(9)=(8/7)x100%	(10)
					7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 	Rp. 461.789.500,- <ul style="list-style-type: none"> Rp. 19.500.000,- Rp. 55.896.000,- Rp. 3.562.500,- Rp. 46.225.000,- Rp. 230.000.000,- Rp. 106.606.000,- 	Rp. 436.783.852,- <ul style="list-style-type: none"> Rp. 16.825.812,- Rp. 55.652.190,- Rp. 3.562.500,- Rp. 41.370.000,- Rp. 225.984.200,- Rp. 93.389.150,- 	94,59 % <ul style="list-style-type: none"> 86,29 % 99,56 % 100 % 89,50 % 98,25 % 87,60 % 	
					8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 	Rp. 554.655.000,- <ul style="list-style-type: none"> Rp. 313.178.500,- Rp. 37.000.000,- Rp. 95.800.000,- Rp. 17.750.000,- Rp. 15.926.500,- Rp. 60.000.000,- Rp. 15.000.000,- 	Rp. 518.613.829,- <ul style="list-style-type: none"> Rp. 295.517.000,- Rp. 37.000.000,- Rp. 95.800.000,- Rp. 17.750.000,- Rp. 13.250.000,- Rp. 48.441.829,- Rp. 10.855.000,- 	93,50 % <ul style="list-style-type: none"> 94,36 % 100 % 100 % 100 % 83,19 % 80,74 % 72,37 % 	
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2018				98,71 %	JUMLAH ANGGARAN & REALISASI	Rp. 3.250.000.000,-	Rp. 2.925.250.541,-	90,01 %	8,70 %



3.3 HAL-HAL LAIN YANG PERLU DILAPORKAN

Penghargaan Yang Diterima Pada Tahun 2018

Pada tahun 2018, tidak ada prestasi atau penghargaan telah diterima Pemerintah Kab. Bone terkait dengan Kinerja Inspektorat Kab. Bone. Namun, dalam periode 5 (lima) Tahun Renstra dan RPJMD Tahun 2013-2018, terdapat satu penghargaan yang telah diperoleh dari Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu *“Pemerintah Daerah dengan Kinerja Terbaik Dalam Menindaklanjuti Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan untuk 4 (empat) Tahun Anggaran 2013-2016”* yang diterima pada tgl. 15 Desember 2017 di Makassar. Penghargaan ini seharusnya menjadi motivasi bagi aparat pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone kedepannya, khususnya dalam mengoptimalkan kinerja penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan eksternal dan internal yang belum optimal mencapai target kinerja yang diharapkan.

Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kab. Bone pada Tahun 2018, masih perlu dioptimalkan pencapaiannya, antara lain, yaitu :

1. Masih lemahnya komitmen Kepala OPD untuk menindaklanjuti rekomendasi atas temuan BPK-RI, sehingga penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK-RI belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah maupun RPJMD Kab. Bone Periode Tahun 2013-2018;
2. Tingkat ketaatan/kepatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah umumnya masih perlu ditingkatkan untuk lebih lebih mendorong terciptanya 3E (efektifitas, efisiensi, dan ekonomis) termasuk kesetaraan gender & disabilitas (inklusif) dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah;
3. Ketersediaan Aparat Pengawas dan Tenaga Pemeriksa khususnya Pejabat Fungsional baik secara kuantitatif maupun kualitatif masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan dinamika beban kerja pengawasan yang terus meningkat serta luasnya wilayah kerja pengawasan Inspektorat Kab. Bone.
4. Tata Kelola Pengawasan pada Inspektorat Kab. Bone selaku APIP yang masih perlu ditingkatkan kapabilitasnya untuk memenuhi standar assessment yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui BPKP-RI, yaitu Level 3 (*integrated*) sesuai dengan standar Internal Audit Capability Model (IACM) yang berlaku secara internasional.



Untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun yang akan datang, diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Peningkatan intensitas koordinasi antara Tim Tindak Lanjut dan Kepala OPD untuk mendorong komitmen penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK-RI, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya yang terkait dengan TP-TGR Keuangan Negara/Daerah, melalui pemantauan dan pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK-RI secara berkala setiap tahunnya, termasuk koordinasi dan konsultasi yang lebih intensif dengan BPK-RI, BPKP, dan Itprov. Sul-Sel di dalam prosesnya.
2. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal akan diarahkan pada perbaikan pengelolaan manajemen organisasi pemerintahan daerah yang terkait dengan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, termasuk Pengelolaan APBDes, melalui penguatan peran Inspektorat Daerah selaku penjamin mutu (quality assurer) dan penyedia jasa konsultasi bagi perangkat daerah dan perangkat desa, serta perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko dengan prinsip penganggaran “*Money Follow Program*”.
3. Direncanakan peningkatan dan pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Inspektorat Kab. Bone secara berkelanjutan melalui pemanfaatan analisis kebutuhan SDM berdasarkan beban kerja pengawasan untuk rekrutmen pegawai dan perencanaan diklat dan bimtek bagi Aparatur Pengawasan khususnya yang terkait dengan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam hal Implementasi SAKIP dan SPIP, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Pengelolaan APBDes.
4. Akselerasi pelaksanaan rencana aksi Peningkatan Kapabilitas APIP oleh Tim Kerja Inspektorat Kab. Bone yang dibentuk untuk mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan guna memenuhi standar assessment Kapabilitas Tata Kelola APIP beserta implementasinya dalam pelaksanaan tugas pembinaan & pengawasan, dan juga peningkatan kerja sama yang lebih intensif dengan BPKP-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 ini menginformasikan tugas dan fungsi serta hasil capaian kinerja Inspektorat Daerah pada tahun 2018 yang merujuk pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMD Kab. Bone Tahun 2013-2018, dan merupakan wujud pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang telah dijanjikan oleh Inspektur Daerah kepada Bupati Bone.

Inspektorat Daerah Kab. Bone telah menetapkan visi dalam Renstra Tahun 2013-2018, yaitu *“Menjadi Lembaga Pengawasan Yang Handal Dan Responsif untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Melayani Masyarakat”*. Dalam mencapai visi tersebut, Inspektorat Daerah Kab. Bone telah menetapkan target capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dalam dokumen perjanjian kinerja setiap tahunnya dengan prioritas utama pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai dalam periode pemerintahan Bupati Bone Tahun 2013-2018.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone, maka Persentase capaian kinerja Tahun 2018 adalah sebesar 98,7%, sebagaimana terlihat pada tabel 3.2 (hal. 21). Nilai capaian ini merupakan persentase rata-rata dari capaian kinerja 5 (lima) indikator kinerja Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018, dengan perincian :

- 4 Indikator Kinerja (IK) Sasaran yang mencapai target kinerja ≥ 100 %
- 1 Indikator Kinerja (IK) Sasaran yang belum mencapai target dengan nilai 92,6 %

Sasaran ke-2 yaitu *“Meningkatnya Kinerja Tindak Lanjut atas Hasil Temuan Pengawasan Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal”* merupakan sasaran yang indikator kinerjanya belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 maupun target akhir jangka menengah dalam Renstra Inspektorat Daerah dan RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023 (lihat juga tabel.3.4 dan tabel 3.7.1-5), dimana persentase rata-rata rasio penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan hanya mencapai 83,3% dari target 90% pada Tahun 2018.



Dari tabel 3.18 pada halaman 48-50, juga dapat dilihat bahwa pada dasarnya semua program dan kegiatan terkait satu sama lain dan semuanya menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja secara keseluruhan. Namun dilihat dari besarnya nilai anggaran dan target indikator kinerja utama (IKU) yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, maka terdapat 4 program strategis yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone, yaitu :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
4. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

Terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran keuangan sebagai input utama (selain SDM APIP) dari program dan kegiatan penunjang capaian kinerja dari ke-5 sasaran strategis pada tahun 2018, maka terlihat dari tabel 3.18, bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yaitu sebesar 8,70% dari setiap program dan kegiatan yang terlaksana pada Tahun 2018, yang berarti terdapat efisiensi yang cukup signifikan bila diperbandingkan realisasi anggaran program dan kegiatan sebesar 90% dengan tingkat capaian kinerja rata-rata yang mencapai nilai 98,7%.

Adapun realisasi penggunaan anggaran belanja Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun anggaran 2018, mencapai nilai penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.002.440.169,- atau 91,31% dari total pagu anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Dari nilai penyerapan anggaran tersebut, realisasi belanja langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.925.250.541,- atau 90,01% dari pagu anggaran belanja langsung T.A. 2018.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun 2018 cukup optimal berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sebesar 98,7% terhadap target 5 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dan cukup efisien bila capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan persentase realisasi penggunaan anggaran belanja dari seluruh program/kegiatan yang terlaksana pada tahun 2018.

Namun demikian, masih diperlukan akselerasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya guna mewujudkan pencapaian target indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Kab. Bone Tahun 2013-2018,



dimana dari 5 IKU sasaran strategis yang ditetapkan, masih terdapat satu capaian target IKU yang belum optimal pencapaiannya, yaitu terkait dengan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah. Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja seluruh aparat pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun berikutnya.

Permasalahan sekaligus tantangan utama yang perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone adalah :

1. *Mengawal dan mendorong Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah agar tetap memperoleh opini WTP dari BPK-RI,*
2. *Mengoptimalkan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan APIP,*
3. *Mendorong peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Nilai Maturitas SPIP, Indeks Persepsi Korupsi, serta Indeks Kepuasan Masyarakat yang masih dibawah dari standar yang berlaku dalam Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih,*
4. *Mengawal penyelenggaraan pemerintah desa yang khususnya terkait dengan pengelolaan APBDes, serta*
5. *Meningkatkan Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP sesuai standar IACM (Internal Audit Capability Model)*

Kedepannya, tantangan ini akan dihadapi dengan memacu kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone yang difokuskan pada :

- Peningkatan intensitas koordinasi antara Tim Tindak Lanjut dan Kepala SKPD untuk mendorong komitmen penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK-RI, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya yang terkait dengan TP-TGR Keuangan Negara/Daerah, melalui pemantauan dan pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut secara berkala setiap tahunnya.
- Peningkatan peran Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku Quality Assurer (Penjamin Mutu/Kualitas) dan Partner Consulting (Fungsi Konsultatif) bagi SKPD dan Pemerintah Desa dalam bentuk kegiatan pembinaan dan pengawasan guna pencegahan secara dini terhadap penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.



- Penerapan Kendali Mutu dalam penyelenggaraan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kab. Bone sesuai Pedoman Kendali Mutu Pengawasan yang berlaku bagi APIP.
- Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur Pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan serta penerapan reward dan punishment atas kinerja aparat pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone.
- Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku APIP menuju level 3 (*integrated*) berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model) yang mampu mendorong terciptanya efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bone.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 ini dibuat sebagai Laporan Pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja Inspektur Daerah bersama jajaran aparatur pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone kepada Bupati dan masyarakat Kab. Bone.



LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- Lampiran 1 : Cascading-Matriks RPJMD-Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2013-2018
- Lampiran 2 : Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- Lampiran 3 : Data Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan dari Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018
- Lampiran 4 : Data Realisasi Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018
- Lampiran 5 : Data Diklat/Bimtek yang diikuti oleh Pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bone pada Tahun 2018



LAMPIRAN 1

Cascading-Matriks RPJMD-Renstra
Inspektorat Daerah Tahun 2013-2018

ALUR KETERKAITAN RPJMD KAB. BONE DAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE

RPJMD KAB. BONE TAHUN 2013-2018

VISI

"Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas, dan **SEJAHTERA**"

MISI ke-6

"Menguatkan Budaya Politik dan Hukum yang Demokratis dan Bebas KKN"

TUJUAN RPJMD

"Menerapkan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Partisipatif & Akuntabel"

SASARAN RPJMD

➢ Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Meningkatnya Status Audit Keuangan Daerah oleh BPK

INDIKATOR

1. Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK-RI sesuai dengan Rekomendasi
3. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tahun
4. Jumlah paket standar operasional prosedur (SOP) / pedoman pelaksanaan kebijakan pengawasan

➢ Terjalinnnya Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan terjalinnnya kerjasama antar pemerintah daerah

INDIKATOR

5. Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan masyarakat per tahun

➢ Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya

INDIKATOR

6. Jumlah Tenaga Aparatur Fungsional Pengawas/ Pemeriksa Inspektorat Daerah yang bersertifikat

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE TAHUN 2013-2018

VISI

"Menjadi Lembaga Pengawasan Internal Yang Handal Dan Responsif Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Melayani Masyarakat"

MISI

1. Mendorong Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Bebas KKN
2. Mendorong peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan Dan Kapabilitas Tata Kelola Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

TUJUAN RENSTRA

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Meningkatkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan Dan Kapabilitas Tata Kelola Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

SASARAN RENSTRA

➢ Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berdasarkan Hasil Audit BPK-RI

INDIKATOR

1. Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

➢ Meningkatnya Kinerja Tindak Lanjut Atas Hasil Temuan Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Dan Eksternal

INDIKATOR

2. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK-RI dan APIP

➢ Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

INDIKATOR

3. Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan masyarakat

➢ Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawas Inspektorat Daerah Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

INDIKATOR

4. Persentase Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang bersertifikat (Terhadap total jumlah Pegawai Inspektorat)

➢ Terciptanya Sistem Dan Prosedur Standar Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

INDIKATOR

5. Jumlah paket standar operasional prosedur (SOP) / pedoman pelaksanaan kebijakan pengawasan



MATRIKS RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN BONE
PERIODE TAHUN 2013-2018

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
MENJADI LEMBAGA PENGAWASAN INTERNAL YANG HANDAL DAN RESPONSIF UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM MELAYANI MASYARAKAT	1. MENDORONG TERWUJUDNYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	1. MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	1. MENINGKATNYA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) BERDASARKAN HASIL AUDIT BPK-RI	1. OPINI BPK-RI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)	- PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAHAN KAB. BONE YANG DIARAHKAN UNTUK MENDORONG PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN SERTA ASET DAERAH	- MENYUSUN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN YANG BERBASIS RESIKO TERKAIT DENGAN AKUNTABILITAS KINERJA, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
			2. MENINGKATNYA KINERJA TINDAK LANJUT ATAS HASIL TEMUAN PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL	2. PERSENTASE PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN BPK-RI DAN APIP	- PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPADA PERANGKAT DAERAH DILAKSANAKAN DENGAN MENGEDEPANKAN FUNGSI KONSULTAN DAN PENJAMINAN MUTU (QUALITY ASSURANCE AND CONSULTING) GUNA PENCEGAHAN SECARA DINI TERJADINYA PENYIMPANGAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	- MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPADA PERANGKAT DAERAH DENGAN PENDEKATAN QUALITY ASSURANCE AND CONSULTING BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU	1) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 2) Inventarisasi Temuan Pengawasan 3) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
	2. MENDORONG PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	3. MENINGKATKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	3. MENINGKATNYA PENYELESAIAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	3. PERSENTASE PENYELESAIAN PENANGANAN KASUS PENGADUAN MASYARAKAT	- KOORDINASI DAN SINERGITAS YANG LEBIH INTENSIF DENGAN BPK-RI DAN APIP EKSTERNAL (BPKP DAN INSPEKTORAT PROPINSI) DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN	- MENGINTENSIFKAN KERJA SAMA DENGAN BPK-RI DAN APIP EKSTERNAL (BPKP DAN INSPEKTORAT PROPINSI SUL-SEL) DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TERHADAP SETIAP REKOMENDASI TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN	2. PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
					- MENINGKATKAN SIKAP RESPONSIF APARAT PENGAWASAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUSNYA YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PUBLIK	- MENOPTIMALKAN PENYELESAIAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT SECARA LEBIH INTENSIF DAN RESPONSIF KHUSUSNYA YANG TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK	1) Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	3. MEWUJUDKAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENGAWASAN DAN KAPABILITAS TATA KELOLA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	3. MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENGAWASAN DAN KAPABILITAS TATA KELOLA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	4. MENINGKATNYA KOMPETENSI APARAT PENGAWAS INSPEKTORAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	4. PERSENTASE APARAT PENGAWAS INSPEKTORAT DAERAH YANG BERSERTIFIKAT	- MENINGKATKAN KOMPETENSI, PROFESIONALISME DAN ETIKA APARATUR PENGAWASAN YANG TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	- MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN KAPASITAS APARATUR PENGAWASAN BAIK KOMPETENSI, PROFESIONALISME DAN INTEGRITAS SECARA KUANTITAS DAN KUALITAS MELALUI DIKLAT DAN BIMTEK YANG DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN PENGAWASAN	3. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	
								1) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
			5. TERCIPTANYA SISTEM DAN PROSEDUR STANDAR DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	5. JUMLAH PAKET STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) / PEDOMAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAWASAN	- MENINGKATKAN KAPABILITAS TATA KELOLA PENGAWASAN YANG MENDORONG PENINGKATAN KINERJA PENGAWASAN	- MENINGKATKAN MANAJEMEN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL MELALUI PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI PROSEDUR DAN KEBIJAKAN PENGAWASAN YANG DIARAHKAN PADA PERBAIKAN KAPABILITAS TATA KELOLA INSPEKTORAT KAB. BONE SELAKU APIP	4. PROGRAM PENATAAN & PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	
							1) Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	
							PROGRAM Dan KEGIATAN GENERIK (PENDUKUNG) UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS RENSTRA YANG AKAN DICAPAI ----->>	
							1) Penilaian Mandiri Berbasis Kinerja	
							6. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	
							1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
							2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>PROGRAM Dan KEGIATAN GENERIK (PENDUKUNG) UNTUK Mendukung Pencapaian Target Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis RENSTRA yang akan dicapai ----->></p> <p>7. PROGRAM Peningkatan SARANA DAN PRASARANA APARATUR</p> <p>1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</p> <p>2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</p> <p>3) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</p> <p>4) Pengadaan Mebeleur</p> <p>5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</p> <p>6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional</p> <p>7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor</p> <p>8. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</p> <p>1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</p> <p>3) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>4) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>5) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah</p> <p>6) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</p>



**INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KAB. BONE YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KAB. BONE PERIODE TAHUN 2013-2018**

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KAB. BONE	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Menerapkan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Partisipatif dan Akuntabel	1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Meningkatnya Status Audit Keuangan Daerah oleh BPK	1. Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	WDP (LKPD T.A. 2013)	WDP (LKPD T.A. 2014)	WDP (LKPD T.A. 2015)	WTP (LKPD T.A. 2016)	WTP (LKPD T.A. 2017)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
		2. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tahun	110 LHP	112 LHP	116 LHP	118 LHP	120 LHP	125 LHP	125 LHP
		3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK-RI sesuai dengan Rekomendasi	65% (Temuan Pemeriksaan Hingga Tahun 2012)	75% (Temuan Pemeriksaan Hingga Tahun 2013)	85% (Temuan Pemeriksaan Hingga Tahun 2014)	90% (Temuan Pemeriksaan Hingga Tahun 2015)	90% (Temuan Pemeriksaan Hingga Tahun 2016)	90% (Temuan Pemeriksaan Hingga Tahun 2017)	90% (Temuan Pemeriksaan Hingga Tahun 2017)
		4. Jumlah paket standar operasional prosedur (SOP) / pedoman pelaksanaan kebijakan pengawasan	1 Paket SOP (Hingga Tahun 2013)	1 Paket SOP (Hingga Tahun 2012)	2 Paket SOP (Hingga Tahun 2014)	3 Paket SOP (Hingga Tahun 2015)	4 Paket SOP (Hingga Tahun 2016)	5 Paket SOP (Hingga Tahun 2017)	5 Paket SOP (Hingga Tahun 2017)
	2. Terjalannya Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk menamin kepastian hukum dan terjalannya kerjasama antar pemerintah daerah	5. Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan masyarakat per tahun	80%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
	3. Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya	6. Jumlah Tenaga Aparatur Fungsional Pengawas/ Pemeriksa Inspektorat Daerah yang bersertifikat	22 Orang	29 Orang	33 Orang	35 Orang	37 Orang	40 Orang	40 Orang



LAMPIRAN 2

Dokumen Perjanjian Kinerja
Tahun 2018

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BONE**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. A. Amar Ma'ruf P., M.Si.**

Jabatan : **Inspektur Daerah**

selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **Dr. H. A. Fahsar M. Padjalangi, M.Si.**

Jabatan : **Bupati Bone**

selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Watampone, 2 Januari 2018



PIHAK KEDUA,

Dr. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si.



PIHAK PERTAMA,

Drs. H. A. AMAR MA'RUF P., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19590608 198603 1 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTUR DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE

NO.	SASARAN STRATEGIS SESUAI RPJMD 2013-2018	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Meningkatnya Status Audit Keuangan Daerah oleh BPK-RI	1. Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD T.A. 2017)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
		2. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) (pada Tahun 2018)	125 LHP
		3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK-RI sesuai dengan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (Hingga Tahun 2018)	90 %
		4. Jumlah Paket Prosedur dan Kebijakan Pengawasan (Hingga Tahun 2018)	5 Paket SOP
2.	Terjalannya Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan terjalannya kerjasama antar pemerintah daerah	5. Persentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani Secara Maksimal (pada Tahun 2018)	100 %
3	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD Dalam Menjalankan Fungsinya	6. Jumlah Tenaga Aparatur Fungsional Pengawasan yang Bersertifikat (Hingga Tahun 2018)	40 Orang





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTUR DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE

NO.	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENSTRA 2013-2018	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berdasarkan Hasil Audit BPK-RI	1. Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD T.A. 2017)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2.	Meningkatnya Kinerja Tindak Lanjut Atas Hasil Temuan Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Dan Eksternal	2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan BPK-RI Dan APIP (Hingga tahun 2018)	90 %
3.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3. Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat (pada Tahun 2018)	100 %
4.	Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawas Inspektorat Daerah Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4. Persentase Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah Yang Bersertifikat (Hingga Tahun 2018)	80 % (40 Orang)
5.	Terciptanya Sistem Dan Prosedur Standar Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5. Jumlah Paket Standar Operasional Prosedur (SOP) / Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan (Hingga Tahun 2018)	5 Paket SOP

<u>PROGRAM</u>	<u>ANGGARAN</u>	<u>KETERANGAN</u>
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp. 1.492.759.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2018 Program Prioritas Pencapaian Sasaran Strategis.
2. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp. 143.000.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2018 Program Prioritas Pencapaian Sasaran Strategis.
3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp. 153.000.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2018 Program Prioritas Pencapaian Sasaran Strategis.
4. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp. 17.650.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2018 Program Prioritas Pencapaian Sasaran Strategis.
5. Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Rp. 14.500.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2018 Program Penunjang untuk Pencapaian Sasaran Strategis.
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 6.075.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2018 Program Penunjang untuk Pencapaian Sasaran Strategis.
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 303.226.500,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2018 Program Penunjang untuk Pencapaian Sasaran Strategis.
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 369.789.500,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2018 Program Penunjang untuk Pencapaian Sasaran Strategis.

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 : Rp. 2.500.000.000,-

Watampone, 2 Januari 2018


BUPATI BONE

Dr. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si.


INSPEKTUR DAERAH

Drs. H.A. AMAR MA'RUF P., M.Si.
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. : 19590608 198603 1 015



LAMPIRAN 3

Data Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi
Keuangan dari Program dan Kegiatan
Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018

DATA REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI KEUANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT KAB. BONE TAHUN 2018

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUMBER DANA	CAPAIAN KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)		ANGGARAN / KEUANGAN		
			REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL & PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH - Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	(DAU) APBD	<i>Terselenggaranya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH melalui pembinaan dan pengawasan internal secara berkala, inventarisasi dan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan oleh APIP internal/eksternal & BPK-RI yang mendorong peningkatan ketaatan/kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundang-undangan melalui tata kelola yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone</i>	91,10%	Rp 1.828.830.500	Rp 1.661.536.000	90,85%
			- Tersedianya 529 dari Target 155 Laporan Hasil Pengawasan (LHP) berupa Audit, Reviu, Evaluasi, Monitoring, Pengawasan Lainnya berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018, yang terdiri dari : a. 400 LHP atas Pemeriksaan (Komprehensif) Reguler / Audit Operasional OPD, Kecamatan/ Kelurahan, dan Sekolah,serta Audit APBDesa b. 69 LHR meliputi Reviu LKPD T.A. 2017 dan LAKIP/LKj-IP Pemerintah Kab. Bone Tahun 2017, serta Reviu RKPd Tahun 2019, Reviu RKA-SKPD T.A. 2019. c. 21 LHE atas Evaluasi Implementasi SAKIP pada OPD tahun 2017 Lingkup PemKab. Bone d. 8 LHP atas Pemantauan/Monitoring Realisasi Pertanggungjawaban Keuangan & Aset/Persediaan (opname kas 7 stock opname) pada OPD Per 31 Desember 2018 e. 23 LHP atas Kasus Perceraian PNS f. 6 LHP atas Kasus Pengaduan Masyarakat. g. 1 LHP atas Pemeriksaan Khusus. h. 1 Laporan Kegiatan Pengawasan Lainnya berupa Asistensi/Pendampingan bagi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APBDesa	100%	Rp 1.645.935.500	Rp 1.516.768.800	92,15%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUMBER DANA	CAPAIAN KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)		ANGGARAN / KEUANGAN		
			REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Inventarisasi Temuan Pengawasan		- Tersedianya Data Periodik (Per Triwulan) Inventarisasi Hasil Temuan Pemeriksaan APIP Internal/ Eksternal (Inspektorat Kabupaten Bone, Inspektorat Provinsi Sul-Sel, BPKP) dan BPK-RI beserta progres penyelesaian tindak lanjutnya hingga Tahun 2018, dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIMHP)	90%	Rp 6.800.000	Rp 1.800.000	26,47%
	- Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan		- Pencapaian target nilai rata-rata persentase penyelesaian tindak lanjut atas temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP Internal/ Eksternal hingga Tahun 2018, yaitu sebesar 83,30% dari Target 90% , dengan rincian sebagai berikut : a. 80,11% atas temuan/rekomendasi BPK-RI b. 68,03% atas temuan/rekomendasi BPKP c. 92,16% atas temuan/rekomendasi Inspektorat Provinsi Sul-Sel d. 93,91% atas temuan/rekomendasi Inspektorat Kabupaten Bone - Terlaksananya Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah Tingkat Kabupaten Bone	83,30%	Rp 176.095.000	Rp 142.967.200	81,19%
2.	PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	(DAU) APBD	<i>Persentase Penanganan dan Penyelesaian atas Kasus Pengaduan Masyarakat selama satu tahun anggaran</i>	100%	Rp 118.500.000	Rp 110.675.210	93,40%
	- Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat		- terselesaikannya Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat sebanyak 6 dari jumlah 6 Pengaduan Masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah selama Tahun 2018	100%	Rp 118.500.000	Rp 110.675.210	93,40%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUMBER DANA	CAPAIAN KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	ANGGARAN / KEUANGAN			
			REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN - Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	(DAU) APBD	<i>Terciptanya peningkatan dan pengembangan kapasitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan melalui kegiatan pelatihan pada berbagai diklat/bimtek substantif yang dibutuhkan untuk peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, disamping melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri (in house training)</i>	85%	Rp 238.000.000	Rp 192.492.750	80,88%
			- Terlaksananya diklat/bimtek substantif yang dibutuhkan untuk peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas bagi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Inspektorat Kabupaten Bone (target minimal 55 Orang + 2 PKS) pada tahun 2017 berupa : a. Diklat dan Ujian Sertifikasi Pembentukan JFA selaku Auditor Pertama bagi 4 Orang staf/tenaga pemeriksa yang diselenggarakan di Ciawi Bogor dan Makassar oleh Pusdiklatwas BPKP & BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan b. Diklat dan Ujian Sertifikasi Penjenjangan JFA - Auditor Madya bagi 4 Orang Auditor Muda yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP di Bogor c. Diklat dan Ujian Sertifikasi Penjenjangan JF-P2UPD Madya bagi 3 Orang P2UPD Muda yang diselenggarakan oleh Kemendagri di Jakarta d. 24 Kegiatan Diklat/Bimtek Substantif lainnya bagi 34 Orang Pejabat Struktural/Fungsional/Staf yang terkait dengan Pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan kepegawaian, penyelenggaraan SPIP, pengawasan Dana Desa, implementasi Reformasi Birokrasi, pengembangan kapabilitas APIP, dsb. e. 1 Pelatihan Kantor Sendiri (in house training), berupa Bimtek Penyusunan Dokumen Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP Menuju Level 3	85%	Rp 238.000.000	Rp 192.492.750	80,88%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUMBER DANA	CAPAIAN KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)		ANGGARAN / KEUANGAN		
			REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN - Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	(DAU) APBD	<i>Tersedianya Pedoman Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan yang diperlukan dalam pelaksanaan tupoksi Inspektorat Kabupaten Bone sesuai perencanaan tahun 2018</i>	100,00%	Rp 27.650.000	Rp 424.900	1,54%
			- Tersusunnya 1 (satu) dari target 1 (satu) Paket Standar Operasional Prosedur/Pedoman Teknis Pengawasan, yaitu Penyempurnaan/Revisi Dokumen SOP Penyusunan PKPT berbasis Resiko sebagai salah satu Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3	100%	Rp 27.650.000	Rp 424.900	1,54%
5.	PROGRAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - Penilaian Mandiri Berbasis Kinerja	(DAU) APBD	<i>Terlaksananya Pelaporan Hasil Penilaian Mandiri Berbasis Kinerja terhadap Implementasi Reformasi Birokrasi secara online melalui aplikasi self assessment KemenPAN-RB Tahun 2018</i>	90%	Rp 14.500.000	Rp 2.020.000	13,93%
			- Terlaksananya Monev dan Pelaporan Hasil Penilaian Mandiri Berbasis Kinerja terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada SKPD lingkup Pemerintahan Kab. Bone terkait dengan perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 Area Perubahan, namun belum optimal dalam proses monitoring untuk peningkatan capaian kinerjanya.	90%	Rp 14.500.000	Rp 2.020.000	13,93%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUMBER DANA	CAPAIAN KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)		ANGGARAN / KEUANGAN		
			REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN	(DAU) APBD	<i>Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan dalam pelaksanaan tupoksi Inspektorat Kabupaten Bone pada tahun anggaran 2018</i>	100%	Rp 6.075.000	Rp 2.704.000	44,51%
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		- Tersusunnya 5 dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bone pada Tahun 2018, yang terdiri dari : a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip/LKj) Inspektorat Kabupaten Bone Tahun 2017 b. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2019 c. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 d. Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) Tahun 2019 e. Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023	100%	Rp 3.075.000	Rp 2.106.600	68,51%
	- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		- Tersusunnya 4 dokumen perencanaan anggaran dan pelaporan keuangan Inspektorat Kabupaten Bone pada Tahun 2018, terdiri dari : a. Laporan Keuangan OPD Tahun 2017 b. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Tahun 2018 c. Rencana Kerja & Anggaran (RKA-SKPD) Tahun 2019 d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Tahun 2019	100%	Rp 3.000.000	Rp 597.400	19,91%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUMBER DANA	CAPAIAN KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)		ANGGARAN / KEUANGAN		
			REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	(DAU) APBD	<i>Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang tertib administrasi dan berkesinambungan bagi kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bone selama tahun anggaran 2018</i>	100%	Rp 461.789.500	Rp 436.783.852	94,59%
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		- Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran berupa ketersediaan jasa komunikasi (telepon/fax dan internet) selama 12 bulan sesuai rencana kebutuhan tahun 2018	100%	Rp 19.500.000	Rp 16.825.812	86,29%
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan		- Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran berupa ketersediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan sesuai rencana kebutuhan tahun 2018	100%	Rp 55.896.000	Rp 55.652.190	99,56%
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		- Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran berupa ketersediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor selama 12 bulan sesuai rencana kebutuhan pada tahun 2018	100%	Rp 3.562.500	Rp 3.562.500	100,00%
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		- Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran berupa ketersediaan bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah selama 12 bulan sesuai rencana kebutuhan peningkatan dan pengembangan wawasan dan informasi bagi pegawai Inspektorat Kabupaten Bone	100%	Rp 46.225.000	Rp 41.370.000	89,50%
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan instansi vertikal dan SKPD lainnya (tingkat nasional/propinsi/kabupaten) dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan beserta pelaporan pelaksanaan tupoksi Inspektorat Kabupaten Bone sesuai rencana kebutuhan pada tahun anggaran 2018	100%	Rp 230.000.000	Rp 225.984.200	98,25%
	- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		- Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran berupa ketersediaan alat tulis kantor (ATK), barang cetakan & penggandaan, serta makanan dan minuman selama 12 bulan sesuai rencana kebutuhan pada tahun 2018	100%	Rp 106.606.000	Rp 93.389.150	87,60%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUMBER DANA	CAPAIAN KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	ANGGARAN / KEUANGAN			
			REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	(DAU) APBD	<i>Terciptanya peningkatan mutu dan kelengkapan sarana dan prasarana aparatur pengawasan melalui kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sesuai dengan perencanaan kebutuhan tahun anggaran 2018 guna mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi Inspektorat Kabupaten Bone</i>	100%	Rp 554.655.000	Rp 518.613.829	93,50%
	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		- Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional kantor sesuai perencanaan kebutuhan Tahun 2018 berupa : a. 2 Unit Kendaraan Roda Dua (Sepeda Motor) b. 1 Unit Kendaraan Roda Empat (Mobil)	100%	Rp 313.178.500	Rp 295.517.000	94,36%
	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		- Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor sesuai perencanaan kebutuhan Tahun 2018, berupa ; a. 2 Unit AC Split pada Ruangan Pejabat Fungsional Pengawasan b. 1 Buah Brankas Besi pada Ruangan Bendahara Pengeluaran c. 1 Unit TV pada Ruangan Inspektur	100%	Rp 37.000.000	Rp 37.000.000	100,00%
	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		- Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor sesuai perencanaan kebutuhan Tahun 2018, berupa : a. 4 Unit PC Desktop untuk Ruangan Inspektur Pembantu Wilayah 1 s.d. 4 b. 3 Unit Notebook untuk keperluan Sekretariat c. 3 Unit Printer untuk Ruangan Sekretariat dan Pejabat Fungsional Pengawasan d. 1 Unit Scanner untuk Ruangan Sekretariat e. 1 Unit Alat Pemotong Kertas untuk Ruangan Sekretariat f. 1 Unit Alat Pemotong Kertas untuk Ruangan Sekretariat g. Masing-masing 3 Unit Alat Ukur Pemeriksaan (Meter Dorong, Roll Meter dan Jangka Sorong)	100%	Rp 95.800.000	Rp 95.800.000	100,00%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUMBER DANA	CAPAIAN KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)		ANGGARAN / KEUANGAN		
			REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Pengadaan Mebeleur		- Terlaksananya pengadaan meubeleur kantor sesuai perencanaan kebutuhan Tahun 2018, berupa : a. 1 Buah Lemari Besi untuk Sekretariat b. 1 Buah Lemari Sound System untuk Ruangan Rapat	100%	Rp 17.750.000	Rp 17.750.000	100,00%
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor		- Terpenuhinya ketersediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih sesuai perencanaan kebutuhan Tahun 2018 untuk kesinambungan pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan gedung kantor Inspektorat Kabupaten Bone	100%	Rp 15.926.500	Rp 13.250.000	83,19%
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		- Terlaksananya 1 Paket pekerjaan Renovasi Pintu Depan Kantor	100%	Rp 60.000.000	Rp 48.441.829	80,74%
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		- Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor berupa 1 Unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) secara rutin dan berkala guna mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi aparatur pengawasan Inspektorat Kabupaten Bone pada Tahun 2018 - Terbayarnya pajak tahunan kendaraan dinas sebanyak 1 Unit Mobil dan 23 Unit Motor				
			- Terpeliharanya peralatan/perlengkapan gedung kantor (komputer/notebook, printer dan AC Split) secara rutin dan berkala guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bone pada Tahun 2018	100%	Rp 15.000.000	Rp 10.855.000	72,37%
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SELURUH PROGRAM BESERTA REALISASI KEUANGAN SECARA KESELURUHAN				95,76%	Rp 3.250.000.000	Rp 2.925.250.541	90,01%



LAMPIRAN 4

**Data Realisasi Pelaksanaan Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018**



**DAFTAR REALISASI PELAKSANAAN PKPT TAHUN 2018 INSPEKTORAT KAB. BONE
(PEMERIKSAAN KOMPREHENSIF PADA SKPD, SEKOLAH, KECAMATAN, DESA/KELURAHAN)**

No.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
1	Kantor Camat/Kelurahan Tanete Riattang T.A. 2017/2018	700/704/13/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/06/II/ITDA 12 Pebruari 2018
2	Kantor Camat/Kelurahan Cina T.A. 2017/2018	700/704/13/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/07/II/ITDA 12 Pebruari 2018
3	Kantor Camat/Kelurahan Mare T.A. 2017/2018	700/704/13/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/08/II/ITDA 12 Pebruari 2018
4	Kantor Camat/Kelurahan Tonra T.A. 2017/2018	700/704/13/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/09/II/ITDA 12 Pebruari 2018
5	Kantor Camat/Kelurahan Kajuara T.A. 2017/2018	700/704/13/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/10/II/ITDA 12 Pebruari 2018
6	Kantor Camat/Kelurahan Kahu T.A. 2017/2018	700/704/13/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/11/II/ITDA 12 Pebruari 2018
7	Kantor Camat/Kelurahan Bontocani T.A. 2017/2018	700/704/13/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/12/II/ITDA 12 Pebruari 2018
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bone	700/704/14/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/13/II/ITDA 12 Pebruari 2018
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	700/704/14/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/14/II/ITDA 12 Pebruari 2018
10	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	700/704/15/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/15/II/ITDA 12 Pebruari 2018
11	Dinas Pemadam Kebakaran	700/704/15/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/16/II/ITDA 12 Pebruari 2018
12	Kantor Camat/Kelurahan Tanete Riattang Barat T.A. 2017/2018	700/704/16/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/17/II/ITDA 12 Pebruari 2018
13	Kantor Camat/Kelurahan Ulaweng	700/704/16/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/18/II/ITDA 12 Pebruari 2018
14	Kantor Camat/Kelurahan Bengo	700/704/16/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/19/II/ITDA 12 Pebruari 2018
15	Kantor Camat/Kelurahan Lappariaja	700/704/16/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/20/II/ITDA 12 Pebruari 2018
16	Kantor Camat/Kelurahan Amali	700/704/16/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/21/II/ITDA 12 Pebruari 2018
17	Kantor Camat/Kelurahan Lamuru	700/704/16/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/22/II/ITDA 12 Pebruari 2018
18	Kantor Camat/Kelurahan Tellu Limpoe	700/704/16/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/23/II/ITDA 12 Pebruari 2018
19	Dinas Sosial	700/704/17/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/24/II/ITDA 12 Pebruari 2018
20	Dinas Ketahanan Pangan	700/704/17/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/25/II/ITDA 12 Pebruari 2018
21	Dinas Perhubungan	700/704/18/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/26/II/ITDA 12 Pebruari 2018
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	700/704/18/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/27/II/ITDA 12 Pebruari 2018
23	Dinas Tenaga Kerja	700/704/19/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/28/II/ITDA 12 Pebruari 2018
24	Satuan Polisi pamong Praja	700/704/19/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/29/II/ITDA 12 Pebruari 2018
25	Kantor Camat/Kelurahan Tanete Riattang Timur	700/704/20/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/30/II/ITDA 12 Pebruari 2018
26	Kantor Camat/Kelurahan Barebbo	700/704/20/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/31/II/ITDA 12 Pebruari 2018

No.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
27	Kantor Camat/Kelurahan Sibulue	700/704/20/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/32/II/ITDA 12 Februari 2018
28	Kantor Camat/Kelurahan Ponre	700/704/20/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/33/II/ITDA 12 Februari 2018
29	Kantor Camat/Kelurahan Salomekko	700/704/20/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/34/II/ITDA 12 Februari 2018
30	Kantor Camat/Kelurahan Patimpeng	700/704/20/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/35/II/ITDA 12 Februari 2018
31	Kantor Camat/Kelurahan Libureng	700/704/20/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/36/II/ITDA 12 Februari 2018
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	700/704/21/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/39/II/ITDA 12 Februari 2018
33	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	700/704/21/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/40/II/ITDA 12 Februari 2018
34	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian	700/704/22/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/37/II/ITDA 12 Februari 2018
35	Dinas Kebudayaan	700/704/22/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/38/II/ITDA 12 Februari 2018
36	Kantor Camat/Kelurahan Palakka	700/704/23/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/41/II/ITDA 12 Februari 2018
37	Kantor Camat/Kelurahan Awangpone	700/704/23/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/42/II/ITDA 12 Februari 2018
38	Kantor Camat/Kelurahan Tellu Siattinge	700/704/23/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/43/II/ITDA 12 Februari 2018
39	Kantor Camat/Kelurahan Dua Boccoe	700/704/23/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/44/II/ITDA 12 Februari 2018
40	Kantor Camat/Kelurahan Cenrana	700/704/23/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/45/II/ITDA 12 Februari 2018
41	Kantor Camat/Kelurahan Ajangale	700/704/23/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/46/II/ITDA 12 Februari 2018
42	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	700/704/24/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/47/II/ITDA 12 Februari 2018
43	Dinas Pariwisata	700/704/24/I/2018 14 Januari 2018	16 s.d. 29 Januari 2018	793.04/48/II/ITDA 12 Februari 2018
44	Pemeriksaan Dana BOS SMP Negeri di Kec. Cina, Kec. Mare, Kec. Tonra, Kec. Kajuara, Kec. Kahu, dan Kec. Bontocani	700/704/45/II/2018 9 Februari 2018	13 s.d. 27 Februari 2018	793.04/55/II/ITDA 12 Februari 2018
45	Pemeriksaan Dana BOS SD Negeri di Kec. Mare	700/704/46/II/2018 9 Februari 2018	14 s.d. 28 Februari 2018	793.04/60/III/ITDA 12 Maret 2018
46	Pemeriksaan Dana BOS SMP Negeri di Kec. Tanete Riattang Barat, Kec. Ulaweng, Kec. Bengo, Kec. Lappariaja, dan Kec. Amali	700/704/47/II/2018 9 Februari 2018	13 s.d. 27 Februari 2018	793.04/56/III/ITDA 12 Maret 2018
47	Pemeriksaan Dana BOS SMP Negeri di Kec. Tanete Riattang, Kec. Palakka, Kec. Sibulue, Kec. Ponre, Kec. Lamuru dan Kec. Tellu Limpoe	700/704/48/II/2018 9 Februari 2018	13 s.d. 27 Februari 2018	793.04/57/III/ITDA 12 Maret 2018
48	Pemeriksaan Dana BOS SMP Negeri di Kec. Awangpone, Kec. Tellu SiattingE, Kec. Dua Boccoe, Kec. Cenrana, dan Kec. Ajangale	700/704/49/II/2018 9 Februari 2018	13 s.d. 27 Februari 2018	793.04/58/III/ITDA 12 Maret 2018
49	Pemeriksaan Dana BOS SMP Negeri di Kec. Tanete Riattang Timur, Kec. Barebbo, Kec. Salomekko, Kec. Patimpeng, dan Kec. Libureng	700/704/50/II/2018 9 Februari 2018	13 s.d. 27 Februari 2018	793.04/59/III/ITDA 12 Maret 2018
50	Pemeriksaan Dana BOS SD Negeri di Kec. Lappariaja	700/704/51/II/2018 9 Februari 2018	14 s.d. 28 Februari 2018	793.04/61/III/ITDA 12 Maret 2018

No.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
51	Pemeriksaan Dana BOS SD Negeri di Kec. Tanete Riattang Timur	700/704/52/II/2018 9 Pebruari 2018	14 s.d. 28 Pebruari 2018	793.04/62/III/ITDA 12 Maret 2018
52	Pemeriksaan Dana BOS SD Negeri di Kec. Dua BoccoE	700/704/53/II/2018 9 Pebruari 2018	14 s.d. 28 Pebruari 2018	793.04/63/III/ITDA 12 Maret 2018
53	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Wellulang Kecamatan Amali TA.2017	700/704/89/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/95/IV/ITDA 9 april 2018
54	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Mattaropuræ Kecamatan Amali TA.2017	700/704/89/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/96/IV/ITDA 9 april 2018
55	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Waemputtange Kecamatan Amali TA.2017	700/704/89/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/97/IV/ITDA 9 april 2018
56	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Ta' cipong Kecamatan Amali TA.2017	700/704/89/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/98/IV/ITDA 9 april 2018
57	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Laponrong Kecamatan Amali TA.2017	700/704/89/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/99/IV/ITDA 9 april 2018
58	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Bila Kecamatan Amali TA.2017	700/704/89/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/100/IV/ITDA 9 april 2018
59	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Waempubbu Kecamatan Amali TA.2017	700/704/89/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/101/IV/ITDA 9 april 2018
60	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Polewali Kecamatan Kajuara TA.2017	700/704/90/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/80/IV/ITDA 9 April 2018
61	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Padaelo Kecamatan Kajuara TA.2017	700/704/90/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/81/IV/ITDA 9 April 2018
62	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Ancu Kecamatan Kajuara TA.2017	700/704/90/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/82/IV/ITDA 9 April 2018
63	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Tarasu Kecamatan Kajuara TA.2017	700/704/90/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/83/IV/ITDA 9 April 2018
64	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Lappobosse Kecamatan Kajuara TA.2017	700/704/90/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/84/IV/ITDA 9 April 2018
65	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Pude Kecamatan Kajuara TA.2017	700/704/90/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/85/IV/ITDA 9 April 2018
66	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa AngkuE Kecamatan Kajuara TA.2017	700/704/90/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/86/IV/ITDA 9 April 2018
67	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa MallahaE Kecamatan Kajuara TA.2017	700/704/90/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/87/IV/ITDA 9 April 2018
68	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Raja Kecamatan Kajuara TA.2017	700/704/91/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/71/IV/ITDA 9 April 2018
69	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Ambumpungeng Kecamatan Kajuara TA.2017	700/704/91/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/72/IV/ITDA 9 April 2018
70	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Gona Kecamatan Kajuara TA.2017	700/704/91/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/73/IV/ITDA 9 April 2018
71	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Bulu tanah Kecamatan Kajuara TA.2017	700/704/91/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/74/IV/ITDA 9 April 2018
72	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Buareng Kecamatan Kajuara TA.2017	700/704/91/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/75/IV/ITDA 9 April 2018
73	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Lemo Kecamatan Kajuara TA.2017	700/704/91/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/76/IV/ITDA 9 April 2018
74	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Kalero Kecamatan Kajuara TA.2017	700/704/91/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/77/IV/ITDA 9 April 2018
75	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Waetuo Kecamatan Kajuara TA.2017	700/704/91/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/78/IV/ITDA 9 April 2018
76	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa MassangkaE Kecamatan Kajuara TA.2017	700/704/91/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/79/IV/ITDA 9 April 2018
77	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Pacubbe Kecamatan Cenrana TA.2017	700/704/92/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/120/IV/ITDA 9 April 2018
78	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Panyiwi Kecamatan Cenrana TA.2017	700/704/92/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/121/IV/ITDA 9 April 2018

No.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
79	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Watang Ta' Kecamatan Cenrana TA.2017	700/704/92/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/122/IV/ITDA 9 April 2018
80	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Ajalasse Kecamatan Cenrana TA.2017	700/704/92/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/123/IV/ITDA 9 April 2018
81	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Laoni Kecamatan Cenrana TA.2017	700/704/92/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/124/IV/ITDA 9 April 2018
82	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Latonro Kecamatan Cenrana TA.2017	700/704/92/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/125/IV/ITDA 9 April 2018
83	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Pallime Kecamatan Cenrana TA.2017	700/704/92/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/126/IV/ITDA 9 April 2018
84	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa PusungE Kecamatan Cenrana TA.2017	700/704/92/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/127/IV/ITDA 9 April 2018
85	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Watu Kecamatan Cenrana TA.2017	700/704/93/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/128/IV/ITDA 9 April 2018
86	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Cakkeware Kecamatan Cenrana TA.2017	700/704/93/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/129/IV/ITDA 9 April 2018
87	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Labotto Kecamatan Cenrana TA.2017	700/704/93/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/130/IV/ITDA 9 April 2018
88	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Awangcenrana Kecamatan Cenrana TA.2017	700/704/93/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/131/IV/ITDA 9 April 2018
89	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Lebonge Kecamatan Cenrana TA.2017	700/704/93/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/132/IV/ITDA 9 April 2018
90	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa PallaE Kecamatan Cenrana TA.2017	700/704/93/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/133/IV/ITDA 9 April 2018
91	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Nagauleng Kecamatan Cenrana TA.2017	700/704/93/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/134/IV/ITDA 9 April 2018
92	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Amali Riattang Kecamatan Amali TA.2017	700/704/94/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/88/IV/ITDA 9 April 2018
93	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Tocinnong Riattang Kecamatan Amali TA.2017	700/704/94/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/89/IV/ITDA 9 April 2018
94	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Tassipi Riattang Kecamatan Amali TA.2017	700/704/94/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/90/IV/ITDA 9 April 2018
95	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Benteng TelluE Kecamatan Amali TA.2017	700/704/94/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/91/IV/ITDA 9 April 2018
96	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Ajanglaleng Kecamatan Amali TA.2017	700/704/94/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/92/IV/ITDA 9 April 2018
97	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Ulaweng Riaja Kecamatan Amali TA.2017	700/704/94/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/93/IV/ITDA 9 April 2018
98	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Lili Riattang Kecamatan Amali TA.2017	700/704/94/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/94/IV/ITDA 9 April 2018
99	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Tappale Kecamatan Libureng TA.2017	700/704/95/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/111/IV/ITDA 9 April 2018
100	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Polewali Kecamatan Libureng TA.2017	700/704/95/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/112/IV/ITDA 9 April 2018
101	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Pitumpidange Kecamatan Libureng TA.2017	700/704/95/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/113/IV/ITDA 9 April 2018
102	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Mallinrung Kecamatan Libureng TA.2017	700/704/95/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/114/IV/ITDA 9 April 2018
103	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Baringeng Kecamatan Libureng TA.2017	700/704/95/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/115/IV/ITDA 9 April 2018
104	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Wanuwawaru Kecamatan Libureng TA.2017	700/704/95/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/116/IV/ITDA 9 April 2018
105	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Mattiro bulu Kecamatan Libureng TA.2017	700/704/95/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/117/IV/ITDA 9 April 2018
106	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Suwa Kecamatan Libureng TA.2017	700/704/95/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/118/IV/ITDA 9 April 2018
107	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Laburasseng Kecamatan Libureng TA.2017	700/704/95/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/119/IV/ITDA 9 April 2018
108	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Poleonro Kecamatan Libureng TA.2017	700/704/96/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/102/IV/ITDA 9 April 2018

No.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
109	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa mattiro Deceng Kecamatan Libureng TA.2017	700/704/96/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/103/IV/ITDA 9 April 2018
110	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Binuang Kecamatan Libureng TA.2017	700/704/96/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/104/IV/ITDA 9 April 2018
111	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Swadaya Kecamatan Libureng TA.2017	700/704/96/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/105/IV/ITDA 9 April 2018
112	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa mattirowaliE Kecamatan Libureng TA.2017	700/704/96/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/106/IV/ITDA 9 April 2018
113	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Bune Kecamatan Libureng TA.2017	700/704/96/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/107/IV/ITDA 9 April 2018
114	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Mario Kecamatan Libureng TA.2017	700/704/96/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/108/IV/ITDA 9 April 2018
115	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Ponre-ponre Kecamatan Libureng TA.2017	700/704/96/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/109/IV/ITDA 9 April 2018
116	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Tompobulu Kecamatan Libureng TA.2017	700/704/96/III/2018 12 Maret 2018	14 s.d. 28 Maret 2018	793.04/110/IV/ITDA 9 April 2018
117	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Balle, Kecamatan Kahu TA.2017	700/704/124/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/140/V/ITDA 7 Mei 2018
118	Pemeriksaan ADD/APBDesa Cakkela Kecamatan Kahu TA.2017	700/704/124/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/141/V/ITDA 7 Mei 2018
119	Pemeriksaan ADD/APBDesa Cenrana Kecamatan Kahu TA.2017	700/704/124/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/142/V/ITDA 7 Mei 2018
120	Pemeriksaan ADD/APBDesa Nusa Kecamatan Kahu TA.2017	700/704/124/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/143/V/ITDA 7 Mei 2018
121	Pemeriksaan ADD/APBDesa Tompong Patu Kecamatan Kahu TA.2017	700/704/124/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/144/V/ITDA 7 Mei 2018
122	Pemeriksaan ADD/APBDesa Arallae Kecamatan Kahu TA.2017	700/704/124/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/145/V/ITDA 7 Mei 2018
123	Pemeriksaan ADD/APBDesa Lalepo Kecamatan Kahu TA.2017	700/704/124/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/146/V/ITDA 7 Mei 2018
124	Pemeriksaan ADD/APBDesa Bonto Padang Kecamatan Kahu TA.2017	700/704/124/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/147/V/ITDA 7 Mei 2018
125	Pemeriksaan ADD/APBDesa Pasaka Kecamatan Kahu TA.2017	700/704/124/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/148/V/ITDA 7 Mei 2018
126	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Carima Kecamatan Kahu TA.2017	700/704/125/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/149/V/ITDA 7 Mei 2018
127	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Biru Kecamatan Kahu TA.2017	700/704/125/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/150/V/ITDA 7 Mei 2018
128	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Matajang Kecamatan Kahu TA.2017	700/704/125/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/151/V/ITDA 7 Mei 2018
129	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Sanrego Kecamatan Kahu TA.2017	700/704/125/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/152/V/ITDA 7 Mei 2018
130	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Labuaja Kecamatan Kahu TA.2017	700/704/125/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/153/V/ITDA 7 Mei 2018
131	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Hulo Kecamatan Kahu TA.2017	700/704/125/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/154/V/ITDA 7 Mei 2018
132	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Mattoanging Kecamatan Kahu TA.2017	700/704/125/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/155/V/ITDA 7 Mei 2018
133	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Palakka Kecamatan Kahu TA.2017	700/704/125/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/156/V/ITDA 7 Mei 2018
134	Pemeriksaan ADD/APBDesa Maggenrang Kecamatan Kahu TA.2017	700/704/125/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/157/V/ITDA 7 Mei 2018
135	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Cammilo Kecamatan Kahu TA.2017	700/704/125/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/158/V/ITDA 7 Mei 2018
136	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Liliana Ajangale Kecamatan Ulaweng TA.2017	700/704/126/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/159/V/ITDA 7 Mei 2018
137	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Timusu Kecamatan Ulaweng TA.2017	700/704/126/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/160/V/ITDA 7 Mei 2018
138	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Tea Musu Kecamatan Ulaweng TA.2017	700/704/126/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/161/V/ITDA 7 Mei 2018
139	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Galung Kecamatan Ulaweng TA.2017	700/704/126/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/162/V/ITDA 7 Mei 2018
140	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Tadang Palie Kecamatan Ulaweng TA.2017	700/704/126/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/163/V/ITDA 7 Mei 2018

No.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
141	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Ulaweng Cinnong Kecamatan Ulaweng TA.2017	700/704/126/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/164/V/ITDA 7 Mei 2018
142	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Tea Malala Kecamatan Ulaweng TA.2017	700/704/126/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/165/V/ITDA 7 Mei 2018
143	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Cani Sirenreng Kecamatan Ulaweng TA.2017	700/704/127/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/166/V/ITDA 7 Mei 2018
144	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Pallawa Rukka Kecamatan Ulaweng TA.2017	700/704/127/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/167/V/ITDA 7 Mei 2018
145	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa JompiE Kecamatan Ulaweng TA.2017	700/704/127/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/168/V/ITDA 7 Mei 2018
146	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa SappewaliE Kecamatan Ulaweng TA.2017	700/704/127/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/169/V/ITDA 7 Mei 2018
147	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Lamakkaraseng Kecamatan Ulaweng TA.2017	700/704/127/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/170/V/ITDA 7 Mei 2018
148	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Manurunge Kecamatan Ulaweng TA.2017	700/704/127/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/171/V/ITDA 7 Mei 2018
149	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa MulaMenre'e Kecamatan Ulaweng TA.2017	700/704/127/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/172/V/ITDA 7 Mei 2018
150	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Pattiro Sompe Kecamatan SibuluE TA.2017	700/704/128/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/173/V/ITDA 7 Mei 2018
151	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Tadang PaliE Kecamatan SibuluE TA.2017	700/704/128/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/174/V/ITDA 7 Mei 2018
152	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Cinnong Kecamatan SibuluE TA.2017	700/704/128/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/175/V/ITDA 7 Mei 2018
153	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Pattiro Bajo Kecamatan SibuluE TA.2017	700/704/128/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/176/V/ITDA 7 Mei 2018
154	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Pakkasalo Kecamatan SibuluE TA.2017	700/704/128/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/177/V/ITDA 7 Mei 2018
155	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Pattiro Riolo Kecamatan SibuluE TA.2017	700/704/128/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/178/V/ITDA 7 Mei 2018
156	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Sumpang MinangaE Kecamatan SibuluE TA.2017	700/704/128/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/179/V/ITDA 7 Mei 2018
157	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Letta Tanah Kecamatan SibuluE TA.2017	700/704/128/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/180/V/ITDA 7 Mei 2018
158	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Ajang Pulu Kecamatan SibuluE TA.2017	700/704/128/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/181/V/ITDA 7 Mei 2018
159	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Mabbiring Kecamatan SibuluE TA.2017	700/704/129/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/182/V/ITDA 7 Mei 2018
160	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Tunreng TelluE Kecamatan SibuluE TA.2017	700/704/129/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/183/V/ITDA 7 Mei 2018
161	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa BuliE Kecamatan SibuluE TA.2017	700/704/129/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/184/V/ITDA 7 Mei 2018
162	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Pasaka Kecamatan SibuluE TA.2017	700/704/129/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/185/V/ITDA 7 Mei 2018
163	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Massenreng Pulu Kecamatan SibuluE TA.2017	700/704/129/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/186/V/ITDA 7 Mei 2018
164	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Balieng Toa Kecamatan SibuluE TA.2017	700/704/129/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/187/V/ITDA 7 Mei 2018
165	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Kalibong Kecamatan SibuluE TA.2017	700/704/129/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/188/V/ITDA 7 Mei 2018
166	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Polewali Kecamatan SibuluE TA.2017	700/704/129/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/189/V/ITDA 7 Mei 2018
167	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Malluse Tasi Kecamatan SibuluE TA.2017	700/704/129/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/190/V/ITDA 7 Mei 2018
168	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Palongki Kecamatan Tellu Siattinge TA.2017	700/704/130/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/191/V/ITDA 7 Mei 2018
169	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Tajong Kecamatan Tellu Siattinge TA.2017	700/704/130/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/192/V/ITDA 7 Mei 2018
170	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Mattoanging Kecamatan Tellu Siattinge TA.2017	700/704/130/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/193/V/ITDA 7 Mei 2018
171	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Lamuru Kecamatan Tellu Siattinge TA.2017	700/704/130/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/194/V/ITDA 7 Mei 2018

No.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
172	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Ajjalireng Kecamatan Tellu Siattinge TA.2017	700/704/130/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/195/V/ITDA 7 Mei 2018
173	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Sijelling Kecamatan Tellu Siattinge TA.2017	700/704/130/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/196/V/ITDA 7 Mei 2018
174	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge TA.2017	700/704/130/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/197/V/ITDA 7 Mei 2018
175	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Pongka Kecamatan Tellu Siattinge TA.2017	700/704/130/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/198/V/ITDA 7 Mei 2018
176	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Ulo Kecamatan Tellu Siattinge TA.2017	700/704/131/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/199/V/ITDA 7 Mei 2018
177	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge TA.2017	700/704/131/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/200/V/ITDA 7 Mei 2018
178	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Waji Kecamatan Tellu Siattinge TA.2017	700/704/131/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/201/V/ITDA 7 Mei 2018
179	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Itterung Kecamatan Tellu Siattinge TA.2017	700/704/131/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/202/V/ITDA 7 Mei 2018
180	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Pada Idi Kecamatan Tellu Siattinge TA.2017	700/704/131/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/203/V/ITDA 7 Mei 2018
181	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Lappae Kecamatan Tellu Siattinge TA.2017	700/704/131/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/204/V/ITDA 7 Mei 2018
182	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Patanga Kecamatan Tellu Siattinge TA.2017	700/704/131/IV/2018 16 April 2018	17 s.d. 30 April 2018	793.04/205/V/ITDA 7 Mei 2018
183	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Mattiro WaliE Kecamatan Mare TA.2017	700/704/148/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/208/VI/ITDA 4 Juni 2018
184	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Ujung Tanah Kecamatan Mare TA.2017	700/704/148/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/209/VI/ITDA 4 Juni 2018
185	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Lakukang Kecamatan Mare TA.2017	700/704/148/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/210/VI/ITDA 4 Juni 2018
186	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Tellongeng Kecamatan Mare TA.2017	700/704/148/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/211/VI/ITDA 4 Juni 2018
187	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Sumaling Kecamatan Mare TA.2017	700/704/148/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/212/VI/ITDA 4 Juni 2018
188	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Pattiro Kecamatan Mare TA.2017	700/704/148/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/213/VI/ITDA 4 Juni 2018
189	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Data Kecamatan Mare TA.2017	700/704/148/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/214/VI/ITDA 4 Juni 2018
190	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Cege Kecamatan Mare TA.2017	700/704/148/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/215/VI/ITDA 4 Juni 2018
191	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Mattampa WaliE Kecamatan Mare TA.2017	700/704/148/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/216/VI/ITDA 4 Juni 2018
192	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Kadai Kecamatan Mare TA.2017	700/704/149/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/217/VI/ITDA 4 Juni 2018
193	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Tellu BoccoE Kecamatan Mare TA.2017	700/704/149/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/218/VI/ITDA 4 Juni 2018
194	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Ujung Salangketo Kecamatan Mare TA.2017	700/704/149/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/219/VI/ITDA 4 Juni 2018
195	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Mario Kecamatan Mare TA.2017	700/704/149/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/220/VI/ITDA 4 Juni 2018
196	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Karella Kecamatan Mare TA.2017	700/704/149/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/221/VI/ITDA 4 Juni 2018
197	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Lapasa Kecamatan Mare TA.2017	700/704/149/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/222/VI/ITDA 4 Juni 2018
198	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Batu Gading Kecamatan Mare TA.2017	700/704/149/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/223/VI/ITDA 4 Juni 2018
199	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Lappa Upang Kecamatan Mare TA.2017	700/704/149/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/224/VI/ITDA 4 Juni 2018
200	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja TA.2017	700/704/150/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/225/VI/ITDA 4 Juni 2018
201	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Liliriattang Kecamatan Lappariaja TA.2017	700/704/150/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/226/VI/ITDA 4 Juni 2018
202	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Sengeng PaliE Kecamatan Lappariaja TA.2017	700/704/150/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/227/VI/ITDA 4 Juni 2018

No.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
203	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Tenri Pakkua Kecamatan Lappariaja TA.2017	700/704/150/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/228/VI/ITDA 4 Juni 2018
204	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Patangkai Kecamatan Lappariaja TA.2017	700/704/150/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/229/VI/ITDA 4 Juni 2018
205	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Tonronge Kecamatan Lappariaja TA.2017	700/704/150/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/230/VI/ITDA 4 Juni 2018
206	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Ujung Lamuru Kecamatan Lappariaja TA.2017	700/704/150/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/231/VI/ITDA 4 Juni 2018
207	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Pattuku Limpoe Kecamatan Lappariaja TA.2017	700/704/150/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/232/VI/ITDA 4 Juni 2018
208	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Waেকে'e Kecamatan Lappariaja TA.2017	700/704/150/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/233/VI/ITDA 4 Juni 2018
209	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Samaenre Kecamatan Bengo TA.2017	700/704/151/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/234/VI/ITDA 4 Juni 2018
210	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Tungke Kecamatan Bengo TA.2017	700/704/151/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/235/VI/ITDA 4 Juni 2018
211	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Selli Kecamatan Bengo TA.2017	700/704/151/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/236/VI/ITDA 4 Juni 2018
212	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Bengo Kecamatan Bengo TA.2017	700/704/151/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/237/VI/ITDA 4 Juni 2018
213	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Mattaropuli Kecamatan Bengo TA.2017	700/704/151/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/238/VI/ITDA 4 Juni 2018
214	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Lilirawang Kecamatan Bengo TA.2017	700/704/151/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/239/VI/ITDA 4 Juni 2018
215	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Walimpong Kecamatan Bengo TA.2017	700/704/151/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/240/VI/ITDA 4 Juni 2018
216	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Bulu Allaporenge Kecamatan Bengo TA.2017	700/704/151/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/241/VI/ITDA 4 Juni 2018
217	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Mattirowalie Kecamatan Bengo TA.2017	700/704/151/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/242/VI/ITDA 4 Juni 2018
218	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Malimongeng Kecamatan Salomekko TA.2017	700/704/152/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/243/VI/ITDA 4 Juni 2018
219	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Manera Kecamatan Salomekko TA.2017	700/704/152/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/244/VI/ITDA 4 Juni 2018
220	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko TA.2017	700/704/152/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/245/VI/ITDA 4 Juni 2018
221	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Gattareng Kecamatan Salomekko TA.2017	700/704/152/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/246/VI/ITDA 4 Juni 2018
222	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Bellu Kecamatan Salomekko TA.2017	700/704/152/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/247/VI/ITDA 4 Juni 2018
223	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Tebba Kecamatan Salomekko TA.2017	700/704/152/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/248/VI/ITDA 4 Juni 2018
224	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa mappatoba Kecamatan Salomekko TA.2017	700/704/152/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/249/VI/ITDA 4 Juni 2018
225	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Patimpeng Kecamatan Patimpeng TA.2017	700/704/153/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/250/VI/ITDA 4 Juni 2018
226	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Latellang Kecamatan Patimpeng TA.2017	700/704/153/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/251/VI/ITDA 4 Juni 2018
227	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Maddenrengpulu Kecamatan Patimpeng TA.2017	700/704/153/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/252/VI/ITDA 4 Juni 2018
228	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Masago Kecamatan Patimpeng TA.2017	700/704/153/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/253/VI/ITDA 4 Juni 2018
229	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Batu Lappa Kecamatan Patimpeng TA.2017	700/704/153/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/254/VI/ITDA 4 Juni 2018
230	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Pacing Kecamatan Patimpeng TA.2017	700/704/153/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/255/VI/ITDA 4 Juni 2018
231	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Massila Kecamatan Patimpeng TA.2017	700/704/153/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/256/VI/ITDA 4 Juni 2018
232	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Talabangi Kecamatan Patimpeng TA.2017	700/704/153/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/257/VI/ITDA 4 Juni 2018
233	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Pationgi Kecamatan Patimpeng TA.2017	700/704/153/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/258/VI/ITDA 4 Juni 2018

No.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
234	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Bulu Ulaweng Kecamatan Patimpeng TA.2017	700/704/153/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/259/VI/ITDA 4 Juni 2018
235	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Matuju Kecamatan Awangpone TA.2017	700/704/154/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/260/VI/ITDA 4 Juni 2018
236	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Kading Kecamatan Awangpone TA.2017	700/704/154/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/261/VI/ITDA 4 Juni 2018
237	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Carigading Kecamatan Awangpone TA.2017	700/704/154/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/262/VI/ITDA 4 Juni 2018
238	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Kajuara Kecamatan Awangpone TA.2017	700/704/154/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/263/VI/ITDA 4 Juni 2018
239	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Lattekko Kecamatan Awangpone TA.2017	700/704/154/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/264/VI/ITDA 4 Juni 2018
240	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Cumpiga Kecamatan Awangpone TA.2017	700/704/154/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/265/VI/ITDA 4 Juni 2018
241	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Abbanuang Kecamatan Awangpone TA.2017	700/704/154/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/266/VI/ITDA 4 Juni 2018
242	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Bulumpare'e Kecamatan Awangpone TA.2017	700/704/154/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/267/VI/ITDA 4 Juni 2018
243	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Mallari Kecamatan Awangpone TA.2017	700/704/155/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/268/VI/ITDA 4 Juni 2018
244	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Cakke Bone Kecamatan Awangpone TA.2017	700/704/155/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/269/VI/ITDA 4 Juni 2018
245	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Pacing Kecamatan Awangpone TA.2017	700/704/155/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/270/VI/ITDA 4 Juni 2018
246	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Jaling Kecamatan Awangpone TA.2017	700/704/155/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/271/VI/ITDA 4 Juni 2018
247	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Lappoase Kecamatan Awangpone TA.2017	700/704/155/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/272/VI/ITDA 4 Juni 2018
248	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Mappalo Ulaweng Kecamatan Awangpone TA.2017	700/704/155/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/273/VI/ITDA 4 Juni 2018
249	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Unra Kecamatan Awangpone TA.2017	700/704/155/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/274/VI/ITDA 4 Juni 2018
250	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Awolagading Kecamatan Awangpone TA.2017	700/704/155/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/275/VI/ITDA 4 Juni 2018
251	Pemeriksaan ADD/APBDesa Desa Carebbu Kecamatan Awangpone TA.2017	700/704/155/V/2018 3 Mei 2018	7 s.d. 23 Mei 2018	793.04/276/VI/ITDA 4 Juni 2018
252	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	700/704/175/VI/2018 21 Juni 2018	25 Juni s/d 11 Juli 2018	793.04/281/VII/ITDA 16 Juli 2018
253	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bone	700/704/176/VI/2018 21 Juni 2018	25 Juni s/d 11 Juli 2018	793.04/282/VII/ITDA 16 Juli 2018
254	Dinas Perindustrian Kab. Bone	700/704/177/VI/2018 21 Juni 2018	25 Juni s/d 11 Juli 2018	793.04/283/VII/ITDA 16 Juli 2018
255	Dinas Kesehatan Kab. Bone	700/704/178/VI/2018 21 Juni 2018	25 Juni s/d 11 Juli 2018	793.04/284/VII/ITDA 16 Juli 2018
256	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bone	700/704/179/VI/2018 21 Juni 2018	25 Juni s/d 11 Juli 2018	793.04/285/VII/ITDA 16 Juli 2018
257	Sekretariat DPRD Kab. Bone	700/704/180/VI/2018 21 Juni 2018	25 Juni s/d 11 Juli 2018	793.04/286/VII/ITDA 16 Juli 2018
258	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Bone	700/704/181/VI/2018 21 Juni 2018	25 Juni s/d 11 Juli 2018	793.04/287/VII/ITDA 16 Juli 2018
259	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	700/704/182/VI/2018 21 Juni 2018	25 Juni s/d 11 Juli 2018	793.04/288/VII/ITDA 16 Juli 2018
260	Pemeriksaan ADD/APBDesa Bulu-Bulu Kec. Tonra Kab. Bone T.A. 2017	700/704/198/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/292/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
261	Pemeriksaan ADD/APBDesa Gareccing Kec. Tonra Kab. Bone T.A. 2017	700/704/198/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/293/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
262	Pemeriksaan ADD/APBDesa Bicoing Kec. Tonra Kab. Bone T.A. 2017	700/704/198/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/294/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
263	Pemeriksaan ADD/APBDesa Ujunge Kec. Tonra Kab. Bone T.A. 2017	700/704/198/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/295/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
264	Pemeriksaan ADD/APBDesa Libureng Kec. Tonra Kab. Bone T.A. 2017	700/704/198/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/296/VIII/ITDA 13 Agustus 2018

No.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
265	Pemeriksaan ADD/APBDesa Rappa Kec. Tonra Kab. Bone T.A. 2017	700/704/198/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/297/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
266	Pemeriksaan ADD/APBDesa Bacu Kec. Tonra Kab. Bone T.A. 2017	700/704/198/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/298/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
267	Pemeriksaan ADD/APBDesa Muara Kec. Tonra Kab. Bone T.A. 2017	700/704/198/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/299/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
268	Pemeriksaan ADD/APBDesa Bone Pute Kec. Tonra Kab. Bone T.A. 2017	700/704/198/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/300/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
269	Pemeriksaan ADD/APBDesa Padatuo Kec. Tonra Kab. Bone T.A. 2017	700/704/198/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/301/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
270	Pemeriksaan ADD/APBDesa Samaenre Kec. Tonra Kab. Bone T.A. 2017	700/704/198/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/302/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
271	Pemeriksaan ADD/APBDesa Arasoe Kec. Cina Kab. Bone T.A. 2017	700/704/199/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/302.a/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
272	Pemeriksaan ADD/APBDesa Tanete harapan Kec. Cina Kab. Bone T.A. 2017	700/704/199/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/303/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
273	Pemeriksaan ADD/APBDesa Lompu Kec. Cina Kab. Bone T.A. 2017	700/704/199/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/304/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
274	Pemeriksaan ADD/APBDesa Walenreng Kec. Cina Kab. Bone T.A. 2017	700/704/199/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/305/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
275	Pemeriksaan ADD/APBDesa Ajangpulu Kec. Cina Kab. Bone T.A. 2017	700/704/199/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/306/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
276	Pemeriksaan ADD/APBDesa Padang Loang Kec. Cina Kab. Bone T.A. 2017	700/704/199/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/307/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
277	Pemeriksaan ADD/APBDesa Kawerang Kec. Cina Kab. Bone T.A. 2017	700/704/199/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/308/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
278	Pemeriksaan ADD/APBDesa Awo Kec. Cina Kab. Bone T.A. 2017	700/704/199/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/309/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
279	Pemeriksaan ADD/APBDesa Kanco Kec. Cina Kab. Bone T.A. 2017	700/704/199/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/310/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
280	Pemeriksaan ADD/APBDesa Abbumpungeng Kec. Cina Kab. Bone T.A. 2017	700/704/199/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/311/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
281	Pemeriksaan ADD/APBDesa Cinennung Kec. Cina Kab. Bone T.A. 2017	700/704/199/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/312/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
282	Pemeriksaan ADD/APBDesa Mattampa Walie Kec. Lamuru Kab. Bone T.A. 2017	700/704/200/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/313/VIII/ITDA 20 September 2018
283	Pemeriksaan ADD/APBDesa Poleonro Kec. Lamuru Kab. Bone T.A. 2017	700/704/200/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/314/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
284	Pemeriksaan ADD/APBDesa Sengeng Palie Kec. Lamuru Kab. Bone T.A. 2017	700/704/200/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/315/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
285	Pemeriksaan ADD/APBDesa Mattampa Bulu Kec. Lamuru Kab. Bone T.A. 2017	700/704/200/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/316/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
286	Pemeriksaan ADD/APBDesa Turu Cinnae Kec. Lamuru Kab. Bone T.A. 2017	700/704/200/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/317/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
287	Pemeriksaan ADD/APBDesa Seberang Kec. Lamuru Kab. Bone T.A. 2017	700/704/200/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/318/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
288	Pemeriksaan ADD/APBDesa Massenreng Pulu Kec. Lamuru Kab. Bone T.A. 2017	700/704/200/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/319/VIII/ITDA 30 Agustus 2018
289	Pemeriksaan ADD/APBDesa Mamminasae Kec. Lamuru Kab. Bone T.A. 2017	700/704/200/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/320/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
290	Pemeriksaan ADD/APBDesa Padaelo Kec. Lamuru Kab. Bone T.A. 2017	700/704/200/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/321/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
291	Pemeriksaan ADD/APBDesa Barugae Kec. Lamuru Kab. Bone T.A. 2017	700/704/200/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/322/VIII/ITDA 16 Agustus 2018
292	Pemeriksaan ADD/APBDesa Barakkae Kec. Lamuru Kab. Bone T.A. 2017	700/704/200/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/323/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
293	Pemeriksaan ADD/APBDesa Tellang Kere Kec. Tellu LimpoE Kab. Bone T.A. 2017	700/704/201/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/324/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
294	Pemeriksaan ADD/APBDesa Lagori Kec. Tellu LimpoE Kab. Bone T.A. 2017	700/704/201/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/325/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
295	Pemeriksaan ADD/APBDesa Gaya Baru Kec. Tellu LimpoE Kab. Bone T.A. 2017	700/704/201/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/326/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
296	Pemeriksaan ADD/APBDesa Tapong Kec. Tellu LimpoE Kab. Bone T.A. 2017	700/704/201/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/327/VIII/ITDA 13 Agustus 2018

No.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
297	Pemeriksaan ADD/APBDesa Sadar Kec. Tellu LimpoE Kab. Bone T.A. 2017	700/704/201/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/328/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
298	Pemeriksaan ADD/APBDesa Tondong Kec. Tellu LimpoE Kab. Bone T.A. 2017	700/704/201/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/329/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
299	Pemeriksaan ADD/APBDesa Samaenre Kec. Tellu LimpoE Kab. Bone T.A. 2017	700/704/201/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/330/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
300	Pemeriksaan ADD/APBDesa Bonto Masunggu Kec. Tellu LimpoE Kab. Bone T.A. 2017	700/704/201/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/331/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
301	Pemeriksaan ADD/APBDesa Pallawa Kec. Tellu LimpoE Kab. Bone T.A. 2017	700/704/201/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/332/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
302	Pemeriksaan ADD/APBDesa Polewali Kec. Tellu LimpoE Kab. Bone T.A. 2017	700/704/201/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/333/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
303	Pemeriksaan ADD/APBDesa Batu Putih Kec. Tellu LimpoE Kab. Bone T.A. 2017	700/704/201/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/334/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
304	Pemeriksaan ADD/APBDesa Parippung Kec. Barebbo Kab. Bone T.A. 2017	700/704/202/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/335/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
305	Pemeriksaan ADD/APBDesa Barebbo Kec. Barebbo Kab. Bone T.A. 2017	700/704/202/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/336/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
306	Pemeriksaan ADD/APBDesa Kampuno Kec. Barebbo Kab. Bone T.A. 2017	700/704/202/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/337/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
307	Pemeriksaan ADD/APBDesa Kading Kec. Barebbo Kab. Bone T.A. 2017	700/704/202/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/338/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
308	Pemeriksaan ADD/APBDesa Samaelo Kec. Barebbo Kab. Bone T.A. 2017	700/704/202/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/339/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
309	Pemeriksaan ADD/APBDesa Kajaolaliddong Kec. Barebbo Kab. Bone T.A. 2017	700/704/202/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/340/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
310	Pemeriksaan ADD/APBDesa Sugiale Kec. Barebbo Kab. Bone T.A. 2017	700/704/202/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/341/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
311	Pemeriksaan ADD/APBDesa Watu Kec. Barebbo Kab. Bone T.A. 2017	700/704/202/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/342/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
312	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Bacu Kec. Barebbo Kab. Bone T.A. 2017	700/704/203/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/343/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
313	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Lampoko Kec. Barebbo Kab. Bone T.A. 2017	700/704/203/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/344/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
314	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Congko Kec. Barebbo Kab. Bone T.A. 2017	700/704/203/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/345/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
315	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Wollangi Kec. Barebbo Kab. Bone T.A. 2017	700/704/203/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/346/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
316	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Cingkang Kec. Barebbo Kab. Bone T.A. 2017	700/704/203/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/347/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
317	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Cinnong Kec. Barebbo Kab. Bone T.A. 2017	700/704/203/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/348/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
318	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Cempniga Kec. Barebbo Kab. Bone T.A. 2017	700/704/203/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/349/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
319	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Corawali Kec. Barebbo Kab. Bone T.A. 2017	700/704/203/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/350/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
320	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Tempe Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A. 2017	700/704/204/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/351/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
321	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Cabbeng Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A. 2017	700/704/204/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/352/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
322	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Panyili Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A. 2017	700/704/204/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/353/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
323	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Mario Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A. 2017	700/704/204/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/354/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
324	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Praja Maju Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A. 2017	700/704/204/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/355/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
325	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Lallatang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A. 2017	700/704/204/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/356/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
326	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Sailong Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A. 2017	700/704/204/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/357/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
327	Pemeriksaan ADD/APBDesa Di Desa Sanrangeng Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A. 2017	700/704/204/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/358/VIII/ITDA 13 Agustus 2018

No.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
328	Pemeriksaan ADD/APBDesa Padacengnga Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A. 2017	700/704/204/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/359/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
329	Pemeriksaan ADD/APBDesa watang Padacengnga Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A. 2017	700/704/204/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/360/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
330	Pemeriksaan ADD/APBDesa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A. 2017	700/704/204/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/361/VIII/ITDA 13 Agustus 2018
331	Pemeriksaan ADD/APBDesa Pattiro Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A. 2017	700/704/205/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/362/VIII/ITDA 29 Agustus 2018
332	Pemeriksaan ADD/APBDesa Kampoti Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A. 2017	700/704/205/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/363/VIII/ITDA 29 Agustus 2018
333	Pemeriksaan ADD/APBDesa Tocina Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A. 2017	700/704/205/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/364/VIII/ITDA 29 Agustus 2018
334	Pemeriksaan ADD/APBDesa Tawaroe Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A. 2017	700/704/205/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/365/VIII/ITDA 29 Agustus 2018
335	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Laccori Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A. 2017	700/704/205/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	
336	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Uloe Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A. 2017	700/704/205/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/367/VIII/ITDA 29 Agustus 2018
337	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Solo Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A. 2017	700/704/205/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/366/VIII/ITDA 29 Agustus 2018
338	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Ujung Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A. 2017	700/704/205/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/368/VIII/ITDA 29 Agustus 2018
339	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Pakkasalo Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A. 2017	700/704/205/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/369/VIII/ITDA 29 Agustus 2018
340	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Melle Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A. 2017	700/704/205/VII/2018 20 Juli 2018	24 Juli s/d 8 Agustus 2018	793.04/370/VIII/ITDA 29 Agustus 2018
341	Pemeriksaan Komprehensif T.A 2017/2018 pada Dinas Perdagangan Kab. Bone	700/704/235/VIII/2018 23 Agustus 2018	27 Agst s/d 12 Sept 2018	793.04/380/IX/ITDA 17 September 2018
342	Pemeriksaan Komprehensif T.A 2017/2018 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bone	700/704/238/VIII/2018 23 Agustus 2018	27 Agst s/d 12 Sept 2018	793.04/391/IX/ITDA 17 September 2018
343	Pemeriksaan Komprehensif T.A 2017/2018 pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	700/704/240/VIII/2018 23 Agustus 2018	27 Agst s/d 12 Sept 2018	793.04/396/IX/ITDA 17 September 2018
344	Pemeriksaan Komprehensif T.A 2017/2018 pada Dinas Peternakan Kab. Bone	700/704/242/VIII/2018 23 Agustus 2018	27 Agst s/d 12 Sept 2018	793.04/402/IX/ITDA 17 September 2018
345	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Pattuku Kec. Bontocani Kab. Bone T.A. 2017	700/704/260/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/406/X/ITDA 15 Oktober 2018
346	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Langi Kec. Bontocani Kab. Bone T.A. 2017	700/704/260/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/407/X/ITDA 15 Oktober 2018
347	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Mattirowalie Kec. Bontocani Kab. Bone T.A. 2017	700/704/260/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/408/X/ITDA 15 Oktober 2018
348	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Watang cani Kec. Bontocani Kab. Bone T.A. 2017	700/704/260/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/409/X/ITDA 15 Oktober 2018
349	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Ere Cinnong Kec. Bontocani Kab. Bone T.A. 2017	700/704/260/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/410/X/ITDA 15 Oktober 2018
350	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Bana Kec. Bontocani Kab. Bone T.A. 2017	700/704/261/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/411/X/ITDA 15 Oktober 2018
351	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Pammusureng Kec. Bontocani Kab. Bone T.A. 2017	700/704/261/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/412/X/ITDA 15 Oktober 2018
352	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Bulu Sirua Kec. Bontocani Kab. Bone T.A. 2017	700/704/261/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/413/X/ITDA 15 Oktober 2018
353	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Bontojai Kec. Bontocani Kab. Bone T.A. 2017	700/704/261/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/414/X/ITDA 15 Oktober 2018
354	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Lamoncong Kec. Bontocani Kab. Bone T.A. 2017	700/704/261/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/415/X/ITDA 15 Oktober 2018

No.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
355	Pemeriksaan Komprehensif T.A 2017/2018 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone	700/704/262/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/416/X/ITDA 12 November 2018
356	Pemeriksaan Komprehensif T.A 2017/2018 pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bone	700/704/263/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/417/X/ITDA 15 Oktober 2018
357	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Mappesangka Kec. Ponre Kab. Bone T.A. 2017	700/704/264/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/418/X/ITDA 15 Oktober 2018
358	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Salebba Kec. Ponre Kab. Bone T.A. 2017	700/704/264/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/419/X/ITDA 15 Oktober 2018
359	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Mattampae Kec. Ponre Kab. Bone T.A. 2017	700/704/264/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/420/X/ITDA 15 Oktober 2018
360	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Pattimpa Kec. Ponre Kab. Bone T.A. 2017	700/704/264/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/421/X/ITDA 15 Oktober 2018
361	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Tellu Boccoe Kec. Ponre Kab. Bone T.A. 2017	700/704/264/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/422/X/ITDA 15 Oktober 2018
362	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Turu Adae Kec. Ponre Kab. Bone T.A. 2017	700/704/264/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/423/X/ITDA 15 Oktober 2018
363	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Salampe Kec. Ponre Kab. Bone T.A. 2017	700/704/264/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/424/X/ITDA 15 Oktober 2018
364	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Poleonro Kec. Ponre Kab. Bone T.A. 2017	700/704/264/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/425/X/ITDA 15 Oktober 2018
365	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Bolli Kec. Ponre Kab. Bone T.A. 2017	700/704/264/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/426/X/ITDA 15 Oktober 2018
366	Pemeriksaan Komprehensif T.A 2017/2018 pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Bone	700/704/265/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/427/X/ITDA 15 Oktober 2018
367	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Ureng Kec. Palakka Kab. Bone T.A. 2017	700/704/266/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/438/X/ITDA 15 Oktober 2018
368	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Mico Kec. Palakka Kab. Bone T.A. 2017	700/704/266/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/439/X/ITDA 15 Oktober 2018
369	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Tanah Tengah Kec. Palakka Kab. Bone T.A. 2017	700/704/266/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/440/X/ITDA 15 Oktober 2018
370	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Tirong Kec. Palakka Kab. Bone T.A. 2017	700/704/266/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/441/X/ITDA 15 Oktober 2018
371	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Panyili Kec. Palakka Kab. Bone T.A. 2017	700/704/266/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/442/X/ITDA 15 Oktober 2018
372	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Maduri Kec. Palakka Kab. Bone T.A. 2017	700/704/266/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/443/X/ITDA 15 Oktober 2018
373	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Melle Kec. Palakka Kab. Bone T.A. 2017	700/704/266/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/444/X/ITDA 15 Oktober 2018
374	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Siame Kec. Palakka Kab. Bone T.A. 2017	700/704/267/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/445/X/ITDA 15 Oktober 2018
375	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Cinenung Kec. Palakka Kab. Bone T.A. 2017	700/704/267/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/446/X/ITDA 15 Oktober 2018
376	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Pasempe Kec. Palakka Kab. Bone T.A. 2017	700/704/267/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/447/X/ITDA 15 Oktober 2018
377	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Lemoape Kec. Palakka Kab. Bone T.A. 2017	700/704/267/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/448/X/ITDA 15 Oktober 2018
378	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa USA Kec. Palakka Kab. Bone T.A. 2017	700/704/267/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/449/X/ITDA 15 Oktober 2018
379	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Bainang Kec. Palakka Kab. Bone T.A. 2017	700/704/267/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/450/X/ITDA 15 Oktober 2018
380	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Passippo Kec. Palakka Kab. Bone T.A. 2017	700/704/267/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/451/X/ITDA 15 Oktober 2018
381	Pemeriksaan ADD/APBDesa di Desa Mattanetebua Kec. Palakka Kab. Bone T.A. 2017	700/704/267/IX/2018 14 September 2018	18 Sept s/d 3 Okt 2018	793.04/452/X/ITDA 15 Oktober 2018
382	Audit Kinerja Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Semester I T.A 2018 Pada Dinas Kesehatan Kab. Bone	700/704/320/X/2018 18 Oktober 2018	22 Okt s/d 6 Nov 2018	793.04/454/AK/XI/ITDA 9 November 2018
383	Audit Kinerja Program Dana Bantuan Operasional Sekolah Semester 1 T.A. 2018 Pada Dinas Pendidikan Kab. Bone	700/704/321/X/2018 18 Oktober 2018	22 Okt s/d 6 Nov 2018	793.04/455/AK/XI/ITDA 9 November 2018

No.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
384	Pemeriksaan Komprehensif T.A 2017/2018 pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Kab. Bone	700/704/323/X/2018 18 Oktober 2018	22 Okt s/d 6 Nov 2018	793.04/456/X/ITDA 9 November 2018
385	Pemeriksaan Komprehensif T.A 2017/2018 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone	700/704/324/X/2018 18 Oktober 2018	22 Okt s/d 6 Nov 2018	793.04/457/XI/ITDA 9 November 2018
386	Pemeriksaan Komprehensif T.A 2017/2018 pada PDAM Wae Manurung Kab. Bone	700/704/325/X/2018 18 Oktober 2018	22 Okt s/d 6 Nov 2018	793.04/458/XI/ITDA 9 November 2018
387	Pemeriksaan dengan Audit tujuan tertentu T.A 2017 APBDesa di Desa Welado Kecamatan Ajangale Kab. Bone	700/704/326/X/2018 18 Oktober 2018	22 Okt s/d 6 Nov 2018	793.04/459/XI/ITDA 19 November 2018
388	Pemeriksaan dengan Audit tujuan tertentu T.A 2017 APBDesa di Desa Pinceng Pute Kecamatan Ajangale Kab. Bone	700/704/326/X/2018 18 Oktober 2018	22 Okt s/d 6 Nov 2018	793.04/460/XI/ITDA 19 November 2018
389	Pemeriksaan dengan Audit tujuan tertentu T.A 2017 APBDesa di Desa Ammesangeng Kecamatan Ajangale Kab. Bone	700/704/326/X/2018 18 Oktober 2018	22 Okt s/d 6 Nov 2018	793.04/461/XI/ITDA 19 November 2018
390	Pemeriksaan dengan Audit tujuan tertentu T.A 2017 APBDesa di Desa Pacciro Kecamatan Ajangale Kab. Bone	700/704/326/X/2018 18 Oktober 2018	22 Okt s/d 6 Nov 2018	793.04/462/XI/ITDA 19 November 2018
391	Pemeriksaan dengan Audit tujuan tertentu T.A 2017 APBDesa di Desa Labissa Kecamatan Ajangale Kab. Bone	700/704/326/X/2018 18 Oktober 2018	22 Okt s/d 6 Nov 2018	793.04/463/XI/ITDA 19 November 2018
392	Pemeriksaan dengan Audit tujuan tertentu T.A 2017 APBDesa di Desa Manciri Kecamatan Ajangale Kab. Bone	700/704/327/X/2018 18 Oktober 2018	22 Okt s/d 6 Nov 2018	793.04/464/XI/ITDA 19 November 2018
393	Pemeriksaan dengan Audit tujuan tertentu T.A 2017 APBDesa di Desa Lebbae Kecamatan Ajangale Kab. Bone	700/704/327/X/2018 18 Oktober 2018	22 Okt s/d 6 Nov 2018	793.04/465/XI/ITDA 19 November 2018
394	Pemeriksaan dengan Audit tujuan tertentu T.A 2017 APBDesa di Desa Leppangeng Kecamatan Ajangale Kab. Bone	700/704/327/X/2018 18 Oktober 2018	22 Okt s/d 6 Nov 2018	793.04/466/XI/ITDA 19 November 2018
395	Pemeriksaan dengan Audit tujuan tertentu T.A 2017 APBDesa di Desa Allamungeng Patue Kecamatan Ajangale Kab. Bone	700/704/327/X/2018 18 Oktober 2018	22 Okt s/d 6 Nov 2018	793.04/467/XI/ITDA 19 November 2018
396	Pemeriksaan dengan Audit tujuan tertentu T.A 2017 APBDesa di Desa Opo Kecamatan Ajangale Kab. Bone	700/704/327/X/2018 18 Oktober 2018	22 Okt s/d 6 Nov 2018	793.04/468/XI/ITDA 19 November 2018
397	Pemeriksaan Komprehensif T.A 2017/2018 pada Sekretariat Daerah Kab. Bone	700/704/371/XII/2018 4 Desember 2018	6 Des s/d 21 Des 2018	793.04/541/XII/ITDA 28 Desember 2018
398	Pemeriksaan Komprehensif T.A 2017/2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bone	700/704/372/XII/2018 4 Desember 2018	6 Des s/d 21 Des 2018	793.04/542/XII/ITDA 28 Desember 2018
399	Pemeriksaan Komprehensif T.A 2017/2018 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Bone	700/704/373/XII/2018 4 Desember 2018	6 Des s/d 21 Des 2018	793.04/543/XII/ITDA 28 Desember 2018
400	Pemeriksaan Komprehensif T.A 2017/2018 pada BLUD RS. Tenriawaru Kab. Bone	700/704/374/XII/2018 4 Desember 2018	6 Des s/d 21 Des 2018	793.04/544/XII/ITDA 28 Desember 2018



DAFTAR REALISASI PELAKSANAAN PKPT TAHUN 2018 INSPEKTORAT KAB. BONE
(REVIU, EVALUASI , MONITORING, DAN KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA)

No.	OBJEK PEMERIKSAAN (SKPD)	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO.DAN TGL. LHP
REVIU dan EVALUASI				
1.	Reviu Laporan Keuangan (LKPD) Kab. Bone di DPKAD Kab. Bone	700 / 704 / 79 / III / 2018 2 Maret 2018	6 s/d 21 Maret 2018	793.04/69/III/ITDA 27 Maret 2018
2.	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Bagian Ekonomi Setda Kab. Bone	700 / 704 / 80 / III / 2018 2 Maret 2018	6 s/d 21 Maret 2018	793.04/70/III/ITDA 28 Maret 2018
3.	Reviu Rancangan Akhir RKPD Kab. Bone tahun 2019	700 / 704 / 164 / V / 2018 24 Mei 2018	28 Mei s/d 6 Juni 2018	793.04/206/VI/ITDA 7 Juni 2018
4.	Reviu Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA. 2019 dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Semester) APBD TA.2019	700/704/220/VIII/2018 09 Agustus 2018	10 s/d 16 Agustus 2018	781.04/373/VIII/ITDA 20 Agustus 2018
5	Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) th. 2017 pada SKPD a. Litbang,	700/704/236/VIII/2018 23 Agustus 2018	27 Agst s/d 12 Sept 2018	793.04/381/IX/ITDA 17 September 2018
	b. DAMKAR			793.04/382/IX/ITDA 17 September 2018
	c. Dinas Perdagangan,			793.04/383/IX/ITDA 17 September 2018
	d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,			793.04/384/IX/ITDA 17 September 2018
	e. Dinas Pendidikan, dan			793.04/385/IX/ITDA 17 September 2018
	f. Kantor Camat Tanete Riattang			793.04/386/IX/ITDA 17 September 2018
6	Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) th. 2017 pada SKPD a. Dinas Kelautan, dan Perikanan,	700/704/237/VIII/2018 23 Agustus 2018	27 Agst s/d 12 Sept 2018	Dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
	b. Dinas Lingkungan Hidup Daerah			Dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
	c. Dinas Sosial			793.04/387/IX/ITDA 17 September 2018
	d. Dinas Kepemudaan dan Olahraga			793.04/388/IX/ITDA 17 September 2018
	e. Dinas Perindustrian			793.04/389/IX/ITDA 17 September 2018
	f. Kantor Camat Uluweng			793.04/390/IX/ITDA 17 September 2018
7	Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) th. 2017 pada SKPD a. Badan Pendapatan Daerah	700/704/239/VIII/2018 23 Agustus 2018	27 Agst s/d 12 Sept 2018	793.04/392/IX/ITDA 17 September 2018
	b. Dinas Tenaga Kerja			793.04/393/IX/ITDA 17 September 2018
	c. Dinas Kepemudaan dan Pencatatan Sipil			Dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
	d. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			793.04/394/IX/ITDA 17 September 2018
	e. Dinas Pengelolaan Sumber daya Air			Dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
	f. Kantor Camat Barebbo			793.04/395/IX/ITDA 17 September 2018

No.	OBJEK PEMERIKSAAN (SKPD)	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO.DAN TGL. LHP
8	Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) th. 2017 pada SKPD a. Dinas PU dan Penataan Ruang	700/704/241/VIII/2018 23 Agustus 2018	27 Agst s/d 12 Sept 2018	Dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
	b. Dinas Perumahan, kawasan Pemukiman dan Pertanahan			793.04/395/IX/ITDA 17 September 2018
	c. Dinas BKPSDM			793.04/398/IX/ITDA 17 September 2018
	d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah			793.04/399/IX/ITDA 17 September 2018
	e. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah			793.04/400/IX/ITDA 17 September 2018
	f. Kantor Camat Awangpone			793.04/401/IX/ITDA 17 September 2018
9	Reviu Rancangan Akhir RKA SKPD TA.2019 Lingkup Pemerintah Kab. Bone a. Sekretariat Daerah	700/704/355/XI/2018 16 November 2018	21 Nov s/d 03 Des 2018	793.04/475/RKA/XI/ITDA 2018
	b. BAPPEDA			793.04/476/RKA/XI/ITDA 2018
	c. BALITBANGDA			793.04/477/RKA/XI/ITDA 2018
	d. KESBANGPOL			793.04/478/RKA/XI/ITDA 2018
	e. DAMKAR			793.04/479/RKA/XI/ITDA 2018
	f. Kantor Kecamatan Tanete Riattang			793.04/480/RKA/XI/ITDA 2018
	g. Kantor Kecamatan Cina			793.04/481/RKA/XI/ITDA 2018
	h. Kantor Kecamatan Tonra			793.04/482/RKA/XI/ITDA 2018
	i. Kantor Kecamatan Mare			793.04/483/RKA/XI/ITDA 2018
10	Reviu Rancangan Akhir RKA SKPD TA.2019 Lingkup Pemerintah Kab. Bone a. Dinas Pendidikan	700/704/356/XI/2018 16 November 2018	21 Nov s/d 03 Des 2018	793.04/484/RKA/XI/ITDA
	b. Dinas Pengendalian pendudukan dan KB			793.04/485/RKA/XI/ITDA 2018
	c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan			793.04/486/RKA/XI/ITDA 2018
	d. Dinas Perdagangan			793.04/487/RKA/XI/ITDA 2018
	e. Dispeka			793.04/488/RKA/XI/ITDA 2018
	f. Kantor Kecamatan Kajuara			793.04/489/RKA/XI/ITDA 2018
	g. Kantor Kecamatan Kahu			793.04/490/RKA/XI/ITDA 2018
	h. Kantor Kecamatan Bontocani			793.04/491/RKA/XI/ITDA 2018

No.	OBJEK PEMERIKSAAN (SKPD)	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO.DAN TGL. LHP
11	Reviu Rancangan Akhir RKA SKPD TA.2019 Lingkup Pemerintah Kab. Bone	700/704/357/XI/2018 16 November 2018	21 Nov s/d 03 Des 2018	793.04/492/RKA/XI/ITDA 2018
	a. BPKAD			Tidak dilakukan reviu karena keterlambatan penyeteroran dokumen RKA oleh Dinas ybs kepada Tim Reviu ltda Bone.
	b. Dinas Kesehatan			
	c. Dinas Sosial			793.04/493/RKA/XI/ITDA 2018
	d. Dinas Lingkungan hidup			793.04/494/RKA/XI/ITDA 2018
	e. Dispora			793.04/495/RKA/XI/ITDA 2018
	f. Dinas Perhubungan			793.04/496/RKA/XI/ITDA 2018
	g. Kantor Kecamatan Ulaweng			793.04/497/RKA/XI/ITDA 2018
	h. Kantor Kecamatan Bengo			793.04/498/RKA/XI/ITDA 2018
	i. Kantor Kecamatan Lappariaja			793.04/499/RKA/XI/ITDA 2018
12	Reviu Rancangan Akhir RKA SKPD TA.2019 Lingkup Pemerintah Kab. Bone	700/704/358/XI/2018 16 November 2018	21 Nov s/d 03 Des 2018	793.04/500/RKA/XI/ITDA 2018
	a. Dinas Kelautan dan Perikanan			793.04/501/RKA/XI/ITDA 2018
	b. Dinas Perindustrian			
	c. Dinas Ketahanan Pangan			793.04/502/RKA/XI/ITDA 2018
	d. BLUD Rs. Tenriawaru			793.04/503/RKA/XI/ITDA 2018
	e. Kantor Kecamatan T.R.Barat			793.04/504/RKA/XI/ITDA 2018
	f. Kantor Kecamatan Amali			793.04/505/RKA/XI/ITDA 2018
	g. Kantor Kecamatan Lamuru			793.04/506/RKA/XI/ITDA 2018
	h. Kantor Kecamatan Tellu Limpoe			793.04/507/RKA/XI/ITDA 2018
13	Reviu Rancangan Akhir RKA SKPD TA.2019 Lingkup Pemerintah Kab. Bone	700/704/359/XI/2018 16 November 2018	21 Nov s/d 03 Des 2018	793.04/507/RKA/XI/ITDA 2018
	a. Sekretariat DPRD			793.04/509/RKA/XI/ITDA 2018
	b. Badan Pendapatan Daerah			
	c. Dinas Pengelola SDA			793.04/510/RKA/XI/ITDA 2018
	d. Dinas Tenaga Kerja			793.04/511/RKA/XI/ITDA 2018
	e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			793.04/512/RKA/XI/ITDA 2018
	f. Kantor Kecamatan T.R.Timur			793.04/513/RKA/XI/ITDA 2018
	g. Kantor Kecamatan Barebbo			793.04/514/RKA/XI/ITDA 2018
	h. Kantor Kecamatan Sibulue			793.04/515/RKA/XI/ITDA 2018

No.	OBJEK PEMERIKSAAN (SKPD)	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO.DAN TGL. LHP
14	Reviu Rancangan Akhir RKA SKPD TA.2019 Lingkup Pemerintah Kab. Bone a. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	700/704/360/XI/2018 16 November 2018	21 Nov s/d 03 Des 2018	793.04/516/RKA/XI/ITDA 2018
	b. Dinas Kebudayaan			793.04/517/RKA/XI/ITDA 2018
	c. Dinas Pertanian TanPan,Horti,perkebunan			793.04/518/RKA/XI/ITDA 2018
	d. SATPOL PP			793.04/519/RKA/XI/ITDA 2018
	e. Kantor Kecamatan Ponre			793.04/520/RKA/XI/ITDA 2018
	f. Kantor Kecamatan Salomekko			793.04/521/RKA/XI/ITDA 2018
	g. Kantor Kecamatan Patimpeng			793.04/522/RKA/XI/ITDA 2018
	h. Kantor Kecamatan Libureng			793.04/523/RKA/XI/ITDA 2018
15	Reviu Rancangan Akhir RKA SKPD TA.2019 Lingkup Pemerintah Kab. Bone a. BKPSDM	700/704/361/XI/2018 16 November 2018	21 Nov s/d 03 Des 2018	793.04/524/RKA/XI/ITDA 30 November 2018
	b. Badan Penanggulangan Bencana			793.04/525/RKA/XI/ITDA 2018
	c. Dinas PU dan Penataan Ruang			793.04/526/RKA/XI/ITDA 2018
	d. Dinas Pariwisata			793.04/527/RKA/XI/ITDA 2018
	e. Dinas Koperasi UKM			793.04/528/RKA/XI/ITDA 2018
	f. Kantor Kecamatan Palakka			793.04/529/RKA/XI/ITDA 2018
	g. Kantor Kecamatan Awangpone			793.04/530/RKA/XI/ITDA 2018
	h. Kantor Kecamatan Tellu Siattinge			793.04/531/RKA/XI/ITDA 2018
16	Reviu Rancangan Akhir RKA SKPD TA.2019 Lingkup Pemerintah Kab. Bone a. Inspektorat Daerah	700/704/362/XI/2018 16 November 2018	21 Nov s/d 03 Des 2018	793.04/532/RKA/XI/ITDA 23 November 2018
	b. Dinas Perumahan,Kawasan Pemukiman dan Pertanahan			793.04/533/RKA/XI/ITDA 2018
	c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			793.04/534/RKA/XI/ITDA 2018
	d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat			793.04/535/RKA/XI/ITDA 2018
	e. Dinas Peternakan			793.04/536/RKA/XI/ITDA 2018
	f. Kantor Kecamatan Dua Boccoe			793.04/537/RKA/XI/ITDA 2018
	g. Kantor Kecamatan Cenrana			793.04/538/RKA/XI/ITDA 2018
	h. Kantor Kecamatan Ajangale			793.04/539/RKA/XI/ITDA 2018

No.	OBJEK PEMERIKSAAN (SKPD)	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO.DAN TGL. LHP
PEMANTAUAN				
1.	<p>Pemantauan serentak Realisasi Pelaporan Keuangan beserta Opname kas dan Opname persediaan T.A. 2018 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bone :</p> <p>a. Sekretariat Daerah b. Dinas Pemadam Kebakaran c. Dinas Perdagangan d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik e. Kecamatan Tanete Riattang f. Kecamatan Tonra g. Kecamatan Kahu h. Kecamatan Bontocani</p>	<p>700/704/391/XII/2018 26 Desember 2018</p>	26 s/d 31 Des 2018	
2	<p>Pemantauan serentak Realisasi Pelaporan Keuangan beserta Opname kas dan Opname persediaan T.A. 2018 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bone :</p> <p>a. Dinas Pendidikan b. Dinas Pengendalian pendudukan dan KB c. Dinas Perpustakaan d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan satu pintu e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah f. Kecamatan Cina g. Kecamatan Mare h. Kecamatan Kajuara</p>	<p>700/704/392/XII/2018 26 Desember 2018</p>	26 s/d 31 Des 2018	
3	<p>Pemantauan serentak Realisasi Pelaporan Keuangan beserta Opname kas dan Opname persediaan T.A. 2018 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bone :</p> <p>a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah b. Dinas Sosial c. Dinas Perhubungan d. Dinas Kelautan dan Perikanan e. Dinas Ketahanan Pangan f. Kecamatan T. Riattang Barat g. Kecamatan Lappariaja h. Kecamatan Tellu limpoe i. Kecamatan Lamuru</p>	<p>700/704/393/XII/2018 26 Desember 2018</p>	26 s/d 31 Des 2018	
4	<p>Pemantauan serentak Realisasi Pelaporan Keuangan beserta Opname kas dan Opname persediaan T.A. 2018 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bone :</p> <p>a. Dinas Kesehatan b. Dinas Lingkungan Hidup c. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga d. Dinas Perindustrian e. BLUD Rumah Sakit Tenriawaru f. Kecamatan Ulaweng g. Kecamatan Bengo h. Kecamatan Amali</p>	<p>700/704/394/XII/2018 26 Desember 2018</p>	26 s/d 31 Des 2018	

No.	OBJEK PEMERIKSAAN (SKPD)	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO.DAN TGL. LHP
5	<p>Pemantauan serentak Realisasi Pelaporan Keuangan beserta Opname kas dan Opname persediaan T.A. 2018 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bone :</p> <p>a. Badan Pendapatan Daerah b. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air c. Dinas Tenaga Kerja d. Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian e. Satuan Polisi Pamong Praja f. Kecamatan Salomekko g. Kecamatan Patimpeng h. Kecamatan Libureng</p>	<p>700/704/395/XII/2018 26 Desember 2018</p>	26 s/d 31 Des 2018	
6	<p>Pemantauan serentak Realisasi Pelaporan Keuangan beserta Opname kas dan Opname persediaan T.A. 2018 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bone :</p> <p>a. Sekretariat DPRD b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil d. Dinas Kebudayaan e. PDAM Wae ManurungE f. Kecamatan T. Riattang Timur g. Kecamatan Barebbo h. Kecamatan Sibulue i. Kecamatan Ponre</p>	<p>700/704/396/XII/2018 26 Desember 2018</p>	26 s/d 31 Des 2018	
7	<p>Pemantauan serentak Realisasi Pelaporan Keuangan beserta Opname kas dan Opname persediaan T.A. 2018 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bone :</p> <p>a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang d. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak f. Kecamatan Awangpone g. Kecamatan Palakka</p>	<p>700/704/397/XII/2018 26 Desember 2018</p>	26 s/d 31 Des 2018	
8	<p>Pemantauan serentak Realisasi Pelaporan Keuangan beserta Opname kas dan Opname persediaan T.A. 2018 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bone :</p> <p>a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah c. Dinas Pariwisata d. Dinas Peternakan e. Kecamatan Tellu Siattinge f. Kecamatan Dua Boccoe g. Kecamatan Cenrana h. Kecamatan Ajangale</p>	<p>700/704/398/XII/2018 26 Desember 2018</p>	26 s/d 31 Des 2018	
KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA				
1.	Asistensi Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Desa di Kec. Cina (Arasoe, Walenreng, Kawerang, Abbumpungeng, dan Lompu) dan Kec. Lamuru (Seberang, Padaelo, Poleonro, mamminasae dan Barakkae)	<p>700 / 704 / 349 / XI / 2018 Tgl. 9 November 2018</p>	12 s/d 16 November 2018	



DAFTAR REALISASI PELAKSANAAN PKPT TAHUN 2018
(Pemeriksaan Khusus Kasus Kepegawaian dan Penanganan Pengaduan Masyarakat)

No.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
Pemeriksaan Kasus Permohonan Izin Perceraian PNS				
1	Melakukan Pemeriksaan khusus permohonan perceraian A.n. Drs. H. A. Ishanda, M.Si NIP. 19660913 199303 1 008 (Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone) terhadap istrinya Hj. A. Nurhasanah Bintang, S.Pd, M. Si.	700/704/04/II/2018 3 Januari 2018	5 s/d 11 Januari 2018	781.04/03/I/ITDA 15 Januari 2018
2	Melakukan Pemeriksaan khusus permohonan perceraian A.n. Asis, S.Pd NIP. 19641211 198602 1 005 (Kasi Kesetaraan Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kab. Bone) terhadap istrinya Heria.	700/704/05/I/2018 3 Januari 2018	5 s/d 11 Januari 2018	781.04/04/I/ITDA 15 Januari 2018
3	Melakukan Pemeriksaan khusus permohonan perceraian A.n. Murniati, S.Pd NIP. 19680504 200604 2 019 (Guru Muda SD No. 277 Palattae Kab. Bone) terhadap Suaminya Tasriful A.Kinas	700/704/06/I/2018 3 Januari 2018	5 s/d 11 Januari 2018	781.04/05/I/ITDA 15 Januari 2018
4	Melakukan Pemeriksaan khusus permohonan perceraian A.n. Sdri. Andi Nurhaeni, AMKL NIP. 19790421 201101 2 008 (sanitarian UPTD Puskesmas Mare) terhadap Suaminya Serda Ismail	700/704/31/II/2018 1 Februari 2018	2 s/d 8 Februari 2018	781.04/49/II/ITDA Februari 2018
5	Melakukan Pemeriksaan khusus permohonan perceraian A.n. Sdri. Rahyuni, S.Pd NIP. 19850109 200904 2 003 (Guru SMP Negeri 4 Barebbo) terhadap Suaminya Abd. Rahman, S.Pd.	700/704/32/II/2018 1 Februari 2018	2 s/d 8 Februari 2018	781.04/50/II/ITDA 12 Februari 2018
6	Melakukan Pemeriksaan khusus permohonan perceraian A.n. Sdr. Sudirman, S.Sos. NIP. 19640301 198903 1 011 (Kasi Trantibun Kantor Lurah Bulu Tempe) terhadap Istrinya Ratna Rani	700/704/33/II/2018 1 Februari 2018	2 s/d 8 Februari 2018	781.04/51/II/ITDA 12 Februari 2018
7	Melakukan Pemeriksaan khusus permohonan perceraian A.n. Hj. Nurhaidah, S.Pd , NIP. 19621025 198203 2 005 (Guru SDN 37 Majang) terhadap Suaminya Nirwan Ibrahim, SE	700/704/75/III/2018 2 Maret 2018	6 s/d 10 Maret 2018	781.04/65/III/ITDA 13 Maret 2018
8	Melakukan Pemeriksaan khusus permohonan perceraian A.n. Hj. Samsidar, S.Pi., M.Si. NIP. 19700318 199703 2 003 (Kabid Pemerintahan Sosial dan Budaya Bappeda Kab. Bone) terhadap Suaminya H. Akbar Lemang, SE	700/704/76/III/2018 2 Maret 2018	6 s/d 10 Maret 2018	781.04/66/III/ITDA 13 Maret 2018
9	Melakukan Pemeriksaan khusus permohonan perceraian A.n. Syaripah., S. Pd. NIP. 19591231 198703 2 043 (Guru Madya pada TK Nurul Haq) terhadap Suaminya M. Alwani	700/704/77/III/2018 2 Maret 2018	6 s/d 10 Maret 2018	781.04/67/III/ITDA 13 Maret 2018
10	Melakukan Pemeriksaan khusus permohonan perceraian A.n. Hasanuddin., S. Pd. NIP. 19621231 198511 1 002 (Guru SD Inpres 12/79 Watampone) terhadap Istrinya Hasma	700/704/78/III/2018 2 Maret 2018	6 s/d 10 Maret 2018	781.04/68/III/ITDA 13 Maret 2018
11	Melakukan Pemeriksaan khusus permohonan perceraian A.n. Sdri Jumriani, S.KM., M.Kes NIP. 19710422 199503 2 001 (Kasi Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Bone) terhadap Suaminya Sdr. Aswar Hamid	700/704/222/VIII/2018 9 Agustus 2018	13 s/d 20 Agustus 2018	781.04/375/VIII/ITDA 23 Agustus 2018
12	Melakukan Pemeriksaan khusus permohonan perceraian A.n. Sdri A. Tanda Mawiah, SE NIP. 19750611 200701 2 016 (Staf Sekretariat Dinas Perhubungan Kab. Bone) terhadap Suaminya Sdr. Akmal. S	700/704/223/VIII/2018 9 Agustus 2018	13 s/d 20 Agustus 2018	781.04/376/VIII/ITDA 23 Agustus 2018

No.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
13	Melakukan Pemeriksaan khusus permohonan perceraian A.n. Sdri. Ferawaty, SH NIP. 19800525 200801 2 015 (Staf Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Bone) terhadap Suaminya Sdr. Jumadi Ikkal, A. Md.	700/704/293/X/2018 4 Oktober 2018	8 s/d 12 Oktober 2018	781.04/432/X/ITDA 16 Oktober 2018
14	Melakukan Pemeriksaan khusus permohonan perceraian A.n. Sdri. H. Abbas, S.Pd NIP. 19630301 198611 1 004 (Guru SDN 91 Uloe Kec. Dua Boccoe Kab. Bone) terhadap Istrinya Sdri. Hj. Rosmala, S.Pd.	700/704/294/X/2018 4 Oktober 2018	8 s/d 12 Oktober 2018	781.04/433/X/ITDA 16 Oktober 2018
15	Melakukan Pemeriksaan khusus permohonan perceraian A.n. Sdri. Andi Sitti Nurhaedah, S. Pd. NIP. 19731002 199903 2 004 (Guru TK Kuncup Mekar Kec. Cina Kab. Bone) terhadap Suaminya Sdr. H. Anwar	700/704/295/X/2018 4 Oktober 2018	8 s/d 12 Oktober 2018	781.04/434/X/ITDA 16 Oktober 2018
16	Melakukan Pemeriksaan khusus permohonan perceraian A.n. Sdri. Hadijah, S. Pd. NIP. 19621231 198303 2 101 (Guru SDN 266 Gona Kec. Kajuara Kab. Bone) terhadap Suaminya Sdr. Nurtang	700/704/296/X/2018 4 Oktober 2018	8 s/d 12 Oktober 2018	781.04/435/X/ITDA 16 Oktober 2018
17	Melakukan Pemeriksaan khusus permohonan perceraian A.n. Sdri. Marjani, S. Sos. NIP. 19810115 201001 2 004 (Kasubag Program Bagian Tata Usaha Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Bone) terhadap Suaminya Sdr. Muh. Taufiq Rahman.	700/704/297/X/2018 4 Oktober 2018	8 s/d 12 Oktober 2018	781.04/436/X/ITDA 16 Oktober 2018
18	Melakukan Pemeriksaan khusus permohonan perceraian A.n. Wiwin Rachman. NIP. 19810605 201410 2 003 (Guru SD Inp.5/81 Kampuno Kec. Barebbo Kab. Bone) terhadap Suaminya Sdr. Kaharuddin.	700/704/346/XI/2018 8 November 2018	12 s/d 16 November 2018	781.04/470/XI/ITDA 21 November 2018
19	Melakukan Pemeriksaan khusus permohonan perceraian A.n. Sdri. Dra. Mariani NIP. 19610910 198203 2 009 (Guru SD Negeri 1 Watampone) terhadap Suaminya Sdr. Muhammad Anwar, SE.	700/704/347/XI/2018 8 November 2018	12 s/d 16 November 2018	781.04/471/XI/ITDA 21 November 2018
20	Melakukan Pemeriksaan khusus permohonan perceraian A.n. Sdri. Kasmawati.K. S.Pd.SD NIP. 19720412 198803 2 010 (Guru SD Negeri 179 Mallinrung Kec. Libureng Kab. Bone) terhadap Suaminya Sdr. Andi Muhammad Taufik	700/704/348/XI/2018 8 November 2018	12 s/d 16 November 2018	781.04/472/XI/ITDA 21 November 2018
21	Melakukan Pemeriksaan khusus permohonan perceraian A.n. Sdri. Elpina. S.Pd. NIP. 19740530 201408 2 001 (Guru SD Inpres 7/83 Pasempe Kec. Palakka Kab. Bone) terhadap Suaminya Sdr. Ansar.	700/704/375/XII/2018 6 Desember 2018	10 s/d 14 Desember 2018	781.04/545/XII/ITDA 18 Desember 2018
22	Melakukan Pemeriksaan khusus permohonan perceraian A.n. Sdri. Resnika. S.Pd. NIP. 19841218 200904 2 002 (Guru SD Inpres 3/77 Apala Kec. Barebbo Kab. Bone) terhadap Suaminya Sdr. Mulyadi.MR.	700/704/376/XII/2018 6 Desember 2018	10 s/d 14 Desember 2018	781.04/546/XII/ITDA 18 Desember 2018
23	Melakukan Pemeriksaan khusus permohonan perceraian A.n. Sdri. Dra. Hj. Rahmawati Said. NIP. 19651228 198511 2 001 (Guru SD Inpres 3/77 Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone) terhadap Suaminya Sdr. H.Zainuddin.	700/704/377/XII/2018 6 Desember 2018	10 s/d 14 Desember 2018	781.04/547/XII/ITDA 18 Desember 2018

No.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat				
1	Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Talungeng Kec. Barebbo Kab. Bone T.A 2015 dan 2016	700/704/02/I/2018 3 Januari 2018	5 s/d 11 Januari 2018	781.04/01/I/ITDA 18 Januari 2018
2	Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Mappatoba Kec. Salomekko Kab. Bone T.A 2015 dan 2016	700/704/03/I/2018 3 Januari 2017	5 s/d 11 Januari 2018	781.04/02/I/ITDA 23 Januari 2018
3	Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Manajeng Kec. Sibulue Kab. Bone T.A 2015,2016 dan 2017	700/704/34/II/2018 1 Februari 2018	2 s/d 9 Februari 2018	781.04/52/II/ITDA 12 Februari 2018
4	Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Laccori Kec. Dua BoccoE Kab. Bone T.A 2015,2016 dan 2017	700/704/35/II/2018 1 Februari 2018	2 s/d 9 Februari 2018	781.04/53/II/ITDA 12 Februari 2018
5	Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Telle Kec. Ajangale Kab. Bone T.A 2015,2016 dan 2017	700/704/36/II/2018 1 Februari 2018	2 s/d 9 Februari 2018	781.04/54/II/ITDA 12 Pebruari 2018
6	Audit Investigasi Pengelolaan Keuangan Desa Timurung Kec. Ajangale Kab. Bone	700/704/221/VIII/2018 9 Agustus 2018	13 s.d. 20 Agustus 2018	781.04/374/VIII/ITDA 23 Agustus 2018
Pemeriksaan Khusus				
1	Audit tertentu Stock Obat pada gudang Farmasi	700/704/162/V/2018 22 Mei 2018	24 s.d. 30 Mei 2018	781.04/207/VI/ITDA 7 Juni 2018



LAMPIRAN 5

Data Diklat/Bimtek yang diikuti oleh
Pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bone pada
Tahun 2018



**DAFTAR DIKLAT/BIMTEK YANG DIKUTI OLEH PEGAWAI INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE
TAHUN 2018**

No.	PESERTA DIKLAT/BIMTEK	NAMA DIKLAT/BIMTEK	PENYELENGGARA	WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN
DIKLAT PEMBENTUKAN/PENJENJANGAN APIP termasuk UJIAN SERTIFIKASI				
1.	1. A. HAERANI PRATIWI, S.TP, MM Nip. 19861109 201001 2 042 Analisis Pengawas Intern	Diklat Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan APIP	PUSBIN JFA BPKP PUSAT	8 Maret s/d 2 April 2018 Ciawi Bogor
2.	1. ANDI MATTALATTA, S.E., M.Si Nip. 19820429 201101 1 014 Analisis Pengawasan 2. DARMA, SH Nip. 19780127200701 2 013 Analisis Pengawasan 3. HERNIATI, SP Nip. 19820506 201503 2 001 Pengelola Pengawasan	Diklat Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan APIP	BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan	22 Okt - 6 Nopember 2018 Makassar
2.	1. HJ. ROSMINI, SE Nip. 19621231 198206 2 084 Auditor Muda 2. Drs. RUSTAN Nip. 19620709 198701 1 002 Auditor Muda 3. MUJTABA, S. Sos, MH Nip. 19651231 198503 1 037 Auditor Muda 4. YULITA, ST, M. Si Nip. 19761024 200604 2 021 Auditor Muda	Diklat Penjenjangan Auditor Madya Secara Madya secara Tatap Muka	BPKP	19 s/d 27 Maret 2018 Ciawi Bogor
3.	1. H. MUHAMMADONG, S.IP, M.Si Nip. 19650703 198602 1 008 Pengawas Pemerintahan Muda 2. MUNIRAH, S.Sos, M.Si Nip. 19640802 198603 2 013 Pengawas Pemerintahan Muda 3. SULTAN S.Pd, M.Si Nip. 19670101 198602 1 006 Pengawas Pemerintahan Muda	Diklat fungsional Pengawas Pemerintahan Jenjang Madya	KEMENDAGRI RI	22 April s/d 8 Mei 2018 Jakarta

No.	PESERTA DIKLAT/BIMTEK	NAMA DIKLAT/BIMTEK	PENYELENGGARA	WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN
DIKLAT/BIMTEK/WORKSHOP SUBSTANTIF				
1.	1. A. IRLAN ABBAS MUMANG Nip. 19770419 201001 1 007 Pengadministrasian umum	Workshop Kehumasan dan Jurnalistik	SEKDA	20 s/d 21 Januari 2018 TALKSHOW Hotel Helios
2.	1. MUH. KAFRAWI SAMAD, ST. Nip. 19780202 200604 1 007 Kasubag. Perencanaan	BIMTEK Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018	BUPATI BONE	3 s/d 5 Pebruari 2018 Hotel Maxone Makassar
3.	1. MUH. KAFRAWI SAMAD, ST. Nip. 19780202 200604 1 007 Kasubag. Perencanaan	BIMTEK LKPJ / LPPD T.A 2017	SEKDA BONE	5 S/D 7 Pebruari 2018 Hotel Maxone Makassar
4.	1. A. SOHRAH SAM , SP, M.Si Nip. 19700211 200604 2 003 Auditor Muda	Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Penyebarluasan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Bidang Pembangunan Penyusunan Perencanaan Responsif Gender (PPRG)	DP3A	26 s/d 27 Feb 2018 Wisma Yulia Bone
5.	1. MUH. KAFRAWI SAMAD, ST. Nip. 19780202 200604 1 007 Kasubag. Perencanaan	BIMTEK dan Sosialisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Data Sektoral Tahun 2018	SEKDA BONE	10-Apr-18 Ruang Rapat Bappeda Bone
6.	1. MUH. KAFRAWI SAMAD, ST. Nip. 19780202 200604 1 007 Kasubag. Perencanaan 2 IDRUS, S.Kom, M.Si Nip. 19800423 201001 1 025 Auditor Muda	BIMTEK Peningkatan Kapabilitas APIP Menuju Level 2	BPKP	12 s/d 13 April 2018 Kantor Perwakilan BPKP Prov. Sul-Sel
7	1. A. HAERANI PRATIWI, S.TP, MM Nip. 19861109 201001 2 042 Analisis Pengawas Intern	BIMTEK PUG/PPRG Prov. Sul-Sel	Sekda Prov. Sul-Sel	19 s/d 20 April 2018 Swiss Bell Hotel Losari Makassar
8.	1. Drs. H. A. AMAR MA'RUF P, M.Si. Nip. 19590608 198603 1 015 Inspektur Daerah Kab. Bone 2 IDRUS, S.Kom, M.Si Nip. 19800423 201001 1 025 Auditor Muda	Workshop Percepatan Reformasi Birokrasi	SEKDA	24 April 2018 Ruang Pola Kantor Gubernur Makassar
9	1. A. SYAFRUDDIN, S.Sos. M.Si Nip. 19690605 200903 1 001 Staf Perencanaan 2 RUSTAN, S.T. Nip. 19740111 200901 1 002 Staf Inspektorat Daerah	Workshop Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	BPKP	8 s/d 9 Mei 2018 Ruang Kelas Diklat Perwakilan BPKP Prov. Sul-Sel

No.	PESERTA DIKLAT/BIMTEK	NAMA DIKLAT/BIMTEK	PENYELENGGARA	WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN
10	1 AHMAR, S.Sos, M.Si Nip. 19800408 201001 1 019 Auditor Kepegawaian Pertama 2 YULISNAWATI, S.IP, M.Si Nip. 19841130 200502 2 003 Auditor Kepegawaian	Bimtek Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA Kepegawaian	BKN	11 s/d 13 Juli 2018 Aula Gedung I Lantai 5 BKN Pusat
11	1 MUH. KAFRAWI SAMAD, ST. Nip. 19780202 200604 1 007 Kasubag. Perencanaan	1. Bimtek Penyusunan PPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023 2. Bimtek Penyusunan Rancangan Teknoratik PPJMD Kab. Bone Th.. 2018-2023	SEKDA	23 Juli 2018 Ruang rapat BAPPEDA Bone 24 Juli 2018 Diamond D'Kotak Café
12	1 A. SYAFRUDDIN, S.Sos. M.Si Nip. 19690605 200903 1 001 Staf Perencanaan 2 AHMAR, S.Sos, M.Si Nip. 19800408 201001 1 019 Auditor Kepegawaian Pertama	Workshop Pengadaan Barang jasa (PBJ)	SEKDA PROVINSI	24 s/d 25 Juli 2018 Hotel IBIS Styles Makassar
13	1 YULITA, S.T. Nip. 19761024 200604 2 021 Auditor Muda 2 ABDUL RAHMAN SARJI, ST, M.Si Nip. 19760908 201001 1 010 Auditor Pertama	Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP di Prov. Sul-Sel	KPK	6 s/d 9 Agustus 2018 AULA BPKP Sul-Sel Makassar
	1 SOFYAN, STP, M. Si Nip. 19790503 200604 1 012 Auditor Madya 2 IDRUS, S.Kom, M.Si Nip. 19800423 201001 1 025 Auditor Muda	Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP di Prov. Sul-Sel	KPK	27 s/d 30 Agustus 2018 AULA BPKP Sul-Sel Makassar
14	1 A. SOHRAH SAM , SP, M.Si Nip. 19700211 200604 2 003 Auditor Muda	Bimtek Pengawasan PPRG Bagi Inspektorat Prov. Sul-Sel	Gubernur Sul-Sel	14 s/d 16 Agustus 2018 Hotel Swiss Bell Losari Makassar
15	1 MUH. KAFRAWI SAMAD, ST. Nip. 19780202 200604 1 007 Kasubag. Perencanaan	Bimtek Integrasi Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam rancangan awal RPJMD Kab. Bone Tahun 2018 - 2023	SEKDA	12-Sep-18 The Zone Café Bone

No.	PESERTA DIKLAT/BIMTEK	NAMA DIKLAT/BIMTEK	PENYELENGGARA	WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN
16	1 YULITA, S.T. Nip. 19761024 200604 2 021 Auditor Muda 2 A. SYAFRUDDIN, S.Sos. M.Si Nip. 19690605 200903 1 001 Staf Perencanaan	Bimtek Audit Pencegahan Kriminalisasi dan tindak pidana korupsi dalam PBJ + Sosialisasi Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	DIRJEN PU dan PERUMAHAN RAKYAT	26 - 29 Juli 2018 DAFAM Hotel Malioboro Yogyakarta
17	1 ANDI MATTALATTA, SE. M.Si Nip. 19820429 201101 1 014 Staf Inspektorat Daerah 2 DARMA. SH Nip. 19780127 200701 2 013 Staf Inspektorat Daerah	Bimtek Aplikasi E- Kinerja secara Online	BKPSDM	25-Sep-18 Hotel Helios
18	1 ANDI MATTALATTA, SE. M.Si Nip. 19820429 201101 1 014 Staf Inspektorat Daerah	Pelatihan Pengelolaan Laporan SP4N	Sekda Prov	25 s/d 26 September 2018 Ruang Aula Inspektorat Prov. Sul-Sel Makassar
19	1 MUH. KAFRAWI SAMAD, ST. Nip. 19780202 200604 1 007 Kasubag. Perencanaan	Bimtek Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Kab. Bone T.2018 - 2023	Sekda	03-Nov-18 Hotel Novena Bone
20	1 AHMAR, S.Sos Nip. 19800408 201001 1 019 Auditor Kepegawaian Pertama	Bimtek Pengelolaan BMD	Sekda	22 s/d 23 November 2018 Ruang Rapat BPKAD Bone
21	1 Drs. H. A. AMAR MA'RUF P, M.Si. Nip. 19590608 198603 1 015 Inspektur Daerah Kab. Bone 2 ABDUL RAHMAN SARJI, ST, M.Si Nip. 19760908 201001 1 010 Auditor Muda	Workshop Pengawasan Program Inovasi Desa	Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	28 s/d 30 November 2018 The Rinra Hotel Makassar
21	1 Hj. MARYANIS, SH.MH Nip. 19800102 201101 2 011 Auditor Muda	Bimtek Penyusunan Proposal Inovasi Pelayanan Publik	Bupati Bone	17 s/d 19 Desember 2018 Hotel Novena Bone
PELATIHAN KANTOR SENDIRI				
1.	Tim Kerja Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone	Bimtek Penyusunan Dokumen Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP Menuju Level 3	Kerjasama BPKP dan Inspektorat Daerah Kab. Bone	16 -19 Oktober 2018 dan 12 -15 September 2018 Ruang Pertemuan "Jennang To Bala" Inspektorat Kab. Bone